



PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA SEMARANG TAHUN 2005-2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap Perencanaan Pembangunan harus dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pembangunan daerah Kota Semarang dalam kurun waktu 5 tahun mendatang dapat terarah, berkesinambungan, efektif dan efisien serta dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 150 ayat 3e maka Dokumen Perencanaan Pembangunan jangka Menengah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2005-2010.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2000 – 2010.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

dan

WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA SEMARANG TAHUN 2005 – 2010.

Pasal 1

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2005-2010 merupakan Dokumen Perencanaan yang berisi penjabaran visi, misi dan kebijakan Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dokumen Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Tengah dan memperhatikan RPJM Nasional.

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2005 – 2010 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Maksud dan Tujuan
- I.3 Landasan Penyusunan
- I.4 Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- I.5 Sistematika Penyusunan

BAB II KONDISI UMUM DAERAH

- II.1 Kondisi Geografis
- II.2 Perekonomian Daerah
- II.3 Sosial Budaya Daerah
- II.4 Prasarana dan Sarana Daerah
- II.5 Pemerintahan Umum

BAB III VISI dan MISI

- III.1 Visi
- III.2 Misi

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

- IV.1 Strategi Pembangunan Kota Semarang
- IV.2 Prioritas Pembangunan Daerah

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

- V.1 Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah
- V.2 Arah Pengelolaan Belanja Daerah
- V.3 Pembiayaan
- V.4 Kebijakan Umum Anggaran

BAB VI KEBIJAKAN UMUM

BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII PENUTUP

Pasal 3

Isi beserta uraian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2005 – 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Oktober 2005

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 31 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

Ymt

ttd

HADI PURWONO
Assisten Administrasi



LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2005 NOMOR 4 SERIE E

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

Nomor : 4 Tahun 2005

Tanggal : 31 Oktober 2005

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD) KOTA SEMARANG
TAHUN 2005 – 2010**



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Ditetapkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 ayat 2), dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek atau tahunan (1 tahun). Setiap daerah (propinsi/kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RPJM Daerah Kota Semarang Tahun 2005 – 2010 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota Semarang yang akan dilaksanakan dan ingin diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. RPJM Daerah Kota Semarang Tahun 2005 – 2010 dalam penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah Kota Semarang Tahun 2005 – 2025 serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Propinsi. Di samping itu, dalam penyusunan RPJM Daerah Kota Semarang Tahun 2005 – 2010 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun yang lalu serta isu-isu strategis yang berkembang.

Mengingat peran dan fungsi RPJM Daerah Kota Semarang sangat penting bagi Pemerintah Kota, pengusaha dan masyarakat, maka proses penyusunannya dilakukan secara sistematis, akurat dan terpadu dengan melibatkan seoptimal mungkin peran para pemangku kepentingan pembangunan. Berdasarkan alasan inilah maka penyusunan RPJM Daerah Kota Semarang dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang holistik dan berkesinambungan.

Muatan dalam RPJM Daerah Kota Semarang Tahun 2005 – 2010 berisi arah kebijakan keuangan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, program lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Pengertian indikatif berarti bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah ini, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku / fleksibel.

I.2 Maksud Dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2005-2010 dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan pembangunan selama lima tahun dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program, serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Walikota pada akhir masa jabatan.

Tujuan penyusunan RPJMD Kota Semarang adalah untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah, serta merumuskan program pembangunan daerah selama lima tahun, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penetapan strategi dan kebijakan umum serta perumusan program melalui evaluasi pembangunan lima tahun yang telah berjalan, menelaah situasi saat ini dan membuat peramalan serta proyeksi pembangunan, dengan harapan dapat dipilih beberapa sasaran yang tepat sesuai kewenangan daerah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

I.3 Landasan Penyusunan

Landasan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2005 - 2010 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah.
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara.
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- h. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- l. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- m. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Propinsi Jawa Tengah 2001 – 2005.

- n. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008.
- o. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2000 – 2010.
- p. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang RPJP Daerah Kota Semarang Tahun 2005 - 2025.
- q. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050 / 2020 / SJ Tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.
- r. Surat Edaran Bersama Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri nomor 0259/M.PPN/1/2005 dan 050/166/SJ Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

I.4 Hubungan RPJM Kota Semarang Dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu RPJM Daerah merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga RPJM Daerah harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

RPJM Daerah Kota Semarang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah Kota Semarang dan memperhatikan RPJM Nasional serta Renstra Daerah Propinsi. Selain itu RPJM Daerah Kota Semarang juga digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, RPJM Daerah Kota Semarang Tahun 2005 – 2010 harus mengacu dan mengarah bagi terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemanfaatan ruang baik kebijakan struktur tata ruang maupun kebijakan pola tata ruang. Dimana kebijakan pemanfaatan ruang Kota Semarang mengacu pada Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Kota I – X (RDTR BWK I - X) Tahun 2000 – 2010.

I.5 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2005-2010 adalah sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	I.1 Latar Belakang
	I.2 Maksud dan Tujuan
	I.3 Landasan Penyusunan
	I.4 Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
	I.5 Sistematika Penyusunan
BAB II	KONDISI UMUM DAERAH
	II.1 Kondisi Geografis
	II.2 Perekonomian Daerah
	II.3 Sosial Budaya Daerah
	II.4 Prasarana dan Sarana Daerah
	II.5 Pemerintahan Umum
BAB III	VISI dan MISI
	III.1 Visi
	III.2 Misi
BAB IV	STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
	IV.1 Strategi Pembangunan Kota Semarang
	IV.2 Prioritas Pembangunan Daerah
BAB V	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
	V.1 Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah
	V.2 Arah Pengelolaan Belanja Daerah
	V.3 Pembiayaan
	V.4 Kebijakan Umum Anggaran
BAB VI	KEBIJAKAN UMUM
BAB VII	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

KONDISI UMUM DAERAH

II.1 KONDISI GEOGRAFIS

Kota Semarang merupakan Ibukota Propinsi Jawa Tengah, berada pada pelintasan Jalur Jalan Utara Pulau Jawa yang menghubungkan Kota Surabaya dan Jakarta. Secara geografis, terletak diantara $109^{\circ} 35'$ – $110^{\circ} 50'$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 50'$ – $7^{\circ} 10'$ Lintang Selatan. Dengan luas $373,70 \text{ KM}^2$, Kota Semarang memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

- Sebelah utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang
- Sebelah Timur : Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kendal

Secara topografi terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan. Daerah pantai merupakan kawasan di bagian Utara yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa dengan kemiringan antara 0% sampai 2%, daerah dataran rendah merupakan kawasan di bagian Tengah, dengan kemiringan antara 2 – 15 %, daerah perbukitan merupakan kawasan di bagian Selatan dengan kemiringan antara 15 – 40% dan beberapa kawasan dengan kemiringan diatas 40% (>40%).

Sesuai dengan letak geografis, dipengaruhi iklim daerah tropis yang dipengaruhi oleh angin muson dengan 2 musim, yaitu musim kemarau pada bulan April – September dan musim penghujan antara bulan Oktober – Maret. Curah hujan tahunan rata-rata sebesar 2.790 mm, suhu udara berkisar antara 23° C sampai dengan 34° C , dengan kelembaban udara tahunan rata-rata 77%.

Kota Semarang dalam suatu sistem hidrologi, merupakan kawasan yang berada pada kaki bukit Gunung Ungaran, mengalir beberapa sungai yang tergolong besar seperti yaitu Kali Besole, Kali Beringin, Kali Silandak, Kali Siangker, Kali Kreo, Kali Kripik, Kali Garang, Kali Candi, Kali Bajak, Kali Kedungmundu, Kali Penggaron.

Sebagai Daerah Hilir, dengan sendirinya merupakan daerah limpasan debiet air dari sungai yang melintas dan mengakibatkan terjadinya banjir pada musim penghujan. Kondisi ini diperparah oleh karakteristik kontur wilayah berbukit dengan perbedaan ketinggian yang sangat curam sehingga curah hujan yang terjadi didaerah hulu akan sangat cepat mengalir ke daerah hilir .

Pola tata guna lahan terdiri dari Perumahan, Tegalan, Kebun campuran, Sawah, Tambak, Hutan, Perusahaan, Jasa, Industri dan Penggunaan lainnya dengan sebaran Perumahan sebesar 33,70 %, Tegalan sebesar 15,77 %, Kebun campuran sebesar 13,47 %, Sawah sebesar 12,96 %, Penggunaan lainnya yang meliputi jalan, sungai dan tanah kosong sebesar 8,25 %, Tambak sebesar 6,96 %, Hutan sebesar 3,69 %, Perusahaan 2,42 %, Jasa sebesar 1,52 % dan Industri sebesar 1,26 %.

Sebagaimana diatur di dalam Perda Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2000 - 2010, telah ditetapkan kawasan yang berfungsi lindung dan kawasan yang berfungsi budidaya. Kawasan Lindung, meliputi kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya, kawasan lindung setempat dan kawasan rawan bencana. Kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya adalah kawasan-kawasan dengan kemiringan >40% yang tersebar di wilayah bagian Selatan. Kawasan lindung setempat adalah kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan waduk, dan sempadan mata air. Kawasan lindung rawan bencana merupakan kawasan yang mempunyai kerentanan bencana longsor dan gerakan tanah. Kegiatan budidaya dikembangkan dalam alokasi pengembangan fungsi budidaya.

Prioritas pengembangan wilayah Kota Semarang terbagi dalam empat wilayah pengembangan dan masing-masing dibagi dalam beberapa bagian wilayah kota, dan masing-masing bagian wilayah kota mempunyai skala prioritas pengembangan. Prioritas pengembangan itu meliputi: perdagangan, perkantoran, jasa, pendidikan, olahraga, transportasi, industri, pemukiman, pertanian, dan pengembangan Kota Baru di wilayah Kecamatan Mijen.

1. Kawasan Pusat Perkantoran

Kawasan pusat perkantoran dialokasikan dalam lima kawasan, yaitu:

- Kawasan Perkantoran Jalan Pahlawan: Pusat perkantoran Pemerintah Propinsi.
- Kawasan Perkantoran Jalan Pemuda: Pusat perkantoran Pemerintah Kota Semarang.
- Kawasan Perkantoran Jalan Madukoro: Pusat perkantoran Pemerintah Propinsi dan Kota Semarang.
- Kawasan Kota Lama: Kawasan perkantoran swasta.
- Kawasan Kota Baru Mijen: Pusat perkantoran swasta, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kota Semarang.

2. Kawasan Perdagangan

Kota Semarang dalam mengembangkan kawasan perdagangan lebih menekankan pada:

- Pengoptimalan pusat-pusat perdagangan yang sudah ada di wilayah pusat kota, dan pengembangan pusat perdagangan baru di semua wilayah kecamatan .
- Pengembangan pusat perdagangan yang bersifat Linear, yaitu pusat perdagangan di sepanjang jalan dan bersifat alamiah, misalnya Jl MT Haryono, Jl Dr Cipto, Jl Brigjen Sudiarto, Jl Jend Sudirman, Jl Pandanaran, Jl Ahmad Yani, Jl Gajah Mada, dan Jl MH Thamrin.

3. Kawasan Industri

Kawasan industri di Kota Semarang yang menjadi prioritas utama untuk dikembangkan terbagi dalam tiga wilayah industri (*Industry estate*), yaitu:

a. Kawasan Industri Genuk

Kawasan industri Genuk mempunyai kelebihan sebagai berikut:

- Luas areal 900 ha
- Dekat dengan pelabuhan laut, pergudangan, dan pusat perdagangan
- Dekat dengan sumber tenaga kerja
- Dekat dengan jalan transportasi Jakarta-Surabaya
- Angin tidak menuju ke Pusat Kota
- Drainase ke arah laut

b. Kawasan Industri Tugu

- Kelebihan Kawasan Industri Tugu
- Luas areal 1600 ha
- Dekat dengan sumber tenaga kerja
- Dekat dengan jalan transportasi Jakarta-Surabaya
- Jalur sabuk pengembangan Jawa Tengah Bagian Utara
- Drainase ke arah laut
- Memungkinkan pembangunan pelabuhan industri
- Kondisi tanahnya lebih matang daripada Kawasan Industri Genuk.

c. Kawasan Industri Mijen

Kawasan Industri Mijen merupakan satu kesatuan dengan pembangunan Kota Baru Mijen. Kawasan ini merupakan wilayah cadangan dan mampu menjadi kawasan industri, karena:

- Luas areal 300 ha
 - Memungkinkan jalur ke Pelabuhan Laut Tanjung Emas
 - Jenis industri yang menjadi prioritas adalah industri dengan tingkat polusi rendah dan teknologi tinggi.
 - Memungkinkan pengembangan jalur transportasi primer.
- d. Kawasan Pendidikan dan Olah raga
- Kawasan pendidikan di kota Semarang, khususnya untuk pendidikan tinggi, diarahkan kearah Kecamatan Ngaliyan, Gajahmungkur, Semarang Selatan, Pedurungan, Tembalang, Gunungpati dan Mijen.
 - Kawasan olah raga di Kota Semarang, untuk skala regional diarahkan pada dua daerah utama, yaitu Kecamatan Gajahmungkur dan kawasan kota baru di Kecamatan Mijen.

Masing-masing bagian wilayah kota mempunyai prioritas peruntukan pengembangan.



Tabel II.1
Pembagian Wilayah Pengembangan Kota Semarang

No	Wilayah Pengembangan	Bagian Wilayah Kota	Prioritas Peruntukan
1	Wilayah Pengembangan Kota I	1. Bagian wilayah kota I: Kec Semarang Tengah, Kec Semarang Timur, Kec Semarang Selatan	Perkantoran, Perdagangan, dan Jasa
		2. Bagian wilayah kota II: Kec Gajah Mungkur, Kec Candisari	Pendidikan dan Olah raga
		3. Bagian wilayah kota III: Kec Semarang Barat dan Kec Semarang Utara	Transportasi
2	Wilayah Pengembangan Kota II	1. Bagian Wilayah Kota IV: Wilayah Genuk	Sub urban, wilayah Industri, transportasi
		2. Bagian Wilayah Kota X: Wilayah Kec Tugu dan Kec Ngaliyan	Sub Urban, wilayah industri, dan perumahan dengan kepadatan rendah
3	Wilayah Pengembangan Kota III	1. Bagian Wilayah Kota V: Kec Gayamsari dan Kec Pedurungan	Pemukiman dan Pendidikan
		2. Bagian Wilayah Kota VI: Kec Tembalang	Pendidikan dan Pemukiman
		3. Bagian Wilayah Kota VII: Kec Banyumanik	Militer dan Pemukiman
4	Wilayah Pengembangan Kota IV	1.1. Bagian Wilayah Kota VIII- Kec Gunung Pati	Wilayah cadangan pengembangan pendidikan dan pengembangan sektor pertanian, meliputi: perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan darat
		2.2. Bagian Wilayah Kota IX- Kec Mijen	Wilayah cadangan pengembangan: Kawasan pertumbuhan baru sebagai kota baru; Industri non polutif dan teknologi tinggi, rekreasi, dan olah raga: Pengembangan sektor pertanian yang meliputi; perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan darat

Sumber: RTRW Kota Semarang 2000-2010

Penentuan wilayah pengembangan disesuaikan dengan spesifikasi kegiatan yang ada dan potensi lokasi serta karakteristik kegiatan yang akan dikembangkan pada masing-masing wilayah. Kemudian untuk lebih meningkatkan efisiensi pengembangan kota, maka masing-masing wilayah pengembangan dibagi ke dalam BWK (Bagian Wilayah Kota). Adapun pembagian wilayah-wilayah Kota sesuai dengan RTRW Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1. Bagian Wilayah Kota I

Rencana pemanfaatan ruang di BWK I sesuai dengan arahan dari RTRW Kota Semarang serta kecenderungan perkembangan yang ada adalah :

- a. *Kawasan Perkantoran*, alokasi kawasan perkantoran di BWK I meliputi Kelurahan Sekayu, Kelurahan Mugasari dan Kelurahan Pleburan.
- b. *Kawasan Perdagangan dan Jasa*, alokasi fungsi ini berada pada Kelurahan Pandansari, Kauman, Jagalan, Rejomulyo, Peterongan dan Purwodinatan.
- c. *Kawasan Permukiman*, alokasi fungsi ini berada pada Kelurahan Pindrikan Lor, Pindrikan Kidul, Miroto, Pekunden, Gabahan, Brumbungan, Mlatibaru, Bugangan, Sarirejo, Rejosari, Karangturi, Karang Tempel, Bulustalan, Barusari, Randusari, Lamper Lor, Lamper Kidul dan Lamper Tengah.
- d. *Kawasan Campuran* (permukiman, perkantoran, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum), alokasi fungsi ini berada pada Kelurahan Kembangsari, Bangunharjo, Karangkidul, Kemijen, Mlatiharjo, Kebonagung, Randusari, Mugassari, Pleburan dan Wonodri.

2. Bagian Wilayah Kota II

Rencana pemanfaatan ruang BWK II berdasarkan kepada kondisi fisik dasar serta fungsi dan peranan bagian wilayah kota sesuai dengan arahan dari RTRW Kota Semarang. Berdasarkan hal tersebut maka arah pengembangan pemanfaatan ruang di wilayah perencanaan adalah :

- a. *Kawasan Permukiman Perkotaan*, alokasi pengembangan fungsi tersebut meliputi Kelurahan Bendungan, Kelurahan Petompon, Kelurahan Bendan Duwur, Kelurahan Karangrejo, Kelurahan Jomblang, Kelurahan Kaliwiru, Kelurahan Jatingaleh, Kelurahan Karanganyar Gunung, Kelurahan Lempongsari, Kelurahan Bendan Ngisor, Kelurahan Gajah Mungkur, Kelurahan Sampangan, Kelurahan Wonotingal, Kelurahan Candi, dan Kelurahan Tegalsari.

- b. *Kawasan Perkantoran*, alokasi pengembangan fungsi perkantoran Kelurahan Petompon, Kaliwiru, Karangrejo, Wonotingal, Tegalsari, dan Jatingaleh.
- c. *Kawasan Perdagangan Barang dan Jasa*, pada BWK II fungsi ini berkembang di sepanjang jalur utama dengan skala pelayanan kota untuk melayani pemukiman-pemukiman yang tumbuh dan berkembang. Beberapa kelurahan yang dialokasikan menjadi fungsi perdagangan dan jasa meliputi Kelurahan Wonotingal, Kelurahan Jatingaleh dan Kelurahan Gajah Mungkur.
- d. *Kawasan Campuran Permukiman dan Perdagangan*, alokasi pengembangan fungsi ini berada pada kelurahan Sampangan, Wonotingal, Jomblang, Petompon, Tegalsari.
- e. *Fungsi Kawasan Khusus Militer*, alokasi pengembangan fungsi ini berada pada Kelurahan Gajah Mungkur.
- f. *Kawasan Olahraga dan Rekreasi*, alokasi pengembangan fungsi ini pada Kelurahan Karangrejo dan Kelurahan Kaliwiru.
- g. *Kawasan-kawasan pendidikan*, pada perkembangannya fasilitas pendidikan ini diharapkan tetap memiliki fungsi pelayanan seperti kondisi sekarang dengan pembatasan pengembangan pada Kelurahan Bendan Duwur. Pengembangan fungsi ini diarahkan pada Kelurahan Sampangan dan Kelurahan Petompon, Kelurahan Gajah Mungkur, Kelurahan Jatingaleh, dan Kelurahan Karangrejo.

3. Bagian Wilayah Kota III

Peran BWK III sebagai kawasan pengembangan dengan fungsi utama sebagai Kawasan Permukiman, kawasan Pusat Kota dan Pusat Transportasi Kota yang ditunjang dengan berbagai fungsi pendukung yaitu Fungsi Pelayanan Umum. Kegiatan-kegiatan yang dikembangkan di BWK III meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. *Pusat transportasi*, Pengembangan fungsi kegiatan harus dibentuk dalam satu kesatuan sistem transportasi terintegrasi yang menghubungkan wilayah Kota Semarang dan regional Jawa Tengah dengan wilayah nasional maupun internasional. Ketiga roda transportasi sebagai pusat kegiatan transportasi masing-masing Bandar Udara Ahmad Yani berada pada Kelurahan Tambakharjo, Pelabuhan Samudra berada di Kelurahan Tanjung Mas, dan Stasiun Kereta Api Tawang dan Poncol di Kelurahan Dadapsari dan Purwosari.

- b. *Permukiman dan Perumahan*, Pembangunan perumahan di BWK III diarahkan sebagai permukiman dengan intensitas yang cukup tinggi yang meliputi semua Kelurahan yang berada pada BWK II.
- c. *Kawasan Rekreasi*, yang terdiri dari kawasan rekreasi pameran PRPP yang berskala Regional Jawa Tengah, museum terbesar di Jawa Tengah (Museum Ronggowarsito), Kawasan rekreasi pantai Marina dan Kuil suci untuk perayaan tahun baru Cina.
- d. *Kawasan Pergudangan*, kegiatan ini merupakan kegiatan penunjang dari kegiatan fungsi utama BWK III meliputi Kelurahan Tanjung Mas dan Bandarharjo yang difungsikan sebagai tempat penyimpanan barang yang datang melalui pelabuhan samudra.
- e. *Perdagangan dan jasa*, fungsi perdagangan dan jasa di BWK III yaitu perdagangan hasil bumi, onderdil mobil dan motor, bahan bangunan, elektronika dan lain-lain. Melihat kecenderungan perkembangan aktivitas wilayah BWK III maka arahan pengembangan fungsi kegiatan ini mencakup seluruh kelurahan dengan pusat di Kelurahan Karangayu.
- f. *Perkantoran/Pemerintahan dan Fasilitas Sosial*, arahan pengembangan fungsi kegiatan ini dialokasikan pada Kelurahan Tanjung Mas dan Kelurahan Tawangsari.
- g. *Industri*, arahan pengembangan fungsi ini di BWK III dialokasikan pada Kelurahan Bandarharjo dan Kelurahan Tanjung Mas.
- h. *Penghijauan dan Ruang Terbuka*, diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan sebagai paru-paru kota dengan mengupayakan suatu taman-taman lingkungan serta jalur hijau sepanjang jalan kota.
- i. *Retarding Basin*, diarahkan untuk berfungsi sebagai tempat penampungan air karena BWK III ini terdapat masalah terhadap penggenangan air (rob dan banjir).

4. Bagian Wilayah Kota IV

Sesuai dengan arahan RTRW Kota Semarang bahwa fungsi primer BWK IV ditetapkan untuk kegiatan industri, pusat transportasi dan perikanan darat. Sedangkan kegiatan fungsi pendukung fungsi primer yang ada yaitu kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, campuran, pusat kesehatan dan pendidikan. Adapun arahan lokasi masing-masing kegiatan tersebut adalah :

- a. *Kawasan Industri*, dialokasikan di sebelah utara dan selatan Jl. Kaligawe. Untuk industri kecil di selatan yaitu di Kelurahan Muktiharjo Lor, Gebangsari, Genuksari, dan Banjardowo. Sedangkan industri sedang dan besar di utara, yaitu pada kelurahan Terboyo Kulon, Terboyo Wetan dan Trimulyo.
- b. *Kawasan Permukiman*, dialokasikan sebelah selatan dan timur Kecamatan Genuk yaitu di Kelurahan Bangetayu Kulon, Bangetayu Wetan, Sembungharjo, Banjardowo, Karangroto, sebagian Kudu, sebagian Muktiharjo Lor, sebagian Genuksari, Gebangsari, dan Penggaron Lor.
- c. *Kawasan Perdagangan dan Jasa*, dialokasikan disepanjang Kaligawe – Genuk dan sepanjang jalan Banjardowo Raya (Genuk-Pedurangan).
- d. *Kawasan Perikanan Darat*, kegiatan perikanan yang dikembangkan di BWK IV Genuk adalah perikanan tambak. Lahan untuk kegiatan ini dialokasikan disebelah utara Kecamatan Genuk yaitu di Kelurahan Terboyo Kulon, Terboyo Wetan dan Trimulyo.
- e. *Kawasan Permukiman Nelayan dan Perumahan bagi Pekerja Pabrik*, yang dialokasikan di Kelurahan Trimulyo untuk permukiman Nelayan dan Kelurahan Terboyo Kulon dan Wetan untuk perumahan bagi pekerja pabrik.
- f. *Pusat Transportasi*, yaitu dengan adanya Terminal Terboyo yang berada di Kelurahan Terboyo Kulon.
- g. *Kawasan Pendidikan dan Kesehatan*, diarahkan di Kelurahan Terboyo Kulon dan tersebar merata diseluruh wilayah Kecamatan Genuk.

5. Bagian Wilayah Kota V

Sesuai dengan arahan RTRW Semarang bahwa fungsi primer BWK V ditetapkan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, pusat transportasi, kawasan permukiman dengan kepadatan sedang – tinggi. Sedangkan kegiatan fungsi pendukung fungsi primer yang ada yaitu sebagai pusat kesehatan dan kawasan industri. Adapun arahan lokasi masing-masing kegiatan tersebut adalah :

- a. *Kawasan Perdagangan dan Jasa* : dialokasikan disepanjang jalan Brigjen Sudiarto (Jl. Majapahit), Jl. Supriyadi dan sebagian Jalan Kaligawe Raya, sedangkan kawasan campuran permukiman dan perdagangan disepanjang Jalan Gajah, Arteri Pedurangan – Citarum, Bandardowo Raya dan Pedurangan Kidul.

- b. *Kawasan Permukiman* : dialokasikan secara merata diseluruh bagian wilayah Kecamatan Gayamsari dan Pedurungan yaitu Kelurahan Tambakrejo, Kaligawe, Sawahbesar, Sambirejo, Siwalan, Pedurungan Tengah, Padean Lamper, Gayamsari, Muktiharjo Kidul, Tlogosari Kulon, Kalicari, Palebon, Gemah, Tlogosari Wetan, Penggaron Kidul, Pedurungan Lor, Plamongansari dan Tlogomulyo.
- c. *Kawasan Industri* : dialokasikan di Timur BWK V (dekat perbatasan dengan Kecamatan Mranggen – Demak), yaitu di Kelurahan Plamongansari dan bagian utara BWK V, yaitu di Kelurahan Tambakrejo.
- d. *Pusat Transportasi* : yaitu dengan adanya Sub Terminal Penggaron di Kelurahan Penggaron Kidul.
- e. *Pusat Kesehatan* : diarahkan di Kelurahan Gemah dengan adanya Rumah Sakit Jiwa Semarang, sedangkan fasilitas kesehatan lainnya tersebar diseluruh bagian wilayah Kecamatan Gayamsari dan Pedurungan.

6. Bagian Wilayah Kota VI

Sesuai dengan arahan RTRW Semarang bahwa fungsi primer BWK VI ditetapkan untuk kegiatan pendidikan, fungsi skunder (skala kota) sebagai kawasan permukiman (kepadatan sedang-rendah). Sedangkan kegiatan pendukung lainnya (skala lokal) meliputi kegiatan campuran, perdagangan dan jasa, rekreasi dan konservasi (penanganan daerah lindung). Adapun arahan lokasi masing-masing kegiatan tersebut adalah :

- a. *Kawasan Pendidikan* : dialokasikan di Kelurahan Tembalang dan di Perumahan Bukit Kencana Jaya. Universitas Diponegoro merupakan sarana pendidikan skala nasional yang ada di Kelurahan Tembalang. Pemanfaatan ruang untuk kawasan pendidikan memerlukan kebutuhan ruang pelengkap sarana prasarana pendidikan, seperti jaringan jalan untuk kemudahan akses transportasi (terutama untuk menjangkau lokasi-lokasi kampus yang selama ini dilayani oleh angkutan plat hitam).
- b. *Kawasan Perumahan* : dialokasikan di semua Kelurahan yang ada di Kecamatan Tembalang dengan tingkat kepadatan penduduk rendah – sedang. Kecamatan Tembalang dalam konstelasi regional merupakan salah satu kawasan pemekaran kota dengan kondisi topografi perbukitan guna meringankan tekanan penduduk di pusat Kota Semarang. Lokasi perumahan bertipe mengelompok dan tidak teratur. Tipe mengelompok terdapat di

perumahan baru yang dibangun *developer*, misalnya Sendangmulyo dan Bukit Kencana Jaya. Sedangkan tipe perumahan yang tidak teratur terdapat di permukiman penduduk lokal/tradisional (Meteseh dan Mangunharjo). Pengaturan pemanfaatan ruang yang berkaitan dengan orientasi dan peletakan masa bangunan perumahan untuk mencapai kepadatan yang sesuai arahan RTRW (kepadatan rendah – sedang) dilakukan dengan memberikan batasan mengenai KDB/KLB yang ditetapkan (Untuk perumahan skala besar/real estate).

- c. *Kawasan Rekreasi* : kawasan rekreasi di Kelurahan Rowosari berupa danau buatan dengan memanfaatkan daerah genangan. Skala pelayanan rekreasi ini adalah skala kota.
- d. *Kawasan Campuran* : terletak disepanjang jalur utama (Jalan Mrican/sekitar Kampus Undip), di Kelurahan Kedungmundu, Sendangguwo, Sendangmulyo, Mangunharjo, Bulusan, Tandang dan Sambiroto. Kawasan campuran terdiri dari kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa.
- e. *Kawasan Perdagangan dan Jasa* : berdasarkan kecenderungan yang ada sekarang dan prediksi perkembangan ruang akibat pertumbuhan aktivitas dan rencana sistem jaringan jalan, kegiatan perdagangan dan jasa di BWK VI dialokasikan di sekitar Kelurahan Tembalang, Kedungmundu, Sendangguwo, Sendangmulyo dan di Perumahan Bukit Kencana Jaya. Kebutuhan ruang untuk mewadahi aktivitas perdagangan dan jasa ini terutama untuk memenuhi permintaan akibat adanya kawasan pendidikan di Kelurahan Tembalang, dan karena adanya permintaan kebutuhan sehari-hari penduduk. Pola ini membawa pada satu pemikiran bahwa kegiatan perdagangan dan jasa yang ada di Kecamatan Tembalang berskala lokal.
- f. *Kawasan Konservasi* : Kawasan konservasi terletak di Kelurahan Bulusan, Meteseh, Mangunharjo dan Sambiroto. Kawasan konservasi terutama dialokasikan di lokasi-lokasi yang memiliki tingkat keterenggan > 40%.

7. Bagian Wilayah Kota VII

Sesuai dengan arahan di RTRW, BWK VII mempunyai fungsi sekunder (skala kota) untuk kegiatan permukiman (kepadatan sedang-rendah), transportasi dan rekreasi. Sedangkan kegiatan pendukung fungsi sekunder meliputi kegiatan pendidikan campuran dan kegiatan perdagangan dan jasa. Selain itu BWK VII juga

mempunyai fungsi khusus, yaitu sebagai kawasan khusus militer. Adapun arahan lokasi untuk masing-masing kegiatan tersebut adalah:

- a. *Kawasan Permukiman* : dialokasikan disemua kelurahan dengan kepadatan rendah-sedang untuk menampung limbah penduduk dari pusat Kota Semarang. Timbulnya permukiman baru yang dibangun oleh *developer* seperti Villa Aster, Spondol Bumi Indah, Perumahan Setiabudi dan Graha Estetika adalah indikasi fungsi utama kawasan ini dan merupakan kecenderungan perkembangan kawasan untuk fungsi permukiman. Disamping itu perkembangan perumahan Banyumanik merupakan potensi lokasi perumahan yang akan menjadi pusat perkembangan aktivitas lainnya yang ada di Kecamatan Banyumanik. Perkembangan fungsi permukiman yang dibangun oleh *developer* lebih dapat dikontrol dengan mekanisme peraturan yang berlaku (penetapan KDB/KLB) daripada pengaturan rumah-rumah tradisional penduduk lokal yang cenderung tidak teratur baik mengenai luasan persil, orientasi dan peletakan masa bangunan.
- b. *Kawasan Transportasi* : Kawasan transportasi terutama disebabkan karena adanya jalan-jalan regional yang melewati kawasan Banyumanik, seperti Jalan Tol Jatingaleh-Spondol. Disamping itu kawasan Banyumanik adalah *entrance point* (pintu gerbang) Kota Semarang dari arah selatan. Keberadaan tersebut dari aspek transportasi perlu direspon dengan penyediaan sarana prasarana transportasi yang cukup. Disamping itu pengaturan tata guna lahan di sekitar jalan-jalan utama dari aspek estetika perlu diperhatikan karena akan terkait dengan image Kota Semarang.
- c. *Kawasan Rekreasi* : Kawasan rekreasi berupa Taman Tabanas dan sekitarnya (panorama Kota Semarang dari atas). Skala pelayanan rekreasi ini adalah skala kota.
- d. *Kawasan Pendidikan* : di Kelurahan Pedalangan (Akper), terutama untuk mengimbangi perkembangan Kampus Undip di Kelurahan Tembalang.
- e. *Kawasan Campuran*: meliputi kegiatan permukiman, perkantoran, perdagangan dan jasa terletak di Kelurahan Tinjomoyo, Ngesrep, Spondol Kulon, Spondol Wetan, Sumurboto, Banyumanik dan Pudak Payung.
- f. *Kawasan Perdagangan dan Jasa* : berdasarkan kecenderungan yang ada sekarang dan prediksi perkembangan ruang akibat pertumbuhan aktivitas dan rencana system jaringan jalan, kegiatan perdagangan dan jasa di BWK VII

dilokasikan di Kelurahan Tinjomoyo, Ngesrep, Srandol Wetan, dan Banyumanik.

- g. *Kawasan Khusus Militer*: terletak di Kelurahan Srandol Kulon dan Pudak Payung.

8. Bagian Wilayah Kota VIII

Sesuai dengan arahan di RTRW bahwa fungsi primer BWK VIII ditetapkan untuk kegiatan pertanian dan konservasi serta pendidikan. Sedangkan kegiatan pendukung fungsi primer tersebut adalah kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, campuran, dan pariwisata. Adapun kebijaksanaan pengembangan wilayah BWK VIII adalah:

- a. *Kawasan Permukiman* : Kawasan permukiman pedesaan dialokasikan di seluruh wilayah lingkungan pedesaan, sedangkan kawasan permukiman perkotaan dialokasikan disekitar pusat BWK VIII Kelurahan Gunungpati dan di Kelurahan Sekaran.
- b. *Kawasan Perdagangan dan Jasa* : berdasarkan kecenderungan yang ada sekarang dan prediksi perkembangan ruang akibat pertumbuhan aktivitas an rencana jaringan jalan, kegiatan perdagangan dan jasa di BWK VIII dialokasikan di Kelurahan Gunungpati dan Sekaran.
- c. *Kawasan Campuran Permukiman, Perdagangan dan Jasa* : diarahkan disepanjang jalan Gunungpati-Ungaran (di Kelurahan Gunungpati, Plalangan, dan Sumurrejo), dan disekitar jalan Gunungpati-Manyaran di Kelurahan Gunungpati dan Cepoko.
- d. *Kawasan Pendidikan* : dialokasikan di Kelurahan Sekaran dan Nongkosawit
- e. *Kawasan Pertanian*: direncanakan diseluruh BWK VIII. Di bagian tengah dan selatan untuk pertanian lahan basah, dan dibagian utara untuk pertanian lahan kering.
- f. *Kawasan Rekreasi*: kegiatan rekreasi di BWK VIII berupa kawasan rekreasi waduk dan Gua Kreo di Kelurahan Kandri.
- g. *Kawasan Konservasi*: diseluruh wilayah yang memiliki syarat sebagai kawasan konservasi, yaitu disekitar sungai, waduk, mata air dan lahan dengan kelerengan lebih dari 40%.

9. Bagian Wilayah Kota IX

Pemanfaatan ruang BWK IX direncanakan dengan mempertimbangkan:

- a. BWK IX Mijen merupakan wilayah cadangan pengembangan kota yang berperan sebagai pusat pelayanan dengan skala regional.
- b. BWK IX Mijen termasuk dalam kategori wilayah perbukitan yang akan diarahkan pengembangannya sesuai dengan potensi-potensi sumber daya alamnya yaitu untuk pengembangan pertanian dan konservasi, dan pemukiman.
- c. Fungsi dari BWK IX yaitu pengembangan permukiman kepadatan rendah, industri yang bertumpu sumber daya alam, agro bisnis, agrowisata dan perlindungan lingkungan

Adapun rencana pemanfaatan ruang wilayah BWK IX, yaitu:

- a. *Kawasan Permukiman*: Kawasan permukiman pedesaan dialokasikan diseluruh wilayah lingkungan pedesaan, sedangkan kawasan permukiman perkotaan dialokasikan disekitar pusat BWK IX Mijen dan di Kelurahan Pesantren, Jatibarang dan Kedungpane.
- b. *Kawasan Perdagangan dan Jasa*: berdasarkan kecenderungan yang ada sekarang dan prediksi perkembangan ruang akibat pertumbuhan aktivitas dan rencana sistem jaringan jalan, kegiatan perdagangan dan jasa di BWK IX dialokasikan di Kelurahan Wonopolo, Pesantren dan Jatibarang.
- c. *Kawasan Campuran Permukiman* : perdagangan dan jasa diarahkan disepanjang jalan Mijen-Boja (di Kelurahan Cangkiran, Jatisari, Mijen, dan Wonopolo) dan sekitar Kelurahan Polaman.
- d. *Kawasan Pendidikan*: dialokasikan di Kelurahan Jatibarang.
- e. *Kawasan Industri*: dialokasikan di sekitar jalan arteri primer di Kelurahan Jatibarang dan Mijen berupa industri bebas polusi (*techno park*).
- f. *Kawasan Pertanian*: direncanakan di bagian utara wilayah BWK IX di Kelurahan Cangkiran, Bubakan, Polaman, Purwosari, Tambangan, dan Karangmalang.
- g. *Kawasan Rekreasi*: kegiatan rekreasi di BWK IX berupa kawasan rekreasi/agrowisata Sodong di Kelurahan Purwosari.
- h. *Kawasan Konservasi*: diarahkan di seluruh wilayah yang memiliki syarat sebagai kawasan konservasi, yaitu di sekitar sungai, waduk dan lahan dengan kelerengan lebih dari 40%.

10. Bagian Wilayah Kota X

Sesuai dengan arahan di RTRW bahwa fungsi primer BWK X ditetapkan untuk kegiatan industri, sedangkan kegiatan pendukung fungsi primer tersebut adalah kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, campuran, pertanian, rekreasi, perikanan dan olah raga. Adapun arahan lokasi untuk masing-masing kegiatan tersebut adalah:

- a. *Kawasan Industri* : dialokasikan disebelah utara jalan kereta api dan sebelah selatan Jalan Siliwangi.
- b. *Lokasi industri* yang terletak di sebelah Utara jalan kereta api terdapat di Kelurahan Mangkang Wetan, Randusari, Karanganyar dan Tugurejo. Sedangkan yang terdapat di sebelah Selatan Jalan Siliwangi terdapat di Kelurahan Podorejo, Rowosari, Tambakaji dan Purwoyoso.
- c. *Kawasan Permukiman*: dialokasikan sebagian besar terdapat di Kecamatan Ngaliyan. Kawasan akan dikembangkan sebagai kegiatan perumahan/permukiman terdapat di Kelurahan Ngaliyan, Tambak aji, Bringin, Gondoriyo, Podorejo dan Kelurahan Tugurejo.
- d. *Kawasan Perdagangan dan Jasa*: berdasarkan kecenderungan yang ada sekarang dan prediksi perkembangan ruang akibat pertumbuhan aktivitas dan rencana sistem jaringan jalan, kegiatan perdagangan dan jasa di BWK X dilokasikan di Mangkang, Tambakaji dan Jrasah khususnya di sepanjang Jalan Siliwangi.
- e. *Kawasan Campuran Permukiman, Perdagangan dan Jasa*: diarahkan di sepanjang Jalan Siliwangi (terutama di Kelurahan Mangkang Kulon, Wonosari), Ngaliyan-Boja, Jalan Gatot Subroto dan disepanjang rencana jalan lingkar luar (*outer ring road*). Untuk kawasan campuran permukiman dan industri diarahkan di Kelurahan Karanganyar dan Tugurejo.
- f. *Kawasan Pendidikan*: diarahkan di Kelurahan Tambak aji terutama di dekat pertigaan Jrasah.
- g. *Kawasan Pertanian*: direncanakan di kawasan Utara Kelurahan Mangkang Kulon dan Mangunharjo.
- h. *Kawasan Rekreasi*: kegiatan rekreasi di BWK X berupa kawasan rekreasi pantai, kawasan ini terdapat di bagian Utara Kecamatan Tugu.
- i. *Kawasan Perikanan*: kegiatan perikanan yang dikembangkan di BWK X adalah perikanan tambak. Lahan untuk kegiatan ini dialokasikan dibagian Utara Kelurahan Mangkang Kulon dan Mangunharjo.

- j. *Kawasan Olah Raga*: dialokasikan di Kecamatan Bampakerep terutama di dekat perbatasan dengan Kecamatan Mijen.

II.2 PEREKONOMIAN DAERAH

II.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi disamping dapat berdampak pada peningkatan pendapatan, pada akhirnya juga akan berpengaruh pada pendapatan daerah. Semakin mampu menggali potensi perekonomian daerah yang dimiliki akan semakin besar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga mampu meningkatkan keuangan daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Perkembangan pertumbuhan ekonomi kota Semarang per tahun dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel II.2
Rata-rata pertumbuhan Ekonomi per tahun 1999 – 2004

No	Tahun	Rata-rata Pertumbuhan ekonomi Pertahun (%)
1	1999	- 18,22
2	2000	3,40
3	2001	4,97
4	2002	5,11
5	2003	4,10
6	2004	5,72

Sumber : Semarang dalam angka 2004

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sejak terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 sampai dengan 1999 laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan tajam hingga minus 18,22 %. Sejak tahun 2000 pertumbuhan ekonomi merangkak naik ke angka pertumbuhan yang positif hingga mencapai angka pertumbuhan 5,72 % pada tahun 2004. Selama kurun waktu lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,44 % pertahun. Dengan demikian pada akhir tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kota Semarang mencapai angka kurang lebih 7,5 %. Pertumbuhan ekonomi ini dapat tercapai jika asumsi kondisi keamanan dan ketertiban dapat terjaga secara kondusif, terjadinya peningkatan jumlah investasi 10 %, terkendalinya jumlah inflasi dan peningkatan jumlah ekspor non migas.

II.2.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi berdasarkan harga konstan 1993, tahun 2000 sebesar 4,97 % , tahun 2001 sebesar 5,11 % , tahun 2002 sebesar 4,10 % , pada tahun 2003 naik menjadi 5,06 % dan pada tahun 2004 menjadi 5,72 % . Pertumbuhan ekonomi tersebut walaupun belum dapat menyamai pertumbuhan ekonomi sebelum terjadinya krisis ekonomi yakni sebesar 18.7 % namun, tetapi menunjukkan pertumbuhan yang positif.

Lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB tahun 2003 atas dasar harga berlaku adalah Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran sebesar Rp. 7.497.423 juta (39,15%), dan seterusnya adalah Sektor Industri sebesar Rp. 5.552.262 juta (28,99%), pertanian adalah sektor Rp. sebesar 2.451.939 juta (12,80%), sektor angkutan dan komunikasi sebesar Rp. 1.234.478 juta (6,45%), sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar Rp. 1.081.454 juta (5,65%), Sektor bangunan 734.821 (3,84%), sektor listrik, gas, dan air sebesar Rp. 346.724 juta (1,81%), sektor pertanian sebesar Rp. 187.823 juta (0,98%), sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp. 64.783 juta (0,34%).

Kontribusi sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang sangat besar didorong oleh adanya pusat pelayanan perekonomian yang berskala regional maupun nasional. Sementara, sektor industri pengolahan, baik industri besar maupun industri sedang yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kota Semarang, dapat dijumpai persebarannya antara lain di Kecamatan Genuk dan Ngaliyan, dan sebagian kecil terletak di Kecamatan Tugu dan Semarang Barat; sedangkan persebaran industri sedang sebagian besar terletak di Kecamatan Genuk dan Semarang Barat dan sebagian kecil terletak di Kecamatan Semarang Tengah dan Semarang Utara.

Perhitungan sektor ekonomi basis dilakukan dengan penghitungan nilai LQ Kota Semarang. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Berdasarkan perhitungan LQ, dapat diketahui bahwa Kota Semarang mempunyai sektor basis sebagai berikut:

1. Sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan merupakan sektor basis pada wilayah Kota Semarang. Hal ini didorong oleh banyaknya pelayanan keuangan dan jasa yang ada, serta kedudukan Kota Semarang sebagai pusat pelayanan kegiatan sosial perekonomian dalam kawasan Kedungsepur pada khususnya dan wilayah Provinsi Jawa Tengah pada umumnya.

Tabel II.3
Nilai LQ untuk Ekonomi Basis Berdasarkan Nilai PDRB
Atas Dasar Harga Konstan di Kota Semarang

Lapangan Usaha	1999	2000	2001	2002	2003
Pertanian	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04
Pertambangan dan Penggalian	0,20	0,19	0,18	0,18	0,16
Industri Pengolahan	1,21	1,15	1,12	1,09	1,01
Listrik, Gas, dan Air Bersih	1,49	1,34	1,28	1,23	1,23
Bangunan	0,81	0,99	0,98	0,92	0,89
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	1,77	1,69	1,60	1,54	1,46
Pengangkutan dan Komunikasi	1,58	1,57	1,51	1,42	1,36
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perush.	1,89	1,88	1,82	1,73	1,68
Jasa	1,53	1,47	1,47	1,40	1,38

Sumber: Kota Semarang dalam Angka

2. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran juga merupakan sektor basis. Hal ini didukung oleh kedudukan Kota Semarang sebagai pusat pelayanan di kawasan Kedungsepur dan Provinsi Jawa Tengah sehingga terdapat banyak fasilitas perdagangan dan jasa yang berskala luas di wilayah ini dan mampu melayani wilayah di sekitarnya.
3. Sektor jasa merupakan sektor basis yang menunjukkan bahwa perkembangan perkotaan sudah mengarah ke arah sektor ekonomi tersier.
4. Sektor pengangkutan dan komunikasi merupakan sektor basis selanjutnya. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya pusat-pusat pelayanan komunikasi dan transportasi baik darat, laut, maupun udara di Kota Semarang. Selain itu, kedudukan Kota Semarang yang merupakan kota transit yang dilalui oleh jalur utama pergerakan Jakarta-Surabaya turut mendorong pesatnya perkembangan sektor pengangkutan di wilayah ini.
5. Sektor basis selanjutnya adalah sektor listrik, gas, dan air bersih yang menunjukkan bahwa Kota Semarang telah menjadi pusat bagi pelayanan kebutuhan listrik, gas, dan air bersih bagi wilayah sekitarnya, terutama wilayah Kedungsapur.

6. Sektor basis terakhir adalah industri pengolahan. Hal ini sangat terkait dengan banyaknya kawasan industri yang terdistribusi di wilayah Kota Semarang.

Peningkatan laju pertumbuhan PDRB selama lima tahun mengalami peningkatan rata-rata 8,20 % per tahun. Peningkatan ini juga diikuti dengan kenaikan pendapatan perkapita dimana perkembangan pendapatan perkapita dari tahun 2000 sampai dengan 2004 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pada Tahun 2000 pendapatan perkapita masyarakat sebesar Rp. 3.195.051,- atau mengalami pertumbuhan 3,35 %, tahun 2001 sebesar Rp. 3.297.098,- atau mengalami pertumbuhan 3,19 %, tahun 2002 sebesar Rp. 3.399.781,- atau meningkat sebesar 3,11%, tahun 2003 sebesar Rp. 3.465.463 atau 1,93 % dan pada tahun 2004 sebesar Rp. 3.602.362,- atau 3,95 %.

Pendapatan perkapita atas dasar berlaku dari tahun ke tahun juga menunjukkan peningkatan, bila pada tahun 1999 adalah Rp. 8.734.259,45 dan pada tahun 2003 mencapai Rp. 14.016.235,34 berarti terjadi peningkatan sebesar 1,60 persen selama 5 tahun. Jika dilihat berdasarkan harga konstan 1993, pertumbuhan pendapatan perkapita dalam periode 1999 – 2003 juga mengalami peningkatan sebesar 1,13 %. Selengkapnya rata-rata Produk domestik regional Bruto perkapita penduduk tahun 1999 – 2003 adalah sebagai berikut :

Tabel II.4
Rata-rata Produk domestik regional Bruto perkapita penduduk
Tahun 1999 – 2003

Tahun	Pendapatan Perkapita (Rp)		Pertumbuhan (%)	
	Harga Berlaku	Harga Konstan 1993	Harga Berlaku	Harga Konstan 1993
1999	8.734.259,45	3.824.156,71	16,76	2,19
2000	9.923.098,00	3.959.928,10	13,61	3,55
2001	11.419.483,45	4.088.522,53	15,08	3,25
2002	12.885.457,96	4.215.832,47	12,84	3,11
2003	14.016.235,34	4.308.516,94	8,78	2,20

Sumber : Semarang Dalam Angka Diolah

Kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap pertumbuhan ekonomi yang selama lima tahun terakhir terbesar adalah Perdagangan dan Hotel sebesar 35,45 % kemudian diikuti industri pengolahan 31,69 %, jasa-jasa 13,12 %, pengangkutan dan komunikasi 7,34 %, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan

6,37 %, bangunan 3,60 %, listrik, gas dan air bersih 1,50 %, pertanian 0,67 % dan pertambangan dan penggalian 0,26 %.

Pertumbuhan sektor usaha perdagangan yang cukup tinggi didukung dengan adanya nilai ekspor non migas yang mengalami peningkatan cukup tajam. Data ekspor non migas selama tiga terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Nilai Ekspor Non Migas Menurut Jenis Komoditas di Kota Semarang
Tahun 2002 -2004 dalam (US \$ 000)

No	Jenis Komoditi	2002	2003	2004
1	Perkebunan	5.902,29	7.955,55	8.857,87
2	Kehutanan	6.253,68	13.246,26	14.655,22
3	Pertanian	1.075,71	2.059,94	1.495,89
4	Perikanan	1.584,25	2.716,94	1.041,86
5	Peternakan	977,86	1.346,38	1.251,27
6	Rempah-rempah	271,11	407,58	400,14
7	Makanan	1.357,54	3.725,53	2.166,53
8	Kerajinan	320,51	485,37	1.309,98
9	Perindustrian	271.445,78	369.693,39	389.769,55
	J U M L A H	289.188,72	401.636,94	420.948,26

Sumber : Semarang dalam angka 2004

II.2.3. Inflasi

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat mengakibatkan tingkat konsumsi meningkat sehingga mendorong terjadinya laju inflasi yang cukup besar, pada tahun 2000 laju inflasi sebesar 8,73 %, tahun 2001 naik menjadi 13,98 %, tahun 2002 turun menjadi 13,56 persen, pada tahun 2003 turun menjadi 6,07 % dan pada tahun 2004 sebesar 5,98 %.

Laju inflasi tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 menunjukkan kecenderungan menurun. Penurunan inflasi ini terjadi disebabkan oleh deflasi kelompok bahan makanan yang mencapai minus 1,25 %, sedangkan kelompok pengeluaran konsumsi yang lainnya mengalami kenaikan.

Laju inflasi untuk masing-masing kelompok pengeluaran konsumsi tahun 2003 adalah kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 21,63 %, Kelompok perumahan sebesar 11,07 %, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 5,35 %, kelompok sandang sebesar 2,38 %, kelompok transport dan komunikasi

sebesar 1,58 % dan kelompok kesehatan sebesar 1,56 %. Untuk kelompok bahan makanan mengalami deflasi sebesar minus 1,25 %.

II.2.4. Pendapatan Daerah

Bergulirnya otonomi daerah membawa konsekuensi perubahan manajemen keuangan daerah. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan harapan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien dan efektif.

Selama kurun waktu lima tahun, perhitungan anggaran pendapatan Pemerintah Kota Semarang selalu memenuhi target kecuali tahun 2000 karena adanya transisi waktu perubahan dimulainya tahun anggaran. Tahun 2000 mencapai realisasi sebesar 98,8 % dari target yang ditetapkan, tahun 2001 mencapai 109,9 %, tahun 2002 mencapai 109,2 %, tahun 2003 mencapai 107,1 %, dan sampai dengan tahun 2004 sudah mencapai 153,1 % dari target. Adapun pertumbuhan realisasinya selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan rata-rata sebesar 46,66 %. Pada tahun 2001 mengalami kenaikan sebesar 101,22 %, tahun 2002 naik sebesar 13,84 % dan tahun 2003 naik sebesar 24,92 %. Selama lima tahun terakhir Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan rata-rata sebesar 45,19 %, Adapun rincian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan rata-rata sebesar 41,15%. Adapun penerimaan pajak daerah yang menonjol antara lain adalah Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir. Penerimaan retribusi daerah mengalami kenaikan rata-rata sebesar 44,08%. Adapun penerimaan retribusi daerah yang menonjol antara lain adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Penggantian Cetak Peta, Retribusi IMB, Retribusi Ijin Gangguan HO dan Retribusi Trayek. Sedangkan penerimaan laba BUMD sebelum adanya deviden BPD Jateng sebesar ± Rp. 307 juta atau 0,02 % dari total PAD mengalami kenaikan rata-rata sebesar 85,97 %. Kenaikan yang cukup fantastis ini disebabkan adanya setoran deviden dari Bank Jateng (BPD Jateng), Penerimaan lain-lain PAD yang sah mengalami kenaikan rata-rata sebesar 84,06 %. Penerimaan yang berasal dari dana perimbangan, selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar 43,93 %. Rincian penerimaan dana perimbangan terdiri dari Pos Bagi Hasil Pajak mengalami kenaikan rata-rata sebesar 66,02 %. Pos Bagi Hasil Bukan Pajak mengalami kenaikan rata-rata sebesar 13,15 %. Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami kenaikan rata-rata sebesar 68,81 %. Sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2001

mengalami penurunan DAK sebesar 92,18%, tahun 2002 dan tahun 2003 Pemerintah Kota tidak mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Walaupun kota Semarang selama lima tahun terakhir dapat meningkatkan pendapatan asli daerah rata-rata 45,19 %, namun faktor ketergantungan dengan pemerintah pusat maupun Pemerintah Propinsi masih cukup besar sekitar 72,47 %. Penyebab dari ketergantungan yang begitu besar adalah keterbatasan sumberdaya alam, jumlah aparatur yang begitu besar dan belum berkembangnya potensi perekonomian daerah. Jumlah aparatur yang besar menyebabkan belanja aparatur setiap tahun mencapai kurang lebih 58,75 %, dimana belanja tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Data penerimaan keuangan daerah dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel II.6
Penerimaan Keuangan Daerah Kota Semarang
Tahun 2001 – 2004 Kota Semarang (Rp. 000.000,-)

No	Jenis Penerimaan	Tahun 2001	Tahun 2002	Tahun 2003	Tahun 2004
1.	PAD	85.508	122.591	143.156	147.298
	- Sisa lebih tahun lalu	-	-	-	-
	- Pajak	49.079	66.500	82.476	86.530
	- Retribusi	28.415	33.507	41.618	46.779
	- Laba	181	296	270	358
	- Lain-lain	7.833	19.288	18.792	13.632
2.	Dana Perimbangan	313.864	353.164	424.591	457.521
	- Bagi Hasil Pajak	54.886	108.070	144.940	138.500
	- Bagi Hasil Non Pajak	1.479	1.649	2.164	822
	- Dana Alokasi Umum	254.262	266.950	311.099	313.199
	- Dana Alokasi Khusus	3.237	-	-	5.000
3.	Lain-2 Pendapatan sah	21.256	11.444	36.640	24.207
	Total	420.644	510.703	638.000	629.026
	Prosentase / Tahun		21,41 %	24,93 %	-1.41 %
	Peningkatan rata-rata		14,98 %		

II.2.5. Belanja Daerah

Sejalan dengan meningkatnya tuntutan kebutuhan belanja daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan. Kenaikan perhitungan belanja rata-rata setiap tahunnya sebesar 50,29 %, Anggaran belanja sebelum perubahan sistem anggaran (Tahun 2000 – 2001) terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan. Pada tahun 2000 prosentase Perhitungan Belanja Rutin terhadap anggaran adalah sebesar 88,3 %, dan tahun 2001 sebesar 70,9 %. Sedangkan kenaikan perhitungan belanja rutin pada tahun 2001 adalah sebesar 135,76 %. Prosentase perhitungan belanja pembangunan terhadap anggaran pada tahun 2000 adalah sebesar 78,11 %, tahun 2001 sebesar 27,68 %. Sedangkan kenaikan Perhitungan Belanja Pembangunan pada tahun 2001 adalah sebesar 30,16 %.

Sedangkan rincian perhitungan anggaran belanja setelah perubahan sistem (Tahun 2002 – 2004) terdiri dari Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan Publik. Pada tahun 2002 prosentase Perhitungan Belanja Aparatur Daerah terhadap anggaran adalah sebesar 98,43 %, tahun 2003 sebesar 96,17 % dan sampai dengan tahun 2004 mencapai 66,94 % dari target satu tahun. Sedangkan prosentase Perhitungan Belanja Pelayanan Publik terhadap anggaran pada tahun 2002 adalah sebesar 98,80 %, tahun 2003 sebesar 82,92 %.

II.2.6. Investasi

Nilai investasi PMA (Penanaman Modal Asing) pada Tahun 2001 dibandingkan Tahun 2003 mengalami kenaikan dari Rp. 7.943.000.000 menjadi Rp. 345.695.529.000. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) juga mengalami kenaikan dari Rp 28.175.000.000,- pada Tahun 2001 menjadi Rp 91.884.350.000,- pada Tahun 2003. Sedangkan dari daya serap tenaga kerja untuk PMA naik dari 987 orang menjadi 2.882 pada tahun 2003. Daya serap tenaga untuk PMDN meningkat dari 428 orang tahun 2001 menjadi 2.887 orang pada tahun 2003. Kenaikan investasi ini tidak lepas dari kondusifnya iklim investasi, sebagai ibu kota propinsi Jawa Tengah, letak strategis pada perlintasan Jalur Jalan Utara Pulau Jawa yang menghubungkan Kota Jakarta - Surabaya, dan sarana prasarana. Selengkapnya perkembangan jumlah dan nilai investasi dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel II.7
Perkembangan Jumlah dan Nilai Investasi

Tahun	Jumlah		Nilai Investasi		Tenaga Kerja	
	PMA	PMDN	PMA	PMDN	PMA	PMDN
2001	6	2	7.943.000.000	28.175.000.000	987	428
2002	9	4	4.895.000.000	11.826.961.000	1.498	3.314
2003	27	7	345.695.529.000	91.884.350.000	2.882	2.887

Sumber : Semarang Dalam Angka diolah

II.2.7. Pinjaman Daerah

Dalam melaksanakan pembangunan dibutuhkan sumberdaya yang cukup tinggi, terutama sumber pembiayaan, sementara pembiayaan yang tersedia baik yang berasal dari PAD, dana perimbangan dan sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah belum mencukupi.

Kekurangan pembiayaan pembangunan tersebut dapat diperoleh melalui berbagai cara, salah satu alternatif yang dilaksanakan adalah dengan melakukan pinjaman dari pihak ke tiga atau lembaga-lembaga keuangan.

Posisi pinjaman daerah sampai dengan tahun 2005 secara rinci sebagai berikut :

Tabel II.8
Posisi Pinjaman Daerah per 31 Juli 2005

No	Uraian	Tahun Anggaran	Masa Pinjaman	Pagu Pinjaman	Saldo Kewajiban	Ket
1	Pinjaman Urban V Pandanaran, IBRD-RDI2408	1989/1990	20 Tahun	10,425,642,681	17,667,595,669	Bank Dunia
2	Pinjaman Urban Transport IBRD-RDI-2817	1993/1994	20 Tahun	8,301,905,454	19,478,724,794	Bank Dunia
3	Pinjaman SSUDP/P3KT	1994/1995	20 Tahun	27,181,765,895	28,262,645,679	Bank Dunia
4	Pembelian Gedung Dinas	2003	3 tahun	21.000,000,000	9,306,708,074	Bank BPD
5	Pengadaan Truck Kontainer sampah	2005	2 Tahun	4,074,000,000	3,293,150,000	PT. New Ratna Motor
	JUMLAH			70,983,318,030	78,008,824,216	

Sumber : DPKD Kota Semarang

II.3 SOSIAL BUDAYA DAERAH

II.3.1. Jumlah, Perkembangan, dan Kepadatan Penduduk

Perkembangan jumlah penduduk dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,52 %, pada tahun 2000 jumlah penduduk sebesar 1.309.667 jiwa, tahun 2001 jumlah penduduk sebesar 1.322.320 jiwa, tahun 2002 sebesar 1.350.005 jiwa, tahun 2003 sebesar 1.378.261 jiwa dan pada tahun 2004 sebesar 1.399.133 jiwa. Kenaikan pertumbuhan penduduk ini disamping karena tingkat kelahiran, juga disebabkan oleh migrasi dari daerah *hinterland* sebagai konsekuensi kota metropolitan. Tingkat kelahiran dalam lima tahun terakhir mengalami kenaikan rata-rata pertahun sebesar 2,33 %, pada tahun 2000 sebesar 16.133, tahun 2001 sebesar 15.770 jiwa, tahun 2002 sebesar 16.315 jiwa, tahun 2003 17.162 jiwa dan pada tahun 2004 sebesar 17.562 Jiwa.

Tabel II.9
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Semarang

No	Kecamatan	2001		2002		2003		2004	
		Jml Pendd.	Kpdtn	Jml Pendd.	Kpdtn	Jml Pendd.	Kpdtn	Jml Pendd.	Kpdtn
1	Mijen	37.927	659	38.843	675	40.685	707	41.675	724
2	Gunungpati	57.485	1.092	58.130	1.105	59.042	1.122	60.208	1.143
3	Banyumanik	104.578	3.771	106.834	3.853	111.527	4.022	113.651	4.098
4	Gajahmungkur	57.550	5.339	58.482	5.425	59.220	5.494	59.831	5.550
5	Semarang Sltm	78.036	13.182	84.103	14.207	84.878	14.338	85.178	14.388
6	Candisari	773719	11.429	78.336	11.520	80.129	11.784	80.855	11.890
7	Tembalang	103.343	2.338	106.090	2.400	110.848	2.508	113.300	2.563
8	Pedurungan	137.784	6.650	141.695	6.839	145.001	6.998	148.555	7.170
9	Genuk	62.996	2.300	63.904	2.333	67.442	2.462	69.323	2.531
10	Gayamsari	63.142	12.004	64.104	12.187	65.310	12.416	66.416	12.627
11	Semarang Timur	81.816	11.491	84.044	11.804	83.897	11.783	83.759	11.764
12	Semarang Utara	122.736	11.188	122.929	11.206	123.353	11.245	124.273	11.328
13	Semarang Tgh	77.210	15.021	76.810	14.944	76.424	14.868	76.156	14.816
14	Semarang Barat	146.651	7.347	148.753	7.453	150.496	7.540	152.957	7.663
15	Tugu	24.145	822	24.400	830	24.668	840	25.189	857
16	Ngalian	89.202	2.232	92.548	2.315	95.341	2.385	97.807	2.447

No	Kecamatan	2001		2002		2003		2004	
		Jml Pendd.	Kpdtm	Jml Pendd.	Kpdtm	Jml Pendd.	Kpdtm	Jml Pendd.	Kpdtm
	Jumlah	1.322.320	3.559	1.350.005	3.634	1.378.261	3.710	1.399.333	3.744

Sumber : Semarang Dalam Angka

Dari data tersebut di atas persebaran penduduk tidak merata, kepadatan penduduk tertinggi berada di pusat-pusat kota yang meliputi Kecamatan Semarang Tengah, Semarang Selatan, Gayamsari, Candisari, Semarang Timur, dan Semarang Utara. Sedangkan wilayah Kecamatan Mijen dan Kecamatan Tugu mempunyai jumlah penduduk terkecil, dengan kepadatan penduduk dibawah 1000 orang tiap km². Kecamatan yang terpadat penduduknya adalah Kecamatan Semarang Tengah dengan tingkat kepadatan sebesar 14.868 tiap km².

Berdasarkan perhitungan IPM oleh BPS tahun 2002, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat 73,6. Dengan angka tersebut Kota Semarang menduduki urutan ke 14 dari 341 kota di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk tingkat Jawa Tengah menduduki urutan pertama. Kondisi tersebut merupakan salah satu indikator terhadap kualitas pembangunan manusia di Kota Semarang.

II.3.2. Pendidikan

Pembangunan Pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu menghadapi setiap perubahan dan diharapkan dapat membentuk manusia seutuhnya yaitu beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, sehat jasmani dan rohani, mandiri, bertanggungjawab dan memiliki etos kerja yang tinggi. Sasarannya adalah terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua masyarakat, tercapainya efektif dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, serta tercukupinya sarana dan prasarana pendidikan. Beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan pendidikan dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan angka putus sekolah. Selama lima tahun terakhir Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Putus Sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel II.10
APK masing-masing Jenjang Pendidikan di Kota Semarang
Tahun 2000 – 2004 (%)

Pendidikan	Tahun 2000		Tahun 2001		Tahun 2002		Tahun 2003		Tahun 2004	
	APK	APM	APK	APM	APK	APM	APK	APM	APK	APM
SD/MI	105,44	82,24	102,85	85,86	101,98	83,05	103,22	82,5	100,87	81,81
SMP/MTs	96,32	73,76	91,48	68,27	93,64	66,72	94,49	69,45	92,34	67,87
SMU/SMK/MA	120,08	70,54	86,5	62,1	92,48	61,43	83,42	59,57	83,42	59,57

Sumber : Dinas Pendidikan

Tabel II.11
Angka Putus Sekolah Tahun 2000 – 2004

	Prosentase Angka Putus Sekolah		
	SD/MI	SLTP/MTs	SMU/SMK/MA
Tahun 2000	0,07	0,39	0,74
Tahun 2001	0,07	0,39	0,74
Tahun 2002	0,07	0,42	0,45
Tahun 2003	0,06	0,46	0,75
Tahun 2004	0,10	0,48	0,78

II.3.3. Kesehatan

Derajat Kesehatan masyarakat selama lima tahun terakhir menunjukkan perubahan yang positif, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator keberhasilan bidang kesehatan. Perubahan derajat kesehatan masyarakat antara lain didukung oleh tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta variabel primer lainnya seperti ketersediaan tenaga medis dan paramedis, manajemen, kualitas pelayanan, dan kesadaran masyarakat serta aspek lain yang bersifat sebagai penunjang terhadap kesehatan.

Angka Harapan Hidup Kota Semarang di atas angka harapan hidup tingkat Nasional sebesar 65 tahun. Pada tahun 2001 Angka Harapan Hidupnya mencapai 69 tahun, pada tahun 2002 naik menjadi 70 tahun, pada tahun 2003 turun menjadi 69,9 tahun dan pada tahun 2004 kembali menjadi 70 tahun. Dalam periode yang sama angka kematian bayi mengalami penurunan rata-rata sebesar 1,75 persen setiap tahun. Indikator lainnya adalah jumlah kasus gizi buruk, pada tahun 2001 turun sebanyak 40 kasus, dan pada tahun 2002 sampai dengan 2004 tetap tidak mengalami perubahan yakni 40 kasus.

Tabel II.12
Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi dan Gizi Buruk
Tahun 2001 – 2004

	Angka Harapan Hidup	Angka Kematian Bayi	Gizi Buruk
Tahun 2001	69	42/1000	0,8
Tahun 2002	70	33,45/1000	0,51
Tahun 2003	69,9	79,2/1000	0,63
Tahun 2004	70	79/1000	1,86

Sumber : Dinas Kesehatan Kota

II.3.4. Ketenagakerjaan

Selama lima tahun terakhir berturut-turut penduduk usia produktif mengalami peningkatan rata-rata pertahun sebesar 0,025 %. Pada tahun 2000 sebesar 898.894 jiwa, tahun 2001 sebesar 904.331 jiwa, tahun 2002 sebesar 921.325 jiwa, tahun 2003 sebesar 952.056 jiwa. Sekitar 68,59 % penduduk kota Semarang adalah penduduk usia produktif (15 - 64) tahun dan penduduk usia tidak produktif (0-14 dan 65 tahun keatas) sebesar 31,41 %.

Tabel II.13
Pencari Kerja dan Pengangguran

Tahun	Pencari Kerja	Pengangguran
2000	10.005	191.095
2001	11.072	162.254
2002	10.946	163.946
2003	12.437	163.946
2004	15.181	172.432

Sumber : Semarang Dalam Angka

Tabel 2.14
Jumlah Penduduk berdasarkan Usia

Tahun	Usia				Jumlah
	0 – 9	10 -14	15 – 65	65 +	
2000	252.386	121.824	898.984	36.473	1.309.667
2001	259.102	124.659	904.331	34.228	1.322.320
2002	268.071	128.403	921.325	32.206	1.350.005
2003	263.575	125.533	952.056	37.047	1.378.193
2004	267.561	127.440	966.522	37.610	1.399.133

Sumber : Semarang Dalam Angka Diolah

Dari data tersebut diketahui bahwa angka beban tanggungan tiap tahun sebesar 45,77 % yang berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 45,77 penduduk usia tidak produktif.

Struktur Penduduk menurut tenaga kerja dapat digambarkan berdasarkan pada penduduk usia kerja. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2000 sebanyak 747.647 orang, tahun 2001 sebanyak 681.969 orang, tahun 2002 sebanyak 685.865 orang, tahun 2003 sebanyak 600.0748 orang dan pada tahun 2004 sebanyak 609.875 orang.

Dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yakni perbandingan antara penduduk usia kerja dengan jumlah angkatan kerja, mulai tahun 2000 sampai dengan 2004 mengalami penurunan. Pada tahun 2000 angka TPAK sebesar 73,48 %, tahun 2001 sebesar 66,10 %, tahun 2002 sebesar 65,40 %, tahun 2003 sebesar 61,25 % dan pada tahun 2004 sebesar 60,74 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlunya peningkatan lapangan pekerjaan yang cukup guna menampung banyaknya penduduk usia kerja yang tiap tahun semakin meningkat.

II.3.4. Kesejahteraan Sosial

Sebagai Ibukota Propinsi Jawa Tengah memiliki permasalahan sosial yang cukup kompleks. Hal ini ditandai dengan adanya golongan yang kurang beruntung seperti gelandangan, pengemis, tuna susila, anak jalanan, anak terlantar dan lain-lain yang dikategorikan sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) . Walaupun ditengarai mereka berasal dari daerah lain tetapi pada kenyataannya mereka berada di wilayah kota Semarang dan menjadi pemandangan yang berkesan kurang baik.

Jumlah penduduk miskin selama empat tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,21 % pertahun. Pada tahun 2004 jumlah penduduk miskin sebesar 59.500 KK atau 238.200 jiwa atau 17% dari jumlah penduduk. Peningkatan tersebut dipicu dengan adanya kondisi perekonomian yang belum pulih seperti sebelum krisis dan adanya penduduk pendatang yang pada umumnya dari lapisan ekonomi lemah.

Tabel II.15
Perkembangan Penduduk Miskin dan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Semarang

Tahun	Penduduk Miskin (KK)	Pengemis	Waria	Wanita Tuna Susila	Anak jalanan dan Anak Terlantar
2000	54.155	350	125	955	1.489
2001	42.119	327	127	907	1.105
2002	44.013	340	125	915	1.635
2003	44.358	340	120	880	1.564
2004	59.550	325	127	876	966

Sumber : Bappeda Kota Semarang

Dari data tersebut menunjukkan bahwa masalah kesejahteraan sosial di Kota Semarang merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat. Penanganan terhadap penyandang masalah sosial sudah dilakukan dan melibatkan banyak pihak, namun usaha tersebut secara empiris tidak menunjukkan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Perkembangan fasilitas sosial yang tersedia di Kota Semarang dapat dilihat dari semakin beragamnya fasilitas sosial yang tersedia serta semakin meningkatnya keterlibatan peran masyarakat dalam penyediaan fasilitas sosial. Perkembangan fasilitas sosial yang ada di Kota Semarang meliputi Panti Jompo sebanyak 5 buah panti asuhan sebanyak 40 buah, rumah singgah sebanyak 3 buah dan yayasan sosial sebanyak 90 buah.

Tabel II.16
Perkembangan Panti Jompo, Panti Asuhan, Rumah Singgah dan Yayasan Sosial di Kota Semarang

Tahun	Jumlah panti jompo	Jumlah panti asuhan	Jumlah rumah singgah	Yayasan Sosial
2000	5	34	5	76
2001	5	34	5	82
2002	5	34	6	86
2003	5	34	6	90
2004	5	40	3	90

Sumber : Bappeda Kota Semarang

Yayasan-yayasan sosial tersebut juga memberikan pondok-pondok singgah dengan maksud untuk membantu anak dan remaja penyandang tuna wisma dan memberi fasilitas singgah, pendidikan, pelatihan, dan perlindungan.

II.4 PRASARANA DAN SARANA DAERAH

II.4.1. Perumahan

Kondisi rumah penduduk di Kota Semarang secara umum baik. Hal ini dapat dilihat dari mayoritas jenis rumah penduduk yang sudah permanen (tembok), yaitu sebesar 67,52%. Meskipun demikian, masih ada rumah yang dindingnya belum permanen, yang membutuhkan peningkatan kualitas rumah sehingga dapat menjadi tempat tinggal yang nyaman dan sehat serta dapat meningkatkan kualitas hidup penghuninya. Data mengenai jumlah dan jenis rumah yang ada di Kota Semarang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dengan rata-rata tingkat hunian sebesar 5 orang/rumah.

Tabel II.17
Banyaknya Rumah Penduduk di Kota Semarang Tahun 2004

No.	Kecamatan	Permanen	Semi Permanen	Papan	Bambu	Jumlah
1	Mijen	4.932	2.341	2.145	0	9.418
2	Gunungpati	6.804	4.942	2.878	0	14.624
3	Banyumanik	16.827	2.309	1.760	0	20.896
4	Gajah Mungkur	7.920	2.482	395	0	10.797
5	Semarang Selatan	9.176	4.576	2.119	0	15.871
6	Candisari	11.900	2.735	591	145	15.371
7	Tembalang	24.414	4.445	1.943	352	31.154
8	Pedurungan	26.020	4.320	1.275	217	31.832
9	Genuk	5.458	3.573	3.503	0	12.534
10	Gayamsari	9.988	1.810	967	129	12.894
11	Semarang Timur	9.768	6.532	1.435	0	17.735
12	Semarang Utara	14.757	6.426	5.839	0	27.022
13	Semarang Tengah	10.262	3.839	1.326	0	15.427
14	Semarang Barat	24.411	6.685	3.763	0	34.859
15	Tugu	3.075	1.224	604	61	4.964
16	Ngaliyan	15.292	4.175	2.838	0	22.305
Jumlah		201.004	62.414	33.381	904	297.703

Sumber: Kota Semarang dalam Angka, 2004

II.4.2. Pelayanan Fasilitas Pendidikan

Dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan di kota Semarang baik sekolah negeri maupun swasta tercatat untuk jenjang pendidikan Dasar (SD) sebanyak 670 buah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 162 buah, Sekolah Menengah Umum/Kejuruan (SMU/K) 143 buah dan Perguruan Tinggi 59 buah.

Tabel II.18
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang pendidikan

Jenjang Pend.	Negeri		Swasta		Jumlah	
	Sekolah	Siswa	Sekolah	Siswa	Sekolah	Siswa
TK	2	289	25	1240	27	1.529
SD	523	109.251	147	32.342	670	141.593
SMP	40	29.596	122	33.133	162	62.729
SMU	16	14.683	63	22.154	79	36.837
SMK	11	9.152	53	19.389	64	28.541
PT	4	42.000	55	53.821	57	95.821
Jumlah	596	162.971	465	162.079	1002	367.050

Sumber : Semarang Dalam Angka

Dari Tabel tersebut di atas nampak bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan formal pada tiap tingkatan cukup tinggi. Untuk pendidikan SLP dan SLA, jumlah sekolah swasta lebih banyak dari sekolah negeri. Untuk daya tampung SD, sekolah swasta mampu menampung 32.342 murid, sedangkan SD negeri mampu menampung 109.251 murid atau sekitar tiga kali SD swasta. Untuk SMP jumlah murid yang ditampung swasta 33.133 murid, SMP negeri 29.596 murid sehingga yang ada di sekolah swasta lebih banyak daripada negeri. Fenomena ini lebih jelas di SMU/SMK dimana untuk swasta mampu menampung 22.239 murid sedangkan negeri 14.683 murid. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, peran serta atau partisipasi swasta semakin tinggi dalam pemenuhan pendidikan.

II.4.3. Pelayanan Fasilitas Kesehatan

Cakupan pelayanan kesehatan telah menjangkau ke seluruh wilayah, hal ini dapat dilihat dari jumlah fasilitas kesehatan yang ada di Kota Semarang. Jumlah Rumah Sakit sebanyak 14 buah, Rumah Sakit Bersalin 22 buah, Puskesmas 37 buah dan Puskesmas Pembantu 34 buah.

Puskesmas dan Puskesmas Pembantu sebagai ujung pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan jumlah 71 buah sehingga rata-rata tiap kecamatan dilayani oleh 4 buah, serta didukung oleh fasilitas kesehatan lainnya memberikan gambaran bahwa pelayanan fasilitas kesehatan masyarakat telah mencukupi.

Tabel II.19
Perkembangan Sarana Kesehatan di Kota Semarang

No	Jenis Fasilitas	2000	2001	2002	2003	2004
1.	Puskesmas	37	37	37	37	37
2.	Puskesmas Pembantu	34	34	34	34	34
3.	RS Negeri	5	5	5	6	6
4.	RS Swasta	8	8	8	8	8
5.	Klinik 24 Jam	19	37	40	44	44
6.	Rumah Bersalin	22	31	29	30	22
7.	Laboratorium Kesehatan	34	37	41	27	41
8.	Balai Pengobatan Negeri	0	0	0	0	0
9.	Balai Pengobatan Swasta	59	109	108	120	120

Sumber : Bappeda Kota Semarang

II.4.4 Jaringan Transportasi

Panjang jaringan jalan di Kota Semarang adalah 2.762,371 km. Dari panjang jaringan jalan tersebut, 59,760 km merupakan jalan nasional; 28,890 km merupakan jalan provinsi; dan 2.673,721 km merupakan jalan kabupaten/lokal. Bila dilihat dari kondisinya, 1.212,506 km berada dalam kondisi baik; 911,108 km berada dalam kondisi sedang; dan 638,754 km berada dalam kondisi rusak. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.20
Panjang Jalan di Kota Semarang Tahun 2004

Status Jalan	Panjang (km)	Kondisi		
		Baik	Sedang	Rusak
Negara	59,760	41,910	14,950	2,900
Provinsi	28,890	20,190	7,200	1,500
Kota/Lokal	2.673,721	1.150,406	888,958	634,354
Jumlah	2.762,371	1.212,506	911,108	638,754

Sumber: Kota Semarang dalam Angka

Selain jalan dan terminal sebagai sarana transportasi utama yang ada, Kota Semarang juga memiliki sarana simpul transportasi yang lain, yang termasuk lengkap yaitu stasiun, pelabuhan, dan bandara. Stasiun di Kota Semarang ada dua, yang semuanya termasuk stasiun perhentian kereta api yang besar yaitu Stasiun Tawang dan Stasiun Poncol, serta kelengkapan depo perkeretaapian. Pelabuhan laut di Kota Semarang adalah Pelabuhan Tanjung Emas. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan internasional, adalah salah satu dari dua pelabuhan internasional yang ada di Propinsi Jawa Tengah, selain Pelabuhan Tanjung Intan di Cilacap. Sedangkan sarana transportasi udara dilayani oleh Pelabuhan Udara Ahmad Yani, yang merupakan bandara internasional. Terminal angkutan umum, terdiri dari terminal Terboyo, Terminal Banyumanik dan Terminal Penggaron. Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan transportasi adalah belum terbentuknya sistem jaringan transportasi yang efisien, dimana masih terjadinya percampuran pelayanan transportasi regional dengan pelayanan transportasi kota serta belum adanya pelayanan angkutan umum yang menghubungkan antara pusat-pusat pelayanan fasilitas transportasi darat (terminal), rel kereta api (stasiun), pelabuhan udara dan pelabuhan laut yang efektif.

Tabel II.21
Banyaknya Kendaraan Bermotor dan Trayek Angkutan
di Kota Semarang Tahun 2004

Jenis Kendaraan / Trayek Angkutan	Jumlah
1. BUS	584
2. Truk	833
3. Colt, Taksi	1.762
4. Angkutan Kota	1.827
5. Mobil Pribadi	26.406
6. Sepeda Motor	104.777
Jenis Trayek	
1. Trayek Utama	49 buah
2. Trayek Ranting	44 buah

Sumber : Semarang Dalam Angka

II.4.5. Jaringan Air Bersih

Jumlah pelanggan air bersih (PDAM) di Kota Semarang adalah 115.165 pelanggan yang didominasi oleh pelanggan non niaga atau rumah tangga. Meskipun demikian, pengguna rata-rata terbesar adalah instansi pemerintah, pelabuhan dan sejenisnya, serta industri, dengan rata-rata pemakaian di atas 1.500 m³. Data selengkapnya mengenai jumlah pelanggan air bersih PDAM di Kota Semarang dapat dilihat di bawah ini.

Tabel II.22
Banyaknya Pelanggan Air Bersih PDAM di Kota Semarang Tahun 2004

Jenis Pelanggan	Jumlah Pelanggan	Pemakaian Air (m ³)
Sosial umum	1.258	541.672
Sosial Khusus	847	728.030
Warung Air	5	1.408
Rumah Tangga 1-5	109.936	26.523.520
Rumah Tangga Niaga	88	26.375
Insatansi Pemerintah 1 – 2	641	1.199.979
Lembaga Pendidikan 1 – 3	172	72.171
Niaga 1 – 6	5.153	1.170.048
Industri 1 – 3	146	196.803
Pelabuhan laut/ Udara	0	0
Terminal air	18	22.268
KU Khusus	1	604
Jumlah	118.265	30.482.878

Sumber: Kota Semarang dalam Angka, 2004

II.4.6. Jaringan Drainase

Penanganan drainase Kota Semarang, terbagi atas dua karakteristik wilayah yaitu penanganan daerah atas dan penanganan daerah bawah. Penanganan daerah atas terbagi ke dalam beberapa pelayanan DAS, yaitu DAS Babon, DAS Banjir Kanal Timur, DAS Banjir Kanal Barat, DAS Silandak/Siangker, DAS Bringin, DAS Plumbon. Sementara bagian bawah terbagi ke dalam empat sistem drainase, Sistem Drainase Semarang Timur, Sistem Drainase Semarang Tengah, sistem Drainase Semarang Barat, dan Sistem Drainase Semarang Tugu.

Permasalahan drainase yang dihadapi di Kota Semarang adalah adanya banjir kiriman yang terjadi di wilayah Hulu Gunung Ungaran, banjir lokal dan terjadinya rob di

kawasan sekitar pantai. Pembukaan lahan didaerah hulu mengakibatkan meningkatnya debit limpasan melebihi kapasitas saluran, erosi yang tinggi menyebabkan pendangkalan saluran dan sungai, serta penurunan tanah menjadi penyebab terjadinya rob.

II.4.7. Jaringan Sampah

Pengelolaan sampah di kota besar seperti Semarang semakin hari semakin kompleks dan perlu penanganan segera, mulai dari sumber sampah (rumah tangga, pasar, pusat perdagangan, industri dan lain lain) hingga tempat pembuangan akhir (TPA). Pengumpulan sampah dari sumber sampah sampai ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) dilakukan oleh masyarakat dan dari TPS ke TPA dilakukan oleh Dinas atau Kelurahan / Kecamatan.

Pengelolaan sampah Kota Semarang saat ini baru menjangkau 132 Kelurahan dari 177 Kelurahan yang ada di Kota Semarang dan sampah yang terangkut baru 75 % dari seluruh produksi sampah total Kota Semarang sebesar $\pm 4.000 \text{ m}^3/\text{hari}$.

Jumlah sarana prasarana persampahan yang ada pada saat kondisinya rata-rata umur teknisnya diatas lima tahun, secara rinci dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II.23
Jumlah sarana dan prasarana Persampahan

Sarana dan Prasarana Persampahan	Jumlah
- Truck Hidrolik/Arm Roll	85 unit
- Dump Truck Sampah	16 unit
- Dump Truck Tanah	5 unit
- Truck Tinja	2 unit
- Creane	1 unit
- Wheel Loader	3 unit
- Swamp Dozer	1 unit
- Shovel Loader	1 Unit
- Excavator / Back Hoe	2 unit
- Kontainer Sampah	384 unit

II.4.8. Jaringan Listrik

Jumlah pelanggan listrik PLN pada tahun 2003 tercatat sebanyak 303.738 pelanggan, yang didominasi oleh pelanggan rumah tangga, dengan rata-rata pemakaian seluruh pelanggan adalah 117.298 Kwh. Bila dilihat secara rinci, maka pemakai dengan konsumsi listrik rata-rata terbesar adalah industri, yaitu sejumlah 544.398,21 Kwh, sedangkan pemakai dengan konsumsi rata-rata terendah adalah rumah tangga, dengan konsumsi rata-rata sebesar 1.666,24 Kwh. Data mengenai jumlah pelanggan listrik PLN dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.24
Banyaknya Pelanggan Listrik PLN di Kota Semarang Tahun 2004

Golongan Tarif	Jumlah Pelanggan	Daya Tersambung	Kwh Terjual
Sosial	5.337	36.714.545	55.003.646
Rumah Tangga	282.479	274.708.600	488.110.886
Usaha + Hotel	21.559	165.348.075	260.585.606
Industri	919	228.805.900	613.452.977
Kantor Pemerintah + Penerangan Jalan	3.290	41.114.184	77.741.113
Jumlah	313.784	746.691.304	1.365.617.666

Sumber: Kota Semarang dalam Angka, 2004

Jangkauan pelayanan listrik secara sudah menjangkau pada seluruh wilayah kota Semarang namun belum semua bangunan rumah tangga menjadi pelanggan listrik PLN, hal ini dapat dilihat dari jumlah bangunan rumah tangga sebanyak 297.703 buah, sedangkan yang menjadi pelanggan rumah tangga sejumlah 282.579 pelanggan.

II.5 PEMERINTAHAN UMUM

II.5.1. Organisasi dan aparatur Pemerintahan

Secara administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. Dalam melaksanakan tugasnya Pemerintah Kota Semarang didukung oleh aparatur sebanyak 15.044 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 2.653 orang Tenaga Pegawai Harian Lepas (TPHL). Adapun struktur pegawai menurut Golongan secara rinci adalah sebagai berikut :

Tabel II.25
Data Pegawai TPHL dan PNS

DATA KEPEGAWAIAN	JUMLAH / TAHUN					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
1. Data TPHL						
- SK perjanjian kontrak		1919	1925	1990	2804	2.653
- SK penugasan kembali		1919	1895	1913	1884	
- SK pemberhentian		24	39	106	61	
- SK penugasan baru		-	57	77	920	
2. Data Jumlah Pegawai :						
- Golongan IV/a – IV/d	61	1582	1845	3070	3057	3599
- Golongan III/a – III/d	1988	9135	9571	8191	8394	7788
- Golongan II/a – II/d	3228	4323	4143	3738	3786	3225
- Golongan I/a – I/d	573	980	386	240	226	154
- CPNS						278

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya unit kerja pada Pemerintah Kota Semarang didukung oleh unsur staf yang memiliki kualifikasi SDM yang cukup memadai.

Tabel II.26
Jumlah pegawai menurut pendidikannya

No.	Tingkat Pendidikan	JUMLAH / TAHUN				
		2001	2002	2003	2004	2005
1	SD	987	952	891	848	741
2	SLTP	790	828	772	773	704
3	SLTA	6125	6281	5895	6012	5.451
4	Diploma (D1,D2 danD3)	3796	3866	3700	3735	3.974
5	S1	3885	3865	3830	3938	3.943
6	S2	154	153	151	157	230
7	S3	-	-	-	-	1

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang

Dalam usaha meningkatkan kualitas SDM, telah diberikan kesempatan yang luas kepada para pegawainya untuk meningkatkan profesionalisme melalui pendidikan formal maupun pendidikan non-formal serta pelatihan-pelatihan. Sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.27
Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Struktural

DIKLAT	TAHUN			
	2001	2002	2003	2004
1. Diklat Pim II	12	17	3	8
2. Diklat Pim III	71	25	11	16
3. Diklat Pim IV	280	200	80	-

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang

Berbagai macam jenis pendidikan dan latihan teknis maupun fungsional terus dilaksanakan dalam upaya meningkatkan ketrampilan teknis jabatan-jabatan tertentu. Belum banyak jenis pendidikan dan latihan teknis maupun fungsional yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang. Hal tersebut dikarenakan masih terbatasnya anggaran yang dimiliki. Selengkapnya jenis dan jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut :

Tabel II.28
Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Fungsional

DIKLAT	TAHUN			
	2001	2002	2003	2004
1. Diklat Fungsional Guru SD			80	
2. Diklat Fungsional Guru SLTP				
3. Diklat Fungsional Guru SLTA			40	
4. Diklat Teknis Fungsional	101	218	160	204
5. Diklat Kepala Sekolah dan Diklat Penyusunan Karya Ilmiah			125	80
6. Diklat Pra Jabatan Gol. II	23		200	103
7. Diklat Pra Jabatan Gol. III	37	36	181	24

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang

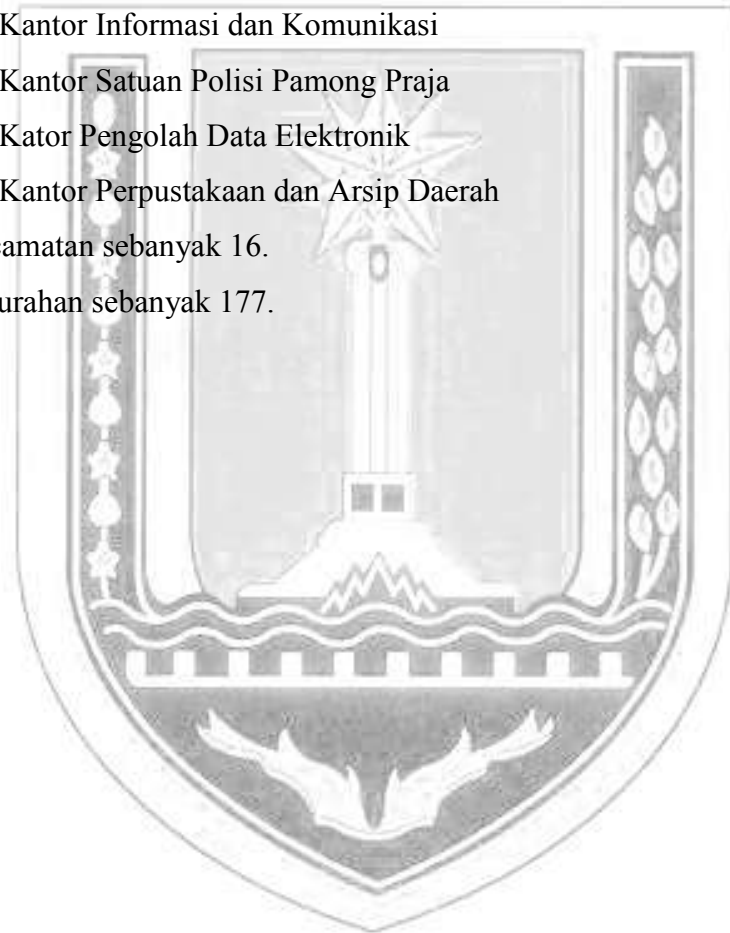
Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Semarang no. 1,2,3 dan 4 tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tatalaksana (SOT) Pemerintah Kota Semarang yang terdiri dari :

- ✿ Walikota dan Wakil Walikota.
- ✿ Sekretaris Daerah dengan 3 Assisten dan 8 Bagian yang terdiri dari
 - Assisten Tata Praja, meliputi :
 - ✦ Bagian Pemerintahan Umum
 - ✦ Bagian Pemerintahan Kelurahan
 - ✦ Bagian Hukum
 - Asisten Ekonomi dan Pembangunan
 - ✦ Bagian Perekonomian
 - ✦ Bagian Pembangunan
 - ✦ Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - Asisten Administrasi
 - ✦ Bagian Umum
 - ✦ Bagian Organisasi
- ✿ Sekretaris DPRD dengan 3 Bagian yang meliputi :
 - Bagian Umum
 - Bagian Risalah dan Rapat
 - Bagian Keuangan
- ✿ Lembaga Teknis Daerah terdiri : 6 Badan dan 4 Kantor, yang meliputi :
 - ✦ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - ✦ Badan Pengawas Daerah
 - ✦ Badan kepegawaian Daerah
 - ✦ Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
 - ✦ Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, Pemberdayaan BUMD dan Aset Daerah
 - ✦ Badan Pengendalian dampak Lingkungan Daerah
- ✿ Dinas Daerah sebanyak 17 buah terdiri dari :
 - ✦ Dinas Kesehatan
 - ✦ Dinas Pengeloaan Keuangan Daerah
 - ✦ Dinas Pendidikan
 - ✦ Dinas Perhubungan
 - ✦ Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - ✦ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - ✦ Dinas Kelautan dan Perikanan
 - ✦ Dinas Pertanian
 - ✦ Dinas Tata Kota dan Permukiman

- ✦ Dinas Pekerjaan Umum
- ✦ Dinas Pertamanan dan Pemakaman
- ✦ Dinas Koperasi dan UKM
- ✦ Dinas Pariwisata
- ✦ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- ✦ Dinas Kebakaran
- ✦ Dinas Kebersihan
- ✦ Dinas Pasar

Sedangkan yang berbentuk Kantor terdiri dari :

- ✦ Kantor Informasi dan Komunikasi
 - ✦ Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
 - ✦ Kantor Pengolah Data Elektronik
 - ✦ Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
- ✦ Kecamatan sebanyak 16.
 - ✦ Kelurahan sebanyak 177.



Adapun struktur Organisasi Pemerintah Kota Semarang sebagaimana gambar di bawah ini :



II.5.2 Pelayanan Publik

Seiring dengan bergulirnya arus reformasi yang ditandai dengan semakin banyaknya berbagai tuntutan masyarakat, maka sistem penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Tuntutan masyarakat tersebut mencakup kualitas kinerja instansi pemerintahan yang di dalamnya termasuk aspek pertanggungjawaban (akuntabilitas) pelaksanaan tugas para pejabat pemerintah, baik secara administratif dan manajerial maupun yuridis formal. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat akan mampu meningkatkan citra/wibawa aparatur yang pada akhirnya akan mewujudkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Di samping aspek tersebut di atas, peningkatan kualitas pelayanan juga menjadi “*entry point*” yang sangat strategis dalam mengantisipasi pelaksanaan era globalisasi dalam berbagai sektor khususnya sektor perekonomian yang merupakan penggerak utama guna mewujudkan visi kota. Oleh karenanya, peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dari adminitrasi pemerintahan menjadi sangat penting. Di dalam penyelenggaraan

administrasi pemerintahan mencakup berbagai jenis pelayanan yang diberikan, diantaranya adalah kegiatan pencatatan, pelayanan surat – menyurat penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi maupun kegiatan tata usaha lainnya. Kegiatan pelayanan administrasi pemerintahan menghasilkan beberapa produk akhir yang berupa dokumen, seperti sertifikasi, perizinan, rekomendasi, keterangan tertulis dan lain-lain. Produk administrasi pemerintahan diantaranya adalah Pelayanan Sertifikat Tanah, Pelayanan IMB, HO, Pelayanan Administrasi Kependudukan (KTP, Nikah Talak Cerai Rujuk(NTCR), Akte Kelahiran/Kematian), Pelayanan usaha perdagangan, pariwisata, kesehatan, dan lain - lain.

Tabel II.29
Jumlah akte/ijin yang dikeluarkan Pemerintah Kota Semarang

No	Jenis Layanan	2000	2001	2002	2003	2004
1	Akte Kelahiran	20.997	19.234	21.454	22.979	23.608
2	Akte Kematian	712	690	759	759	681
3	Perkawinan	1.352	1.260	1.374	1.461	1.454
4	Perceraian	97	76	88	88	130
5	Pengakuan Anak	37	83	86	62	65
6	Pengesahan Anak	65	98	101	93	111
7	KTP	214.985	253.473	247.377	235.691	133.994
8	IMB	1.293	1.105	2.004	1.690	2.323
9	HO	484	276	474	506	425

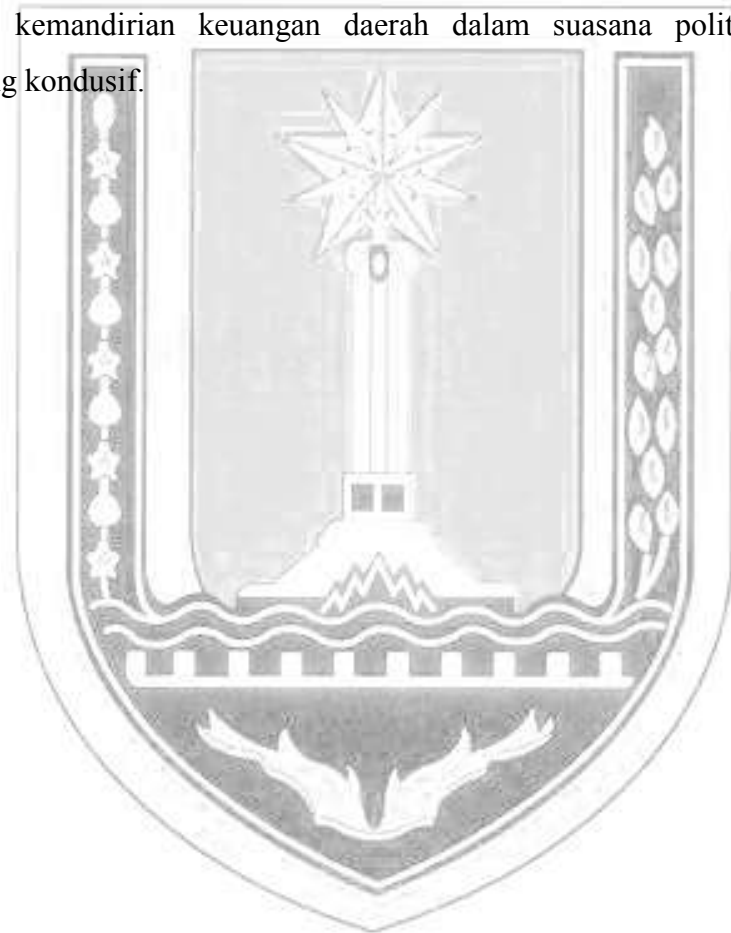
Sumber : Semarang dalam Angka 2004

Upaya peningkatan pelayanan masyarakat dilakukan melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Penerapan SPM ini pada dasarnya adalah upaya untuk memberikan jaminan/kepastian dari pelayanan administrasi pemerintahan kepada penerima pelayanan yang meliputi standar mekanisme pelayanan, standar biaya, standar waktu penyelesaian, baik proses permintaan/pengajuan atau pengusulan maupun proses pengaduan, standar produk pelayanan, standar sarana dan prasarana yang harus disediakan dalam pelayanan umum, standar kompetensi petugas pemberian pelayanan.

Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal, beberapa langkah telah dilakukan. Pertama, mengimplementasikan Bulan Layanan Publik (BLP) yaitu pada bulan Januari sampai dengan Maret 2004. Kedua, dilanjutkan Tahun Peningkatan Pelayanan Publik (TP3) hingga akhir tahun 2004. Ketiga, menindak lanjuti penerapan SPM di Pemerintah Kota Semarang telah diadakan evaluasi melalui penilaian Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) dan hasilnya cukup baik. Keempat, pada bulan Agustus 2005 dibuat Pusat Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik (P5). P5 ini merupakan wadah / saluran bagi masyarakat untuk mengadu / komplain, apabila masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang kurang memuaskan.

Berdasarkan hal tersebut, kebijakan pembangunan selama lima tahun kedepan diarahkan pada upaya memantapkan pelaksanaan otonomi daerah. Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui peningkatan kinerja pelayanan prima diberbagai sektor publik didukung perangkat daerah yang efektif dan efisien, aparatur yang profesional dan berkarakter, infrastruktur yang memadai dan kemandirian keuangan daerah dalam suasana politik, hukum dan kamtibmas yang kondusif.



BAB III

VISI DAN MISI

Visi, misi, kebijakan dan program RPJM Daerah disusun sebagai penjabaran dari visi dan misi pasangan Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk dokumen perencanaan dengan memperhatikan kondisi, gambaran umum daerah maupun kebijakan pengembangan pembangunan kota serta rancangan Perda RPJP Daerah Kota Semarang Tahun 2005 – 2025. Penetapan visi dan misi RPJM Daerah adalah untuk menjembatani kondisi masa kini dengan kondisi masa depan, mengklarifikasi arah dan tujuan organisasi serta menumbuhkan inspirasi dan tantangan pembangunan.

Berdasarkan hal diatas visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Semarang tahun 2005 – 2010 dirumuskan sebagai berikut :

III.1. Visi

**“ SEMARANG KOTA METROPOLITAN YANG RELIGIUS BERBASIS
PERDAGANGAN DAN JASA ”**

Visi tersebut memiliki makna bahwa selama lima tahun kedepan merupakan tahap pertama pembangunan jangka panjang, yang memiliki *tiga kunci pokok* yakni, **Kota metropolitan** yang mengandung arti bahwa Kota Semarang mempunyai sarana prasarana yang dapat melayani seluruh aktivitas masyarakat kota dan *hinterland*-nya; **Religius** mengandung arti bahwa masyarakat Kota Semarang meyakini akan kebenaran ajaran dan nilai-nilai agama yang menjadi pedoman dan tuntunan dalam menjalankan kehidupannya, dalam wujud keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; **perdagangan dan jasa** merupakan basis aktivitas ekonomi masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan visi tersebut mengandung pengertian bahwa dalam jangka waktu lima tahun kedepan, dapat terwujud kota Semarang yang memiliki sarana prasarana kota berskala metropolitan sehingga dapat melayani seluruh aktivitas masyarakat termasuk daerah *hinterland*-nya, dengan aktivitas ekonomi utama yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan keberadaan potensi ekonomi lokal, dalam bingkai dan tatanan masyarakat yang senantiasa dijiwai oleh nilai-nilai religius guna mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

III.2.Misi

Untuk mewujudkan visi Kota Semarang 2005-2010 tersebut, maka dijabarkan dalam 6 misi yang menjadi pedoman bagi pembangunan Kota Semarang:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang religius melalui peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan, pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat dengan memperbesar akses bagi masyarakat miskin, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, kemandirian keuangan daerah, pengembangan profesionalisme aparatur serta didukung oleh infrastruktur pemerintahan yang berbasis teknologi;
3. Memantapkan perwujudan tatanan kehidupan politik, sosial dan budaya yang demokratis serta memperkuat ketertiban dan keamanan yang kondusif melalui upaya penegakkan hukum dan peraturan, pengembangan budaya tertib dan disiplin serta menjunjung tinggi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);
4. Meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi kota secara terpadu dan sinergi diantara para pelaku ekonomi yang berbasis pada perdagangan dan jasa, mendorong kemudahan ber-investasi, penguatan dan perluasan jaringan kerjasama ekonomi lokal, regional dan internasional;
5. Mewujudkan perlindungan sosial melalui penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, anak jalanan, gelandangan dan pengemis, yatim piatu, korban bencana, perlindungan anak dan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan peningkatan peran pemuda.
6. Mewujudkan terselenggaranya kegiatan penataan ruang yang konsisten bagi terwujudnya struktur dan pola tata ruang yang serasi, lestari dan optimal didukung pengembangan infrastruktur yang efektif dan efisien serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

BAB IV

STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi pembangun daerah adalah kebijakan dalam mengimplementasikan program kepala daerah, sebagai payung pada perumusan program dan kegiatan pembangunan di dalam mewujudkan visi dan misi Kota Semarang. Disamping itu, strategi pembangunan juga diperlukan agar setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Proses penentuan strategi pembangunan dilakukan dengan menganalisis isu-isu yang berkembang secara sistematis, dengan jalan melakukan identifikasi berbagai faktor-faktor dalam lingkungan internal dan eksternal.

Faktor-faktor lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan), meliputi :

1. Letak geografis yang sangat strategis
2. Sebagai ibukota propinsi
3. Tersedianya infrastruktur sosial ekonomi
4. Struktur ekonomi
5. Kualitas sumber daya manusia di bidang industri dan jasa
6. Pertumbuhan PDRB untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7. Potensi usaha perdagangan dan jasa
8. Daya saing produk unggulan kota
9. Potensi sumberdaya manusia
10. Pelayanan publik
11. Kelembagaan pemerintah dan masyarakat
12. Infrastruktur pelayanan publik
13. Pelayanan pendidikan dan kesehatan
14. Kondisi Kebersihan dan keindahan kota
15. Sistem informasi manajemen daerah (SIMDA)
16. Penegakan hukum
17. Pembinaan politik
18. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan
19. Suasana kamtibmas yang kondusif

Faktor-faktor lingkungan eksternal (Peluang dan Ancaman) meliputi :

1. Aksesibilitas Kota yang terbuka untuk interkoneksi regional, nasional dan internasional
2. Posisi Kota sebagai salah satu pusat perdagangan dan jasa
3. Perdagangan bebas
4. Pengembangan perekonomian
5. Persaingan yang tinggi di pasar global
6. Terbukanya peluang kota untuk Investasi
7. Daerah tujuan wisata
8. Daya dukung lingkungan
9. Perubahan perilaku sosial dan tatanan nilai masyarakat
10. Transportasi
11. Banjir dan rob
12. Kerjasama antar daerah

IV.1. Strategi Pembangunan Kota Semarang

Dalam penentuan strategi pembangunan kota bersifat rasional dan obyektif dengan mempertimbangkan keadaan masa lalu dan saat ini, kepentingan kebijakan dan persepsi yang diharapkan oleh pihak pemangku kepentingan pembangunan. Strategi pembangunan yang akan digunakan mengatasi permasalahan pembangunan Kota Semarang selama tahun 2005-2010 untuk mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut :

IV.1.1. Strategi penguatan dan pemberdayaan SDM

Strategi ini dimaksudkan untuk menciptakan pemerataan kualitas manusia, serta memberi ruang yang cukup bagi tumbuhnya partisipasi masyarakat pada berbagai bidang pembangunan, yang bertujuan mewujudkan pemberdayaan SDM sesuai peran dan fungsinya dalam kelompok masyarakat dan lembaga pemerintah. Strategi pembangunan ini merupakan upaya penciptaan situasi dan kondisi agar masyarakat berperan aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan. Selain itu strategi ini juga untuk mendorong masyarakat yang kurang beruntung agar dapat meningkatkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

IV.1.2. Strategi pertumbuhan sektor-sektor prioritas

Strategi pertumbuhan sektor-sektor prioritas diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi secara luas. Strategi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perwujudan perekonomian kota yang kuat dan berkeadilan, dalam rangka meningkatkan pendapatan warga kota, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Sehingga pada akhirnya berimplikasi pada pertumbuhan pendapatan perkapita penduduk dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Strategi pembangunan ini mencakup upaya pendayagunaan berbagai potensi sumber-sumber pendapatan daerah dengan tidak memberatkan masyarakat dan pihak lain disertai optimalisasi alokasi pembiayaan pembangunan berdasarkan skala prioritas kebutuhan.

IV.1.3. Strategi pemerataan pembangunan

Strategi ini bertujuan agar terjadi keseimbangan pertumbuhan pembangunan di semua wilayah. Serta untuk memberi ruang yang cukup bagi tumbuhnya partisipasi masyarakat pada berbagai bidang pembangunan, sehingga terjadi perkembangan wilayah di daerah pinggiran dan tidak terjadi pemusatan pertumbuhan pembangunan hanya di sebagian wilayah perkotaan. Strategi pembangunan ini mencakup upaya pemanfaatan nilai strategis yang dimiliki, untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam pengembangan kawasan strategis melalui pengembangan infrastruktur.

IV.1.4. Strategi efisiensi penganggaran

Strategi efisiensi penganggaran dilakukan terhadap program-program pembangunan yang dirasa kurang efektif dan efisien, dengan harapan program-program pembangunan akan lebih berdayaguna dan berhasilguna. Dayaguna dan berhasilguna dapat diukur dari proses yang lebih cepat, tepat, mudah dan murah, serta hasil dan manfaatnya lebih luas dengan resiko seminimal mungkin. Strategi pembangunan ini mensyaratkan adanya telaah program-program pembangunan berdasar kebijakan umum dan prioritas anggaran.

IV.1.5. Strategi keserasian pembangunan

Strategi keserasian pembangunan bertujuan agar terjadi keharmonisan hubungan antara berbagai elemen masyarakat didalam pelaksanaan pembangunan, serta dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan. Keserasian juga dimaksudkan dalam pola

hubungan kerja antara unit atau lembaga pemerintah dan antar wilayah pembangunan. Sehingga dapat dikembangkan kerjasama internal/lembaga fungsional masyarakat kota, serta kerjasama eksternal lintas daerah baik antar pemerintah maupun antar pelaku pembangunan dalam membangun kota dengan berbagai bentuk kerjasama. Hal ini diperkuat dengan upaya untuk pengembangan jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.

IV.1.6. Strategi kesinambungan program pembangunan

Strategi ini didasarkan bahwa perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap, tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam pembangunan. Dalam hal strategi kesinambungan ini mensyaratkan perlunya evaluasi dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga secara terus-menerus dapat diadakan koreksi dan perbaikan selama perencanaan dijalankan. Strategi ini mencakup upaya penciptaan keterkaitan (*interlinkages*) yang tepat antara pembangunan berdimensi fisik alam dengan pembangunan sosial kemasyarakatan, yang berlandaskan pada system tata ruang dan mempertahankan daya dukung lingkungan.

IV.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan Kota Semarang demikian kompleks dan menyeluruh pada tiap-tiap fungsi/sektor pembangunan sehingga dibutuhkan perencanaan dalam rangka merumuskan program dan kegiatan pembangunan secara terpadu dan terarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun. Akan tetapi terdapat fungsi/sektor pembangunan yang harus memperoleh perhatian lebih dan menjadi prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Kota Semarang 2005 - 2010). Fungsi/sektor yang menjadi prioritas, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Fungsi/sektor yang menjadi landasan bagi fungsi lainnya. Hal ini mengandung pengertian bahwa pencapaian tujuan dan sasaran fungsi tersebut menjadi prasyarat bagi pelaksanaan program dan kegiatan lainnya dan/atau menjadi prasyarat tercapainya tujuan dan sasaran fungsi lainnya;
- b. Fungsi/sektor yang membutuhkan penanganan mendesak. Hal ini mengandung pengertian bahwa permasalahan fungsi/sektor tersebut memberikan dampak terganggunya kinerja dan kehidupan masyarakat kota;

c. Fungsi/sektor yang mampu menumbuhkembangkan daya, karsa, cipta dan kinerja masyarakat kota.

Sektor prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2005 – 2010 adalah sebagai berikut :

IV.2.1. Penguatan Ekonomi Masyarakat

Penguatan ekonomi masyarakat diharapkan akan mampu mendorong peningkatan kemampuan masyarakat sehingga memiliki kemampuan bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan. Dengan pendampingan dan penguatan institusi lokal, bantuan dana bergulir bagi masyarakat, dan bantuan pembangunan sarana prasarana, diharapkan dapat memperkuat kondisi ekonomi masyarakat. Selain itu pengembangan pasar-pasar tradisional perlu mendapatkan perhatian.

IV.2.2. Peningkatan Pelayanan Publik

Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan murah/terjangkau demi tercapainya pelayanan prima. Hal ini melalui pemberdayaan dan perwujudan aparatur pemerintah yang bersih (*clean governance*) dan ditunjang dengan sarana dan prasarana pelayanan secara memadai, salah satunya dengan mengembangkan *Electronic Government (E-Gov)*.

Dengan pelayanan publik yang baik diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mengurangi biaya tinggi serta mendorong aktivitas perekonomian.

IV.2.3. Peningkatan Infrastruktur Kota

Pembangunan infrastruktur kota ditekankan pada peningkatan kualitas, kapasitas prasarana kota dan pengembangan wilayah pinggiran terutama yang mendukung kelancaran arus barang dan jasa, meningkatkan daya tarik investasi dan mendukung aktivitas perekonomian lokal.

IV.2.4. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Pembangunan ini ditekankan pada perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin serta pelayanan keagamaan bagi seluruh masyarakat.

IV.2.5. Penanganan Lingkungan Hidup

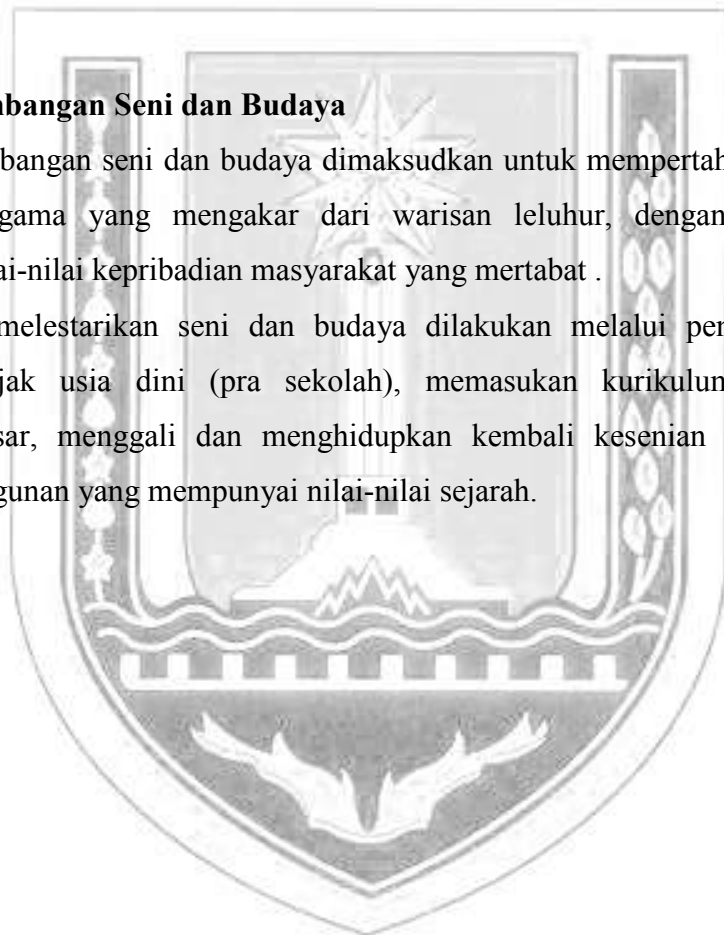
Upaya penanganan lingkungan hidup dimaksudkan untuk menjamin pembangunan berkelanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat saat ini dan bagi generasi mendatang.

Pembangunan ini ditekankan pada penanganan masalah Rob dan Banjir, Lahan Kritis, kerusakan kawasan pesisir dan pencemaran lingkungan yang dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Upaya ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan serta mengurangi ekonomi biaya tinggi dan dampak-dampak negatif lainnya.

IV.2.6. Pengembangan Seni dan Budaya

Pengembangan seni dan budaya dimaksudkan untuk mempertahankan nilai-nilai budaya dan agama yang mengakar dari warisan leluhur, dengan harapan dapat membentuk nilai-nilai kepribadian masyarakat yang mertabat .

Upaya untuk melestarikan seni dan budaya dilakukan melalui pengenalan kepada masyarakat sejak usia dini (pra sekolah), memasukan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, menggali dan menghidupkan kembali kesenian tradisional serta konservasi bangunan yang mempunyai nilai-nilai sejarah.



BAB V

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Gambaran pengelolaan keuangan daerah menjelaskan tentang aspek kebijakan keuangan daerah, yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta capaian kinerja, guna mewujudkan visi dan misi.

V.1. ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Kapasitas keuangan Daerah akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat. Kemampuan pemerintah dapat diukur penerimaan pendapatan daerah, penerimaan pendapatan daerah dari tahun ke tahun senantiasa menunjukkan peningkatan, namun demikian kontribusi PAD terhadap penerimaan masih relatif kecil dibanding dengan sumber penerimaan dari dana perimbangan.

Kondisi tersebut merupakan tantangan sekaligus peluang, yang perlu disikapi dengan usaha keras, agar komposisi perimbangan peran PAD dan pendapatan dari pusat mencapai titik keseimbangan (*equilibrium*).

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah diarahkan untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, optimalisasi aset dan kekayaan pemerintah kota termasuk mengembangkan BUMD baru dengan menganut prinsip (1) Potensial artinya lebih menitik beratkan pada potensinya dari pada jumlah atau jenis pungutan yang banyak. (2) Tidak memberatkan masyarakat, (3) Tidak merusak lingkungan (4) Mudah diterapkan/diaplikasikan, mudah dilaksanakan, (5) Penyesuaian pendapatan baik mengenai tarif dan materinya.

Di bawah ini digambarkan penerimaan pendapatan pendapatan Kota Semarang dari tahun 2001 s/d 2005.

Tabel V.1
REKAPITULASI PENERIMAAN PENDAPATAN KOTA SEMARANG
TAHUN 2001 S/D 2005

NO	URAIAN	2001	2002	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7
A	BAG. PENDAPATAN ASLI DAERAH	85,524,461,000	106,839,455,000	122,744,935,000	155,824,656,967	173,389,424,000
	a. Pos Pajak Daerah	49,079,370,000	61,681,625,000	70,580,000,000	94,174,189,458	96,980,000,000
	b. Pos Retribusi Daerah	28,415,295,000	33,760,170,000	35,439,520,000	46,115,361,326	53,624,230,000
	c. Pos Bagian Laba BUMD	181,278,000	295,512,000	269,519,000	307,197,000	9,004,941,000
	d. Lain-lain PAD yang sah	7,848,518,000	11,102,148,000	16,455,896,000	15,227,909,183	13,780,253,000
B	BAG. DANA PERIMBANGAN	313,863,683,000	353,163,704,000	413,059,852,000	516,900,043,706	515,078,511,000
	a. Pos Bagi Hasil Pajak	54,885,695,000	84,178,344,000	103,701,492,000	195,409,274,272	182,813,146,000
	b. Pos Bagi Hasil Bukan Pajak	1,478,825,000	2,035,360,000	1,358,360,000	2,386,354,434	167,365,000
	c. Pos Dana Alokasi Umum	254,262,363,000	266,950,000,000	308,000,000,000	314,104,415,000	332,098,000,000
	d. Pos Dana Alokasi Khusus	3,236,800,000	0	0	5,000,000,000	0
C	BAG. LAIN - LAIN PEND. DAERAH YANG SAH	21,256,353,000	7,661,831,000	10,511,831,000	26,437,701,000	34,494,536,000
	a. Pos Lain -lain Pendapatan Daerah yang sah	21,256,353,000	7,661,831,000	10,511,831,000	26,437,701,000	34,494,536,000
	J U M L A H	420,644,497,000	467,664,990,000	546,316,618,000	699,162,401,673	722,962,471,000

Sumber : Nota Keuangan Daerah Kota Semarang

Tabel di atas menunjukkan bahwa proporsi pendapatan daerah masih didominasi oleh sumber-sumber pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan baik pos bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, DAU maupun DAK. Hal ini menunjukkan bahwa ratio kemandirian keuangan daerah masih rendah atau rata-rata baru mencapai 24,2 %. Oleh karena itu upaya menggali perolehan pendapatan harus dilakukan secara sistematis dan terarah dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki seoptimal mungkin melalui riset potensi daerah.

Dengan mempertimbangkan angka rata-rata pertumbuhan pendapatan maka proyeksi penerimaan daerah pada tahun 2006 s/d 2010 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.2
Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah tahun 2006 -2010

Tahun	2006	2007	2008	2009	2010
Proyeksi	838.814.403.900	943.634.524.930	1.062.077.460.159	1,195.976.611.321	1,347.419.388.372

Sumber : Data diolah

V.2. ARAH PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Pengelolaan belanja daerah sangat erat kaitannya dengan sistem manajemen keuangan daerah, sistem penganggaran maupun sistem akuntansi. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi dibidang keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik (*Public Accountability*) dengan mendasarkan pada prinsip *value for money*. Disamping itu, pengelolaan belanja daerah harus berlandaskan anggaran Kinerja (*Performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya kepentingan publik terutama masyarakat miskin dan kurang beruntung, dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*) melalui pendekatan kinerja (*performance oriented*). Disamping itu, pengeluaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait, mendasarkan pada, standar analisa belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal serta memperhatikan prinsip *value for money*. Identifikasi belanja pengeluaran akan dibedakan menurut belanja langsung dan tidak langsung guna meningkatkan aspek transparansi. Kriteria tersebut bertitik tolak dari kegiatan yang dilakukan.

Tabel V.3
Rekapitulasi Belanja Kota Semarang Tahun 2001 - 2005

No	Uraian	2001	2002	2003	2004	2005*)
1	2	3	4	5	6	7
A	BELANJA APARATUR DAERAH	332,400,249,825	464,339,528,600	260,190,961,266	185,929,232,350	214,740,125,000
	1. BELANJA ADMINISTRASI UMUM	297,624,778,210	311,698,411,020	124,803,028,520	90,793,593,237	117,706,567,000
	a. Belanja Pegawai	243,181,303,105	284,658,136,752	104,823,378,646	68,209,175,040	60,459,884,000
	b. Belanja Barang dan Jasa	47,025,402,444	19,707,883,051	12,462,232,452	13,934,297,027	46,048,942,000
	c. Belanja Pemeliharaan	6,492,579,311	4,945,418,867	4,716,177,792	5,707,999,121	7,660,483,000
	d. Belanja Perjalanan Dinas	925,493,350	2,386,972,350	2,801,239,630	2,942,122,049	3,537,258,000
	2. BELANJA OPERASI & PEMELIHARAAN	13,017,592,584	58,050,489,210	16,245,814,782	13,221,549,462	23,199,988,000
	3. BELAJ. MODAL		7,377,948,896	45,675,983,387	7,331,764,790	10,169,318,000
	4. BELANJA TRANSFER	318,002,000	67,780,398,852	73,466,134,577	74,582,324,861	63,664,252,000
	5. BELANJA TAK TERSANGKA	4,027,377,031	3,032,280,622			
	6. ANGSURAN HUTANG	17,412,500,000	16,400,000,000			
B	BELANJA	81,996,779,337	9,992,700,203	371,922,719,445		

No	Uraian	2001	2002	2003	2004	2005*)
	PELAYANAN PUBLIK				461,639,827,907	635,044,450,000
	1. BELANJA ADMINISTRASI UMUM			250,871,783,306	328,228,263,651	357,792,064,200
	a. Belanja Pegawai			238,776,084,105	315,581,892,196	341,388,089,000
	b. Belanja Barang dan Jasa			9,623,537,751	9,653,947,985	12,275,390,000
	c. Belanja Pemeliharaan			2,134,465,850	2,519,336,470	3,474,459,200
	d. Belanja Perjalanan Dinas			337,695,600	473,087,000	654,125,200
	2. BELJ. OPERASI & PEMEL.			54,503,498,594	58,545,694,105	118,804,124,000
	3. BELAJ. MODAL		9,992,700,203	35,390,764,008	28,127,413,505	98,917,939,800
	4. BELANJA TRANSFER			20,712,878,950	46,738,456,646	59,476,322,000
C	BELANJA TAK TERSANGKA			3,543,778,488	3,947,983,138	7,272,639,000
D	BELANJA BUNGA HUTANG			6,900,016,099	9,899,215,458	27,381,079,000
	JUMLAH BELANJA	414,397,029,162	474,332,228,803	642,557,475,298	661,416,258,853	884,438,293,000

Sumber : DPKD Kota Semarang

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2000 anggaran belanja aparatur masih mendominasi belanja pemerintah dibandingkan anggaran pelayanan publik. Namun demikian, mulai tahun 2003 proporsi belanja pelayanan publik sudah semakin besar dibanding belanja aparatur daerah. Hal ini menunjukkan bahwa sejak tahun 2003 anggaran belanja telah disusun sesuai dengan perubahan paradigma kepentingan masyarakat.

Dalam hal kepentingan tertentu, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah dapat pula membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran.

Adapun proyeksi belanja daerah pada tahun 2006 s/d 2010 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.4
Proyeksi Belanja Daerah tahun 2006 - 2010

Tahun	2006	2007	2008	2009	2010
Proyeksi	951,489,465,423.60	1,064,206,121,196.20	1,176,922,776,968.80	1,289,639,432,741.40	1,402,356,088,514.00

Sumber : data diolah

Mencermati besarnya belanja yang harus dikeluarkan pada lima tahun mendatang diperlukan upaya secara serius untuk mengelola belanja daerah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan.

V.3. PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan daerah dan Belanja Daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil Penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan Pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana Cadangan.

Melihat prediksi lima tahun kedepan, menunjukkan bahwa prosentase Kenaikan belanja lebih besar dari pada kenaikan pendapatan. Oleh karena itu dalam upaya membiayai kegiatan Pemerintahan diperlukan langkah-langkah pembiayaan baik dengan sisa lebih, hutang dan sebagainya.

V.4. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Arah kebijakan ekonomi daerah adalah mewujudkan ekonomi daerah yang mencakup peningkatan perekonomian kota yang tangguh, sehat dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap peningkatan kegiatan ekonomi akan berpengaruh pada peningkatan lapangan kerja & kesempatan berusaha yg pada akhirnya akan mewujudkan kemakmuran & kesejahteraan masyarakat. Maknanya bahwa setiap potensi ekonomi yg dimiliki harus dimanfaatkan secara optimal dengan memperhatikan peluang-peluang yg ada guna kepentingan & kesejahteraan masyarakat. Namun demikian melihat prediksi lima tahun ke depan, ternyata prosentasi kenaikan belanja lebih besar dari pada kenaikan pendapatan. Oleh karena itu beberapa langkah harus dilakukan dalam upaya membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, maka pembiayaan pembangunan dapat didanai dengan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan melakukan pinjaman daerah. Kemampuan Kota Semarang dalam melakukan pinjaman daerah dapat dilihat dari DSCR yang ada. Selengkapnya kemampuan pemerintah Kota Semarang untuk melakukan pinjaman dapat dilihat dalam tabel 5.5.

Tabel V.5.
DEBT SERVICE COVERAGE RATIO (DSCR)
PEMERINTAH KOTA SEMARANG 2005 - 2010

NO	URAIAN	2005	2006	2007	2008	2009	2010
I	PAD	173,389,424,000	199,397,837,600	219,337,621,360	241,271,383,496	265,398,521,846	291,938,374,030
	BAGI HASIL					-	
	a. Pajak	182,813,146,000	219,375,775,200	252,282,141,480	290,124,462,702	333,643,132,107	383,689,601,923
	b. Bukan Pajak	167,365,000	184,101,500	202,511,650	222,762,815	245,039,097	269,543,006
	c. D A U	332,098,000,000	381,912,700,000	439,199,605,000	505,079,545,750	580,841,477,613	667,967,699,254
	LAIN - LAIN						
	PENDAPATAN	34,494,536,000	37,943,989,600	41,738,388,560	45,912,227,416	50,503,450,158	55,553,795,173
	JUMLAH (I)	722,962,471,000	838,814,403,900	952,760,268,050	1,082,610,382,179	1,230,631,620,820	1,399,419,013,387
II	BELANJA WAJIB :						
	1. Pegawai	401,847,973,000	494,273,006,790	543,700,307,469	598,070,338,216	657,877,372,037	723,665,109,241
	2. Barang dan Jasa	58,324,333,000	71,738,929,590	78,912,822,549	86,804,104,804	95,484,515,284	105,032,966,813
	3. Pemeliharaan	11,134,942,000	13,695,978,660	15,065,576,526	16,572,134,179	18,229,347,596	20,052,282,356
	4. Angsuran Hutang	40,550,959,000	11,407,347,000	4,013,405,000	3,048,271,000	3,048,271,000	3,048,271,000
	JUMLAH (II)	511,858,207,000	591,115,262,040	641,692,111,544	704,494,848,198	774,639,505,918	851,798,629,410
III	SELISIH I – II	211,104,264,000	247,699,141,860	311,068,156,506	378,115,533,981	455,992,114,901	547,620,383,977
IV	ANGSURAN HUTANG	40,550,959,000	11,407,347,000	4,013,405,000	3,048,271,000	3,048,271,000	3,048,271,000
V	DSCR	5.21	21.71	77.51	124.04	149.59	179.65

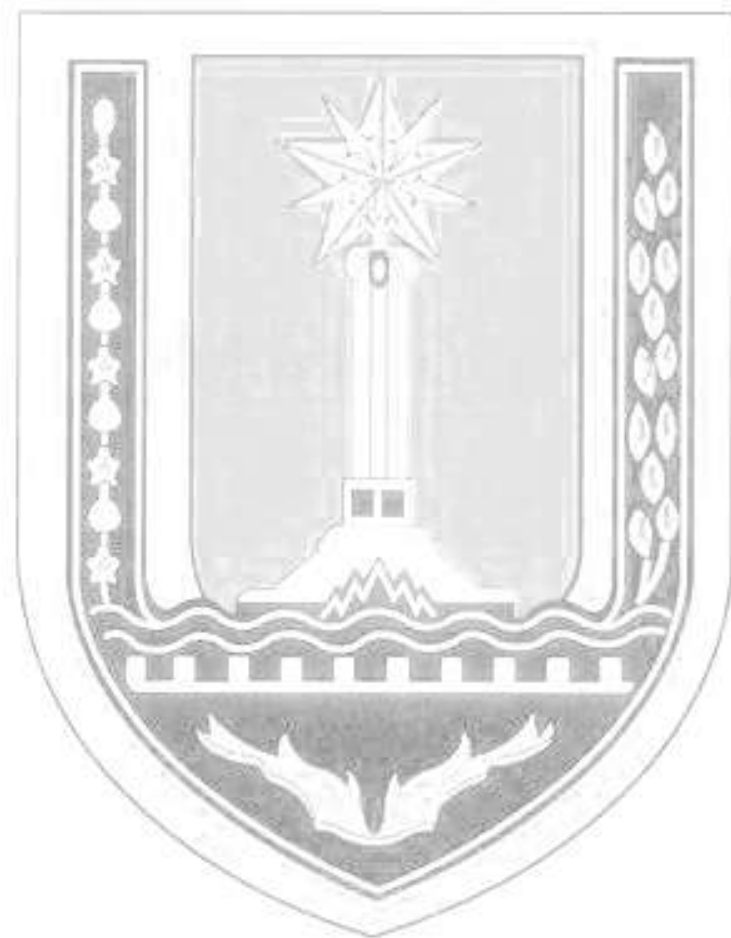
Sumber : DPKD Kota Semarang

Namun demikian, kebijakan pembiayaan pembangunan melalui hutang harus memenuhi syarat yaitu hutang tersebut dipergunakan untuk investasi dan/atau mempunyai dampak yang luas terhadap kepentingan masyarakat. Disamping itu, lima tahun mendatang kebijakan umum anggaran diarahkan untuk memantapkan landasan ekonomi daerah yang mandiri dijiwai nilai-nilai religius berbasis perdagangan dan jasa untuk mewujudkan kota metropolitan melalui :

- a. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk pemantapan kehidupan beragama, pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak dengan memprioritaskan pada golongan masyarakat miskin.
- b. Mendorong pertumbuhan ekonomi secara adil dan merata dengan prioritas pada bidang perdagangan dan jasa sebagai tulang punggung perekonomian daerah dengan memacu wilayah pengembangan.
- c. Meminimalisasikan gejolak fluktuasi ekonomi dengan memberikan bantuan dan proteksi kepada masyarakat miskin agar tetap mampu mencukupi kebutuhan dasar minimumnya.
- d. Mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kesempatan berusaha, optimalisasi potensi ekonomi lokal, pemberdayaan usaha sektor informal, Koperasi dan UKM serta keadilan kesempatan untuk berusaha dalam iklim yang kondusif.
- e. Meningkatkan iklim investasi guna mendorong agar dapat mengurangi hambatan-hambatan baik yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, permodalan, infrastruktur, kelembagaan serta kepastian dan keamanan berinvestasi.
- f. Mengoptimalkan pendapatan melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi sumber-sumber pendapatan tanpa membebani masyarakat.
- g. Mengoptimalkan pengelolaan Asset dan kekayaan daerah agar dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah, melalui profesionalisme manajemen.
- h. Menumbuhkembangkan iklim yang sehat di BUMD sehingga mampu memberikan kontribusi optimal bagi pendapatan daerah termasuk mendirikan BUMD dan/atau perusahaan milik Pemerintah daerah yang profitable.
- i. Mengembangkan iklim kondusif bagi peningkatan swadaya melalui pola/skema kemitraan baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat, pemerintah daerah dengan swasta atau masyarakat dengan swasta. Struktur

ekonomi kota diarahkan untuk mewujudkan struktur perekonomian kota yang kokoh dimana perdagangan dan jasa menjadi basis aktivitas perekonomian yang didukung oleh aktivitas perekonomian lainnya.

- j. Setiap pengeluaran daerah harus didasarkan pada, standar analisa belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal serta memperhatikan prinsip efisien dan efektif.



BAB VI

KEBIJAKAN UMUM

Visi sekaligus tujuan pembangunan jangka menengah Kota Semarang tahun 2005-2010 adalah ” SEMARANG KOTA METROPOLITAN YANG RELIGIUS BERBASIS PERDAGANGAN DAN JASA” sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya. Sebagai ukuran tercapainya pembangunan lima tahun mendatang, maka ditetapkan arah kebijakan umum dalam kerangka pencapaian sasaran pokok sebagai berikut :

VI.1 Mewujudkan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang yang religius melalui peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan, pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat dengan memperbesar akses bagi warga masyarakat kurang mampu, pengembangan olahraga, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebijakan pembangunan Kota Semarang tahun 2005-2010 yang ditempuh dalam upaya memantapkan pengembangan kualitas sumber daya manusia, adalah sebagai berikut :

VI.1.1 Fungsi Pendidikan

a. Sub fungsi Pendidikan usia dini

Arah Kebijakan pembangunan ini ditujukan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat usia 0 – 6 tahun untuk pengembangan bakat dan pembinaan mental.

b. Sub fungsi Pendidikan Dasar

Arah kebijakan pembangunan ini ditujukan pada pemberian hak dasar pelayanan pendidikan yang bermutu, melalui pendidikan wajar 9 tahun, peningkatan kualitas pendidikan, dan peningkatan penyelenggaraan pendidikan melalui manajemen terpadu.

c. Sub Fungsi Pendidikan Menengah

Kebijakan pembangunan ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, agar mampu bersaing dalam era globalisasi.

d. Sub Fungsi Pendidikan Luar Sekolah

Kebijakan pembangunan ini diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan dan ketrampilan tenaga kerja, melalui pengembangan model-model pendidikan luar sekolah yang aplikatif.

VI.1.2 Fungsi Kesehatan

Kebijakan fungsi ini diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat upaya-upaya di bidang kesehatan..

VI.2 Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, kemandirian keuangan daerah, pengembangan profesionalisme aparatur serta didukung oleh infrastruktur pemerintahan yang berbasis pada teknologi.

Kebijakan pembangunan Kota Semarang tahun 2005-2010 dalam upaya memantapkan pelaksanaan otonomi daerah menuju tata kelola yang baik, dilakukan melalui pembangunan pada **fungsi pelayanan umum**, yang meliputi :

VI.2.1 Sub fungsi Pelayanan Umum

Kebijakan pembangunan sub fungsi pelayanan umum diarahkan pada peningkatan kapasitas lembaga/institusi pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan didukung kelembagaan yang efisien dan efektif serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.

VI.2.2 Sub Fungsi Sumber Daya Aparatur

Kebijakan pembangunan ini diarahkan pada peningkatan kualitas aparatur Pemerintah baik unsur eksekutif maupun legislatif agar mampu mengakomodasi tuntutan aspirasi masyarakat.

VI.2.3 Sub fungsi Kapasitas Keuangan Daerah

Kebijakan pembangunan Pembangunan kapasitas keuangan daerah diarahkan pada kemandirian keuangan daerah melalui penggalian sumber-sumber pendapatan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan terwujudnya pengelolaan keuangan daerah secara transparan, efektif, efisien, sistematis dan akuntabel dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

VI.2.4 Sub fungsi Infrastruktur Pemerintah

Kebijakan pembangunan ini diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

VI.2.5 Sub fungsi Pengembangan IPTEK

Kebijakan pembangunan ini diarahkan pada upaya pemanfaatan Ilmu pengetahuan teknologi dalam kerangka pelayanan dan kesejahteraan

masyarakat, peningkatan kualitas hasil penelitian, pengembangan kajian permasalahan pembangunan dan pengembangan perpustakaan daerah.

VI.3 Memantapkan perwujudan tatanan kehidupan politik, sosial dan budaya yang demokratis serta memperkuat ketertiban dan keamanan yang kondusif melalui upaya penegakkan hukum dan peraturan, pengembangan budaya tertib dan disiplin serta menjunjung tinggi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Kebijakan pembangunan kota Semarang tahun 2005-2010 dalam memantapkan perwujudan tatanan kehidupan politik, sosial dan budaya yang demokratis, yakni :

Fungsi Ketertiban

VI.3.1 Sub Fungsi Politik

Kebijakan pembangunan ini diarahkan pada peningkatan iklim politik yang kondusif dan stabilitas politik daerah guna mendukung terselenggaranya pembangunan daerah secara dinamis diantaranya melalui pendidikan dan partisipasi politik.

VI.3.2 Sub Fungsi Ketertiban dan Keamanan

Kebijakan pembangunan ini diarahkan pada penciptaan lingkungan yang aman dan tertib serta antisipatif terhadap munculnya kerawanan-kerawanan sosial, politik, ekonomi dan bencana yang dapat meresahkan masyarakat.

VI.3.3 Sub Fungsi Hukum

Kebijakan pembangunan ini diarahkan pada upaya menciptakan Sistem hukum yang mampu memberikan jaminan rasa keadilan, perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

VI.3.4 Sub Fungsi Komunikasi

Kebijakan pembangunan ini diarahkan pada terwujudnya transparansi informasi dan terbentuknya masyarakat yang responsif terhadap pembangunan melalui upaya peningkatan proses komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat secara optimal dan pengembangan saluran komunikasi yang efektif.

VI.4 Memantapkan kinerja pertumbuhan ekonomi kota secara terpadu dan sinergi diantara para pelaku ekonomi yang berbasis pada perdagangan dan jasa, mendorong kemudahan ber-investasi, penguatan dan perluasan jaringan kerjasama ekonomi lokal, regional dan internasional.

Kebijakan yang ditempuh dalam memantapkan kinerja pertumbuhan ekonomi Kota Semarang tahun 2005-2010, yakni :

VI.4.1 Fungsi Ekonomi

- a. Sub fungsi Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan.

Kebijakan pembangunan ini diarahkan pada peningkatan pemanfaatan sumberdaya pertanian secara optimal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan melalui peningkatan kualitas SDM Pertanian, pengelolaan potensi kelautan secara optimal dan pengembangan perikanan.

- b. Sub fungsi Tenaga Kerja

Kebijakan pembangunan ini diarahkan pada peningkatan kualitas tenaga kerja dan kemandirian tenaga kerja, melalui peningkatan ketrampilan tenaga kerja dan semangat kewirausahaan, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan transmigrasi serta pembinaan dan perlindungan tenaga kerja.

- c. Sub Fungsi Perdagangan dan Jasa

Kebijakan pembangunan ini diarahkan pada tersedianya barang kebutuhan pokok dan jasa yang terjangkau daya beli masyarakat, pengembangan perdagangan dan jasa sebagai lapangan usaha masyarakat melalui pengembangan potensi sumberdaya perdagangan dan jasa, peningkatan ekspor dan pengembangan regulasi usaha.

- d. Sub fungsi Koperasi dan UKM

Kebijakan pembangunan ini diarahkan pada mendorong dan memfasilitasi masyarakat dalam rangka mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan melalui Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)

- e. Sub fungsi Investasi

Kebijakan pembangunan ini diarahkan pada peningkatan investasi/penanaman modal, jaminan kepastian berusaha, kemudahan perijinan dan jaminan keamanan berusaha dalam kerangka pengembangan iklim investasi yang kondusif, profesionalisme pengelolaan BUMD dan optimalisasi manajemen asset daerah.

- f. Sub fungsi Industri

Kebijakan pembangunan ini diarahkan pada mengembangkan industri terutama industri kecil/home industri, pengembangan sistem ekonomi

kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar dengan pengembangan eksport dan penguatan institusi pasar.

VI.4.2 Fungsi Pariwisata dan Kebudayaan

- Sub Fungsi pariwisata

Pembangunan sub fungsi pariwisata diarahkan pada pengembangan dan pemanfaatan potensi-potensi wisata secara maksimal baik wisata dagang, wisata religius dan wisata kuliner, peningkatan manajemen pengelolaan pariwisata serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang kepariwisataan.

VI.5 Mewujudkan perlindungan sosial melalui penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, anak jalanan, gelandangan dan pengemis, yatim piatu, korban bencana, perlindungan anak dan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan peningkatan peran pemuda.

Kebijakan pembangunan Kota Semarang Tahun 2005-2010 dalam upaya memantapkan perlindungan sosial, dilaksanakan melalui :

Fungsi Perlindungan Sosial

VI.5.1 Sub Fungsi Kesejahteraan Sosial

Kebijakan pembangunan ini diarahkan pada perlindungan sosial terhadap penyandang masalah sosial melalui upaya meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat.

VI.5.2 Sub Fungsi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kebijakan pembangunan ini diarahkan

VI.5.3 Sub Fungsi Kependudukan

Kebijakan pembangunan ini diarahkan pada pengendalian laju pertumbuhan (urbanisasi) dan persebaran penduduk serta peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan.

VI.5.4 Sub Fungsi Program KB dan Keluarga Sejahtera

Kebijakan pembangunan ini diarahkan pada terwujudnya keluarga sejahtera melalui pengendalian Kelahiran , kesadaran masyarakat dalam ber-KB, meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja serta pendewasaan usia perkawinan, meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dan memperkuat kelembagaan dan Jejaring KB dalam upaya pembudayaan keluarga kecil berkualitas.

VI.5.5 Sub Fungsi Pengembangan Kelembagaan Masyarakat

Kebijakan pembangunan ini diarahkan pada mewujudkan penguatan kelembagaan masyarakat sehingga mampu mengembangkan potensi lokal dan berperan aktif dalam setiap tahapan pembangunan.

VI.5.6 Sub Fungsi Agama

Kebijakan pembangunan sub fungsi agama diarahkan pada peningkatan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan umat beragama serta peningkatan keimanan & ketaqwaan.

VI.5.7 Sub fungsi Kebudayaan dan Kesenian

Kebijakan pembangunan sub fungsi budaya diarahkan untuk memperkuat, mengembangkan dan melestarikan potensi budaya lokal dalam rangka membentuk karakteristik masyarakat kota, mencegah masuknya budaya lain yang negatif atau yang tidak sesuai dengan budaya lokal dan memberi ruang gerak untuk berkreasi dan berinovasi dalam pengembangan kesenian lokal.

VI.6 Mewujudkan terselenggaranya kegiatan penataan ruang yang konsisten bagi terwujudnya struktur dan pola tata ruang yang serasi, lestari dan optimal didukung pengembangan infrastruktur yang efektif dan efisien serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

VI.6.1 Fungsi Penataan Ruang

Kebijakan pembangunan fungsi penataan ruang diarahkan bagi perwujudan struktur dan pola tata ruang wilayah perkotaan yang optimal sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang.

VI.6.2 Fungsi Infrastruktur/Sarana Prasarana

Kebijakan pembangunan infrastruktur diarahkan bagi perwujudan penanganan dan pelayanan efektif dan efisien dalam rangka mendukung perwujudan struktur dan pola tata ruang wilayah serta penanggulangan permasalahan lingkungan.

a. Sub Fungsi Jaringan Jalan.

Kebijakan pembangunan sub fungsi jaringan jalan diarahkan bagi perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan pelayanan wilayah, pembentukan struktur jaringan jalan sesuai dengan hirarki dan pelayanan jalan, interkoneksi antar bagian wilayah pengembangan dan antar pusat pelayanan transportasi dan pusat pelayanan perkotaan serta peningkatan kapasitas jalan.

b. Sub Fungsi Jaringan Transportasi (Lalulintas)

Kebijakan pembangunan sub fungsi Transportasi diarahkan bagi pemenuhan pelayanan transportasi antar bagian wilayah dan antar lingkungan serasi antara hirarki pelayanan dan moda transportasi yang representatif serta terwujudkan tertib dan disiplin berlalulintas.

c. Sub Fungsi Sumber Daya Air dan Pelayanan Air Bersih

Kebijakan pembangunan sub fungsi Sumber Daya Air dan Pelayanan Air Bersih diarahkan bagi pelestarian Sumber daya air dalam kerangka pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat serta menjaga kualitas dan kuantitas sumber daya air melalui pengendalian dan pengawasan air bawah tanah.

d. Sub Fungsi Jaringan Drainase

Kebijakan pembangunan sub fungsi Drainase diarahkan bagi pencegahan banjir serta penanggulangan ROB dengan pembangunan sistem dan pengelolaan drainase wilayah dan kawasan.

e. Sub Fungsi Jaringan Irigasi

Kebijakan pembangunan sub fungsi Irigasi diarahkan bagi pemenuhan kebutuhan air bagi kegiatan pertanian dengan optimalisasi pengelolaan jaringan irigasi.

f. Sub Fungsi Jaringan Persampahan

Kebijakan pembangunan sub fungsi Jaringan Persampahan diarahkan bagi kelestarian lingkungan hidup dan kebersihan kota dengan optimalisasi pelayanan pengelolaan sampah.

g. Sub Fungsi Pertamanan, Ruang Hijau dan Dekorasi Kota

Kebijakan pembangunan sub fungsi pertamanan, ruang hijau dan dekorasi kota diarahkan bagi terciptanya estetika, kenyamanan dan kesehatan lingkungan.

h. Sub Fungsi Perumahan dan Permukiman

Kebijakan pembangunan sub fungsi Perumahan dan Permukiman diarahkan bagi terpenuhinya kebutuhan rumah yang layak huni dan terjangkau.

VI.6.3 Fungsi Lingkungan Hidup

Kebijakan pembangunan fungsi Lingkungan Hidup diarahkan bagi tercapainya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, melalui penegakan hukum secara konsisten.

BAB VII

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

VII.1. Program Pembangunan Daerah

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya daerah baik yang menyangkut aspek administrasi, institusi maupun keuangan. Untuk mewujudkan hal tersebut disusun suatu bentuk perencanaan program dan kegiatan yang terintegrasi antar fungsi yang berkesinambungan dan berkelanjutan melalui penyusunan program yang didasarkan atas fungsi pemerintahan yang diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan yang bersifat indikatif. Hal tersebut dikarenakan banyaknya variabel dan indikator yang tidak mampu diprediksikan sebelumnya mengingat begitu cepatnya perubahan lingkungan internal maupun eksternal yang terjadi.

Untuk mewujudkan visi Kota ” SEMARANG KOTA METROPOLITAN YANG RELIGIUS BERBASIS PERDAGANGAN DAN JASA” maka Program dan kegiatan indikatif pembangunan daerah Kota Semarang yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

VII.1.1 Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang religius melalui peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan, pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat dengan memperbesar akses bagi masyarakat miskin serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

a. Fungsi Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan sumber daya manusia, melalui penyediaan tenaga ahli dan terampil yang mempunyai kemampuan ilmu pengetahuan dan ketrampilan baku, sehingga dapat melakukan adaptasi sesuai dengan tuntutan dan kondisi lapangan kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan ditunjukkan oleh indikator Kesetaraan Fungsional (Buta aksara) yaitu 1.611, Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada masing-masing jenjang pendidikan. APK untuk SD/MI sebesar 102,62 %, SLTP/MTs sebesar 89,94 % dan SMU/SMK/MA sebesar 89,35 %. APM untuk SD/MI sebesar 86,82 %, SLTP/MTs sebesar 67,02 % dan SMU/SMK/MA sebesar 61,77 %.

Pencapaian APM jenjang pendidikan SD termasuk kategori tinggi dibanding APM di sekolah menengah. Hal ini dimungkinkan karena faktor sosial budaya yang menyangkut persepsi orang tua yang sempit sehingga kurang menyadari arti pentingnya pendidikan bagi anak serta faktor ekonomi keluarga yang tergolong kurang mampu, menyebabkan anak usia sekolah menengah tidak bersekolah. Fenomena ini jelas terlihat dari data jumlah siswa putus sekolah (*drop out*) pada tahun 2004 SD/MI 0,10, SLTP/MTs 0,48, SMU/SMK/MA 0,78.

Dalam penyelenggaraan fasilitas pendidikan di kota Semarang baik sekolah negeri maupun swasta tercatat untuk jenjang pendidikan Dasar (SD) sebanyak 738 buah, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebanyak 189 buah, dan Menengah Umum/Kejuruan (SMU/K) 91 buah.

Dari hal tersebut di atas nampak bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan formal pada tiap tingkatan cukup tinggi. Untuk tingkat pendidikan Sekolah menengah jumlah sekolah swasta lebih banyak daripada sekolah negeri. Tetapi dalam penyelenggaraan layanan pendidikan usia dini masih sangat terbatas. Padahal rendahnya pelayanan pendidikan dalam usia dini nantinya akan mempengaruhi dan menghambat pengembangan sumberdaya manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dan strategi pemerataan pendidikan yang tepat untuk mengatasi masalah ketidakmerataan tersebut.

Kualitas pendidikan yang masih relatif rendah sangat berkaitan dengan input, output serta proses pembelajaran, hal ini terlihat pada rasio hasil ujian akhir, penerapan kurikulum yang terlalu padat, terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan (jumlah gedung yang rusak SD/MI 47,77% Ruang Kelas (RK), SLTP/MTs 7,91 % RK, SMU/SMK/MA 5,58 RK), rendahnya kesejahteraan dan kekurangan tenaga kependidikan yang profesional dan sesuai dengan bidang tugasnya. Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan tetapi pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi merupakan cerminan kualitas, sehingga tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.

Fenomena yang terjadi dalam dunia pendidikan adalah rendahnya tingkat relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja.

1) Sub Fungsi Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan pra sekolah dibagi menjadi 2 kategori, yakni pendidikan non formal (play group) dan pendidikan formal (Taman Kanak-kanak). Jumlah lembaga pendidikan pra sekolah pada tahun 2004 sebanyak 665 buah .

Permasalahan sub fungsi pendidikan usia dini adalah :

- a) Beragamnya model dan bentuk pembelajaran pendidikan usia dini yang cenderung membingungkan masyarakat;
- b) Tingginya kesenjangan fasilitas yang ditawarkan,
- c) Belum adanya standar baku pengelolaan pendidikan usia dini.

Sasaran pembangunan sub fungsi pendidikan usia dini adalah :

- a) Terwujudnya penyeragaman model pembelajaran pendidikan pra sekolah (PADU) formal;
- b) Meningkatnya kualitas pendidikan pra sekolah sebagai persiapan siswa memasuki pendidikan dasar.

Arah Kebijakan sub fungsi ini ditujukan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat usia 0 – 6 tahun untuk pengembangan bakat dan pembinaan mental.

Program indikatif Sub fungsi pendidikan usia dini adalah

- a) Peningkatan kualitas pendidikan Pra sekolah;
- b) Fasilitasi sarana prasarana pendidikan pra sekolah.

2) Sub Fungsi Pendidikan Dasar

Kondisi Pendidikan Dasar pada tahun 2004 sebagai berikut : Jumlah angka putus sekolah pada tahun 2004 SD/MI sebanyak 0,10 %, jumlah SD/MI 750 buah dan jumlah SD/MI 738 buah yang baik 52,23% RK, rusak berat 24,02% RK, rusak ringan/sedang 23,73% RK. Jumlah angka putus sekolah SLTP/MTs 0,48%. Jumlah SLTP/MTs 187 buah, yang baik 92,09 % RK buah yang rusak berat 1,37% RK, rusak ringan/sedang 4,48% RK.

Permasalahan sub fungsi pendidikan dasar adalah

- a) Belum optimalnya pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas);
- b) Belum optimalnya manajemen dan kemandirian Institusi pendidikan;
- c) Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan baik secara kuantitas maupun kualitas;
- d) Rendahnya kualitas program pendidikan.

Sasaran pembangunan sub fungsi pendidikan dasar adalah :

- a) Mewujudkan keberhasilan pelaksanaan Wajar Dikdas 100 % ;
- b) Meningkatkan pengelolaan dan kemandirian Institusi pendidikan;
- c) Meningkatkan sarana prasarana sekolah;
- d) Meningkatkan kualitas pendidikan.

Arah kebijakan sub fungsi ini ditujukan pada pemberian hak dasar pelayanan pendidikan yang bermutu, melalui pendidikan wajar 9 tahun, peningkatan kualitas pendidikan, dan peningkatan penyelenggaraan pendidikan melalui manajemen terpadu.

Program indikatif sub fungsi pendidikan dasar adalah :

- a) Pemerataan jangkauan dan daya tampung pendidikan dasar;
- b) Peningkatan kualitas tenaga pendidikan;
- c) Peningkatan kualitas manajemen pendidikan dasar;
- d) Peningkatan sarana dan prasarana sekolah Dasar.

3) Sub Fungsi Pendidikan Menengah

Jumlah angka putus sekolah (DO) SMU/SMK/MA pada tahun 2004 adalah 0,78%. Jumlah SMU 139 buah, MA 44 buah, SMK 341 buah. Kondisi Gedung sekolah yang baik 94,42 RK, rusak berat 1,1 RK, dan rusak ringan/sedang 4,48 RK.

Permasalahan sub fungsi pendidikan menengah adalah :

- a) Kurangnya pemerataan pelayanan pendidikan terutama untuk anak dari keluarga miskin;

- b) Lemahnya pengelolaan pendidikan menengah;
- c) Rendahnya kualitas pendidikan;
- d) Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan baik secara kuantitas maupun kualitas;
- e) Kurangnya relevansi pendidikan formal dan non formal dengan pasar kerja.

Sasaran pembangunan sub fungsi pendidikan Menengah adalah :

- a) Memperluas jangkauan dan kesempatan bagi anak usia sekolah untuk melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan menengah terutama bagi keluarga miskin;
- b) Optimalnya manajemen pengelolaan pendidikan menengah;
- c) Meningkatkan kualitas pendidikan yang sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional;
- d) Terpenuhinya sarana prasarana sekolah yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan menengah;
- e) Meningkatnya kualitas pendidikan menengah yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Arah Kebijakan sub fungsi ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, agar mampu bersaing dalam era globalisasi.

Program indikatif sub fungsi pendidikan Menengah adalah :

- a) Pemerataan jangkauan dan daya tampung pendidikan menengah;
- b) Peningkatan kualitas tenaga pendidikan;
- c) Peningkatan manajemen berbasis sekolah;
- d) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.

4) Sub Fungsi Pendidikan Luar Sekolah

Pendidikan luar sekolah mempunyai peranan yang cukup strategis dalam meningkatkan kualitas Sumberdaya manusia khususnya kemampuan teknis dan ketrampilan. Lembaga pendidikan luar sekolah di Kota Semarang terdiri dari Kejar Paket C sebanyak 13 buah, Kursus-kursus

sebanyak 287 buah, PKBM sebanyak 7 buah dan 1 Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Permasalahan Sub fungsi pendidikan luar sekolah adalah :

- a) Rendahnya perhatian dan keinginan masyarakat terhadap pendidikan luar sekolah;
- b) Penyelenggaraan pendidikan luar sekolah masih belum sesuai dengan harapan karena terbatasnya sarana prasarana
- c) Belum adanya standar kualitas yang sama dari masing-masing lembaga penyelenggara pendidikan Luar sekolah.

Sasaran pembangunan Sub Fungsi pendidikan Luar Sekolah adalah :

- a) Menyediakan pelayanan pendidikan alternatif bagi yang tidak atau belum memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan formal;
- b) Memberikan pengetahuan dasar dan ketrampilan berusaha secara profesional;
- c) Meningkatkan kualitas pendidikan luar sekolah sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Arah Kebijakan sub fungsi ini diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan dan ketrampilan tenaga kerja, melalui pengembangan model-model pendidikan luar sekolah yang aplikatif.

Program indikatif Sub fungsi pendidikan Luar Sekolah adalah :

- a) Peningkatan kualitas peserta didik lembaga pendidikan non formal;
- b) Peningkatan kualitas lembaga pendidikan non formal;
- c) Peningkatan kualitas tenaga pendidik non formal.

b. Fungsi Kesehatan

Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan dibutuhkan perubahan dari paradigma sakit ke paradigma sehat, sejalan dengan visi Indonesia Sehat 2010.

Penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan di Kota Semarang hal ini disebabkan masih ditemukannya beberapa kasus penyakit menular dan bahkan mengalami peningkatan jumlahnya dari tahun ke tahun adapun beberapa penyakit menular tersebut diantaranya jumlah penderita DBD mengalami peningkatan dari 1.128 kasus di tahun 2003 menjadi 1.621 kasus di tahun 2004, jumlah penderita TB Paru BTA (+) mengalami peningkatan dari 254 di tahun 2003 menjadi 558 di tahun 2004, jumlah HIV mengalami peningkatan dari 13 kasus di tahun 2003 menjadi 20 kasus di tahun 2004, jumlah AIDS mengalami peningkatan dari 1 kasus di tahun 2003 menjadi 7 di tahun 2004.

Beberapa penyakit tidak menular juga terjadi peningkatan jumlahnya diantaranya adalah jumlah penderita DM mengalami peningkatan dari 2.880 kasus di tahun 2003 menjadi 4.696 kasus di tahun 2004, jumlah penderita hipertensi mengalami peningkatan dari 1.450 kasus di tahun 2003 menjadi 1.851 kasus di tahun 2004, jumlah penderita stroke mengalami peningkatan dari 12.129 kasus di tahun 2003 menjadi 26.198 kasus di tahun 2004, jumlah penderita Ca Cervik mengalami peningkatan dari 14.463 kasus di tahun 2003 menjadi 29.841 kasus di tahun 2004, jumlah penderita penyalit lainnya (Ca mammae, Ca hepar, Ca paru) juga mengalami peningkatan.

Perilaku masyarakat dikaitkan dengan penyakit DBD yang merupakan penyakit endemis di Kota Semarang terlihat dalam angka bebas jentik. Tahun 2004 ABJ Kota Semarang tercatat sebesar 85,96% masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan target provinsi dan target nasional sebesar 95%. Melihat ABJ tersebut dapat dikatakan bahwa peran serta masyarakat dalam hal pemberantasan sarang nyamuk masih kurang. Untuk menurunkan angka kesakitan DBD maka mulai tahun 2004 dilakukan upaya PSN yang melibatkan anak sekolah dengan harapan anak-anak dapat mengingatkan orang tua atau keluarga dalam pelaksanaan PSN di rumah.

Permasalahan fungsi Kesehatan adalah :

- 1) Terjadinya perubahan penyakit karena transisi demografi dan epidemiologi serta adanya *new emerging disease*;
- 2) Belum optimalnya mutu pelayanan kesehatan;
- 3) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan;
- 4) Terbatasnya pembiayaan kesehatan;

- 5) Adanya sumberdaya kesehatan dan potensi daerah yang belum optimal diberdayakan;
- 6) Terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan.

Sasaran fungsi kesehatan adalah :

- 1) Menurunnya angka kematian ibu sebesar 40/100.000 kelahiran hidup
- 2) Menurunnya angka kematian bayi 10/1000 kelahiran hidup
- 3) Menurunnya status gizi buruk 0,48 %
- 4) Mempertahankan umur harapan hidup diatas 70 tahun;
- 5) Meningkatnya jangkauan pelayanan kesehatan
- 6) Meningkatnya pengawasan obat dan makanan
- 7) Meningkatnya ketersediaan obat yang bermutu, aman dan efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Arah Kebijakan fungsi ini diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya-upaya di bidang kesehatan.

Program indikatif fungsi Kesehatan adalah

- 1) Pelayanan Kesehatan masyarakat
- 2) Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
- 3) Pencegahan dan pemberantasan penyakit;
- 4) Lingkungan sehat;
- 5) Pemberdayaan masyarakat;
- 6) Manajemen kesehatan dan perijinan;
- 7) Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan;
- 8) Obat dan perbekalan kesehatan.

VII.1.2 Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, kemandirian keuangan daerah, pengembangan profesionalisme aparatur serta didukung oleh infrastruktur pemerintahan yang berbasis teknologi.

FUNGSI PELAYANAN UMUM

a. Sub Fungsi Pelayanan Umum

Kinerja pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat dapat diukur dari kinerja pelayanan publik.

Kondisi masa lalu masih menunjukkan adanya banyak kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, seperti diskriminasi pelayanan, tumpang tindih perijinan, prosedur yang berbelit maupun keterbatasan cakupan layanan. Setelah era reformasi, penyelenggaraan pelayanan umum semakin mendapat perhatian dalam pelaksanaan pembangunan.

Permasalahan mendasar dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kota Semarang terutama pada pelayanan umum adalah :

- 1) Diskriminasi pelayanan;
- 2) Tumpang tindih perijinan;
- 3) Prosedur yang berbelit;
- 4) Keterbatasan cakupan layanan.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan sub fungsi pelayanan umum adalah :

- 1) Terwujudnya pelayanan publik yang prima dalam *one stop services* kepada masyarakat sesuai dengan SPM;
- 2) Terlaksananya mutu pelayanan publik melalui deregulasi dan debirokratisasi pelayanan serta sertifikasi ISO (International Standard Operation),
- 3) Meningkatnya kualitas pelaksanaan pelayanan umum disemua jenjang sampai di tingkat kelurahan, meningkatnya efektivitas, efisiensi dan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum dan pembangunan di tingkat kelurahan.
- 4) Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam pembangunan.

Arah Kebijakan pembangunan sub fungsi pelayanan umum diarahkan pada peningkatan kapasitas lembaga/institusi pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan didukung kelembagaan yang efisien dan efektif serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Program indikatif sub fungsi pelayanan umum mencakup:

- 1) Peningkatan pelayanan publik,
- 2) Peningkatan kapasitas kelembagaan,
- 3) Peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan,
- 4) Peningkatan kerjasama,
- 5) Pembangunan wilayah,
- 6) Peningkatan pelayanan umum pemerintahan wilayah.

b. Sub Fungsi Sumberdaya Aparatur

Dengan berlakunya otonomi daerah terdapat pelimpahan pegawai dari instansi vertikal sehingga sampai dengan tahun 2005 jumlah pegawai sebanyak 15.044 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 2.653 Tenaga Pegawai Harian Lepas (TPHL). Pada satu sisi jumlah pegawai yang besar tersebut merupakan aset namun pada sisi lain apabila tidak dapat dioptimalkan akan merupakan beban bagi pemerintah daerah.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Semarang pada sub fungsi sumberdaya aparatur adalah :

- 1) Masih rendahnya kinerja sumberdaya aparatur,
- 2) Belum pastinya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan;
- 3) Belum diterapkannya analisis jabatan;
- 4) Belum jelasnya standar kemampuan dan pengembangan pola karier pegawai;
- 5) Belum proporsionalnya beban kerja aparatur pemerintah.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan sub fungsi sumberdaya aparatur adalah :

- 1) Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur;

- 2) Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan meningkatnya responsifitas aparatur pemerintah terhadap tuntutan masyarakat;
- 3) Meningkatnya kinerja pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- 4) Mewujudkan standar kemampuan kepegawaian pada masing-masing jenjang.

Arah kebijakan pembangunan sub fungsi sumberdaya aparatur diarahkan pada peningkatan aparatur pemerintah agar mampu mengakomodasi tuntutan aspirasi masyarakat.

Program indikatif sub fungsi sumberdaya aparatur adalah :

- 1) Pengembangan kualitas aparatur;
- 2) Peningkatan manajemen kepegawaian;
- 3) Pengawasan fungsional;

c. Sub Fungsi Kapasitas Keuangan Daerah

Selama empat tahun terakhir penerimaan keuangan daerah mengalami kenaikan rata-rata sebesar 14,98 %, pada tahun 2001 penerimaan sebesar Rp 448,6 milyar yang berasal dari PAD sebesar RP 85,52 milyar atau sebesar 19,06 % dan pada tahun 2004 jumlah penerimaan daerah mencapai Rp. 669,16 milyar yang berasal dari PAD sebesar 155,62 milyar atau sebesar 23,28%, sedangkan penerimaan yang berasal dari dana perimbangan pada tahun 2001 sebesar Rp. 313,86 milyar dan pada tahun 2004 sebesar Rp. 516,9 milyar. Hal ini menunjukkan masih rendahnya ratio kemandirian keuangan daerah yaitu sebesar rata-rata 24,2%.

Prosentase perhitungan belanja pembangunan terhadap anggaran pada tahun 2000 adalah sebesar 78,11%, tahun 2001 sebesar 27,68%. Sedangkan kenaikan Perhitungan Belanja Pembangunan pada tahun 2001 adalah sebesar 30,16%.

Rincian perhitungan anggaran belanja setelah perubahan sistem (Tahun 2002 – 2004) terdiri dari Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan Publik. Pada tahun 2002 prosentase Perhitungan Belanja Aparatur Daerah terhadap anggaran adalah sebesar 98,43 %, tahun 2003 sebesar 96,17 % dan sampai dengan tahun 2004 mencapai 66,94 % dari target satu tahun. Sedangkan

prosentase Perhitungan Belanja Pelayanan Publik terhadap anggaran pada tahun 2002 adalah sebesar 98,80 %, tahun 2003 sebesar 82,92 %.

Apabila dibandingkan dengan PDRB Kota Semarang penerimaan keuangan daerah hanya mencapai rata-rata sebesar 3,25 % per tahun.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Semarang pada sub fungsi kapasitas keuangan daerah adalah :

- 1) Masih besarnya ketergantungan penerimaan keuangan daerah yang berasal dari dana perimbangan;
- 2) Belum seimbang proporsi pengeluaran daerah untuk biaya tidak langsung dibanding dengan biaya langsung;
- 3) Belum optimalnya penggalan potensi pendapatan daerah

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan sub fungsi kapasitas keuangan daerah :

- 1) Meningkatnya PADS rata-rata 15 %/tahun;
- 2) Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel;
- 3) Mengembangkan sumber-sumber penerimaan daerah

Arah Kebijakan Pembangunan sub fungsi kapasitas keuangan daerah diarahkan pada penggalan sumber-sumber pendapatan untuk meningkatkan pendapatan daerah serta terwujudnya pengelolaan keuangan daerah secara optimal, efektif, efisien, sistematis dan akuntabel dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Program indikatif sub fungsi kapasitas keuangan daerah adalah:

- 1) Peningkatan pendapatan daerah;
- 2) Pengelolaan keuangan daerah.

d. Sub Fungsi Infrastruktur Pemerintah

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan mencakup berbagai jenis pelayanan yang diberikan, diantaranya adalah kegiatan pencatatan, pelayanan surat-menyurat dan penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi maupun kegiatan tata usaha lainnya. Kegiatan pelayanan administrasi

pemerintahan menghasilkan beberapa produk akhir yang berupa dokumen, seperti sertifikasi, perizinan, rekomendasi, keterangan tertulis dan lain-lain. Produk administrasi pemerintahan diantaranya adalah Pelayanan Sertifikat Tanah, Pelayanan IMB, HO, Pelayanan Administrasi Kependudukan (KTP, Nikah Talak Cerai Rujuk(NTCR), Akte Kelahiran/Kematian), Pelayanan usaha perdagangan, pariwisata, kesehatan dan lain-lain.

Kondisi infrastruktur pemerintahan masih belum optimal dalam mendukung pelayanan publik atau E-Government belum diimplementasikan secara optimal.

Permasalahan sub fungsi infrastruktur pemerintah adalah belum memadainya sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan di setiap unit kerja untuk dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan sub fungsi infrastruktur pemerintah adalah :

- 1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan,
- 2) Tersedianya data yang dapat diakses secara cepat, murah dan akurat

Arah Kebijakan Pembangunan sub fungsi infrakstruktur pemerintah diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Program indikatif sub fungsi infrastruktur pemerintah adalah :

- 1) Pengembangan SIMDA (E-Gov)
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan.

e. Sub Fungsi Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut perubahan sikap dan perilaku agar tidak menjadi korban perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti memunculkan kesenjangan arus globalisasi yang berdampak pada perubahan paradigma sistem dan mekanisme pemerintahan, institusi dan

aparatur harus semakin tanggap dan mampu dalam menyiapkan dan mengaplikasi berbagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta hasil-hasil penelitian demi kesejahteraan manusia.

Permasalahan strategis daerah belum diatasi dengan perencanaan pembangunan yang mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Permasalahan Sub fungsi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah masih rendahnya kualitas dan kuantitas kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang Iptek baik pengetahuan dasar, terapan maupun teknologi sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan pengguna.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan sub fungsi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah :

- 1) Meningkatnya jumlah kajian dan terapan IPTEK yang tepat guna dan berdayaguna;
- 2) Mewujudkan dokumen perencanaan atau pedoman kegiatan pembangunan daerah;
- 3) Mengembangkan sistem dokumentasi perencanaan pembangunan

Arah Kebijakan pembangunan sub fungsi pengembangan IPTEK diarahkan pada peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas dan kuantitas hasil penelitian dan pendataan guna menunjang perencanaan dan pembangunan daerah.

Program indikatif sub fungsi pengembangan IPTEK adalah

- 1) Penelitian dan pengembangan;
- 2) Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan;
- 3) Pengembangan Dokumentasi dan Arsip Daerah.

VII.1.3 Memantapkan perwujudan tatanan kehidupan politik, sosial dan budaya yang demokratis serta memperkuat ketertiban dan keamanan yang kondusif melalui upaya penegakkan hukum dan peraturan, pengembangan budaya tertib dan disiplin serta menjunjung tinggi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

FUNGSI KETERTIBAN

Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Kota Semarang menyimpan berbagai potensi gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban yang diakibatkan oleh kondisi sosial di Kota Semarang. Oleh karena itu pembangunan harus mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bela negara dan berbagai gangguan kamtibmas yang mungkin terjadi; mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengetahui, memahami dan mentaati berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan mampu menjawab tantangan untuk dapat meningkatkan stabilitas politik dan kesadaran politik masyarakat dalam kegiatan pemerintahan maupun pembangunan sesuai dengan tuntutan demokratisasi dan transparansi pemerintahan dalam mewujudkan good government dan good governance, sehingga kegiatan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan.

a. Sub Fungsi Politik

Partisipasi masyarakat dalam mengikuti pesta demokrasi pemilu tahun 2004 menunjukkan prosentase diatas rata-rata tingkat nasional. Pada Pemilu Legislatif tahun 2004 jumlah pemilih yang menggunakan haknya mencapai 83,28 persen, pada Pemilu Presiden Putaran I sebesar 78,70 persen, dan pada Pemilu Presiden Putaran II sebesar 78,70 persen.

Penurunan peserta pemilu tersebut bukan dikarenakan banyaknya pemilih yang Golput, tetapi disebabkan adanya Pemilih yang menggunakan haknya diluar kota Semarang

Pada Pilkada Kota Semarang tahun 2005 jumlah pemilih sebanyak 997.200 pemilih dan yang menggunakan hak pilihnya sebesar 664.897 pemilih.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat yang ditandai dengan banyaknya unjuk rasa, pada tahun 2002 sebanyak 69 kasus dan pada tahun 2004 70 kasus.

Permasalahan yang dihadapi dalam sub fungsi politik adalah

- 1) Menurunnya partisipasi masyarakat dalam pemilu;
- 2) Kurang efektifnya pelaksanaan sistem politik yang demokratis;
- 3) Kurang tuntasnya penyelesaian tuntutan masyarakat terhadap peran lembaga legislatif;
- 4) Kurang efektifnya pendidikan politik masyarakat

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan sub fungsi politik adalah :

- 1) Meningkatkan kesadaran politik masyarakat terhadap hak dan kewajibannya;
- 2) Mewujudkan pelaksanaan sistem politik yang demokratis;
- 3) Meningkatkan efektifitas peran dan fungsi lembaga legislatif;
- 4) Meminimalisasi dampak negatif perbedaan pendapat dan pandangan antar golongan dan partai politik yang menjurus tindakan anarkhis di masyarakat;
- 5) Mempertahankan iklim politik yang kondusif 100 %

Arah **Kebijakan** sub fungsi ini diarahkan pada upaya meningkatkan iklim politik yang kondusif dan stabilitas politik daerah guna mendukung terselenggaranya pembangunan daerah secara dinamis.

Program indikatif sub fungsi politik adalah :

- 1) Pengembangan pendidikan politik rakyat;
- 2) Pengembangan kesadaran berbangsa dan bernegara.
- 3) Pengembangan pengawasan legislasi dan penganggaran

b. Sub Fungsi Ketertiban dan Keamanan

Penyelenggara pemerintahan menggunakan ketertiban dan keamanan masyarakat sebagai salah satu prasyarat utama untuk keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Pada era reformasi cenderung terjadi peningkatan gangguan kriminalitas sebagai akibat tingginya angka pengangguran, kemiskinan dan faktor ekonomi lainnya hal ini terlihat pada jumlah kriminalitas di kota Semarang pada tahun 2004 tercatat sebanyak 217 kasus, jumlah kasus pertikaian antar warga sebanyak 4 kasus yang terdiri dari 1

kasus pertikaian antar wilayah/kampung dan 3 kasus pertikaian antar pelajar. Sedangkan kasus unjuk rasa yang berkaitan dengan bidang politik sebanyak 70 kasus dan bidang ekonomi sebanyak 63 kasus. serta jumlah kasus pemogokan kerja sebanyak 16 kasus.

Adanya bencana khususnya bencana kebakaran dapat menimbulkan kerugian tidak saja korban manusia, harta benda tetapi juga terganggunya arus lalu lintas, proses produksi barang dan jasa, kerusakan lingkungan, pengangguran dan terganggunya ketenangan masyarakat. Data kejadian kebakaran menunjukkan adanya kenaikan kasus kebakaran dan angka kerugian yang meningkat dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004. Tahun 2000 terjadi 170 kasus kebakaran dengan angka kerugian mencapai Rp. 15.525.440.000,-, sedangkan tahun 2004 terjadi 191 kasus kebakaran dengan angka kerugian mencapai Rp. 33.477.770.000,-. Untuk menanggulangi kebakaran diperlukan sarana dan prasarana yang cukup memadai sehingga dapat mengurangi korban manusia serta kerugian material.

Permasalahan yang dihadapi sub ketertiban dan keamanan adalah :

- 1) Kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Perundangan;
- 2) Kurang optimalnya partisipasi masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban lingkungan;
- 3) Kurangnya responsifitas penanganan masalah ketentraman dan ketertiban serta bencana;
- 4) Kurangnya sarana prasarana penunjang kegiatan penanggulangan bencana.
- 5) Potensi timbulnya tingkat kerawanan akibat kondisi perekonomian yang tidak stabil.
- 6) Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM dalam penanggulangan bencana.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan sub fungsi ketertiban dan keamanan adalah

- 1) Meminimalisasi kejadian kerusuhan: kerusuhan antar kampung, kerusuhan SARA dan tawuran remaja;
- 2) Meningkatnya penanganan masalah ketentraman dan ketertiban serta bencana;

- 3) Mengurangi angka kerugian dan meningkatnya aset yang dapat diselamatkan akibat kebakaran dan bencana lainnya;
- 4) Terwujudnya rasa aman dan nyaman di lingkungan masyarakat.

Arah Kebijakan pembangunan sub fungsi ini diarahkan pada upaya menciptakan lingkungan yang aman dan tertib serta antisipatif terhadap munculnya kerawanan-kerawanan sosial, politik, ekonomi dan bencana yang dapat meresahkan masyarakat.

Program indikatif sub fungsi ketertiban dan keamanan adalah

- 1) Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat terhadap Gangguan Tramtibmas dan terjadinya Bencana;
- 2) Peningkatan kesadaran bina lingkungan;
- 3) Peningkatan sarana dan prasarana ketertiban dan keamanan;
- 4) Peningkatan penanggulangan bencana.

c. Sub Fungsi Hukum

Selama lima tahun terakhir telah ditetapkan 65 Peraturan Daerah, 1.615 Keputusan Walikota dan 121 Keputusan DPRD. Dari 85 Perda 59 buah merupakan Peraturan Daerah baru dan 6 buah merupakan revisi Peraturan Daerah lama yang tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Permasalahan hukum yang menyangkut pelanggaran hukum perdata sedikit mengalami peningkatan, pada tahun 2002 jumlah kasus sebanyak 1 dan pada tahun 2004 meningkat menjadi 2 kasus.

Operasi yustisi yang dilaksanakan pada tahun 2000 sebanyak 104 kali dengan jumlah pelanggaran tertangani sebanyak 614 kasus dan pada tahun 2004 dilaksanakan 582 kali operasi yustisi dengan 7.600 kasus yang ditangani.

Tuntutan masyarakat untuk membentuk tata peraturan daerah yang baik, perlu diikuti dengan penyusunan dan penyempurnaan produk-produk hukum daerah dalam rangka meningkatkan jaminan, kepastian, rasa keadilan dan perlindungan hukum.

Permasalahan yang dihadapi dalam sub fungsi hukum adalah

- 1) Belum memadainya produk hukum yang dimiliki untuk mendukung implementasi penyelenggaraan pemerintahan;
- 2) Kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan oleh aparatur dan masyarakat;
- 3) Lemahnya penegakan hukum dan HAM oleh aparatur dan masyarakat;
- 4) Kurangnya pembelaan dan pelayanan dalam perlakuan hukum yang adil;
- 5) Lemahnya mentalitas aparatur dalam penegakan hukum dan HAM.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan sub fungsi hukum adalah

- 1) Meningkatnya produk-produk hukum daerah dan peninjauan kembali perda-perda yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini;
- 2) Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum bagi aparatur serta masyarakat (menurunnya jumlah pelanggaran perda 10 % per tahun);
- 3) Meningkatnya penegakan hukum dan HAM secara tegas berdasarkan asas keadilan (meningkatnya jumlah kasus yang ditangani).

Arah Kebijakan pembangunan ini diarahkan pada upaya menciptakan Sistem hukum yang mampu memberikan jaminan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Program indikatif sub fungsi hukum adalah :

- 1) Penegakan hukum dan HAM;
- 2) Peningkatan pelayanan, bantuan Hukum dan pengembangan tertib hukum;
- 3) Peningkatan penyusunan dan penyempurnaan perundangan daerah,

d. Sub Fungsi Komunikasi

Pengembangan komunikasi dua arah antara masyarakat dapat dilihat dari jumlah dialog interaktif antara pemerintah dan masyarakat, jumlah informasi yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah baik secara langsung maupun melalui mass media. Dialog interaktif antara Pemerintah dengan masyarakat melalui media elektronik sebanyak 73 kali. Pertemuan langsung dengan masyarakat yang diikuti oleh 4.750 orang sebanyak 38 kali dan Komunikasi melalui telephon dari dan ke Pemerintah Kota yang

menghasilkan perbandingan 1 : 8 untuk incoming call dan 1:5 untuk out going call melalui 18 line.

Pertumbuhan mass media, pada tahun 2000 terbit 15 surat kabar, 20 radio dan 1 stasiun TV, tahun 2004 menjadi 18 surat kabar, 25 radio dan 3 Stasiun TV.

Permasalahan yang dihadapi dalam sub fungsi komunikasi adalah :

- 1) Kurang transparannya informasi serta pemberitaan yang lengkap, obyektif dan bertanggungjawab;
- 2) Lemahnya mekanisme kontrol sosial masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
- 3) Masih lemahnya jalinan komunikasi antara pemerintah, media massa dan masyarakat;
- 4) Kurang tersedianya data base informasi;
- 5) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyebaran informasi secara tepat guna;
- 6) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan media pemerintah;
- 7) Kurangnya keseimbangan dalam mendukung perkembangan masyarakat yang informatif, kritis dan demokratis.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan sub fungsi komunikasi adalah :

- 1) Meningkatnya transparansi informasi penyelenggaraan pemerintahan kota.
- 2) Meningkatnya Pelayanan kehumasan dan jalinan kemitraan dengan media.
- 3) Meningkatnya pelaksanaan dokumentasi dan Publikasi.
- 4) Meningkatnya respon masyarakat terhadap informasi kebijakan Pemerintah Kota.
- 5) Meningkatnya penyebaran informasi, penyaluran aspirasi, dialog interaktif dan jaringan komunikasi.
- 6) Tersedianya data base informasi yang mudah diakses.

Arah Kebijakan pembangunan sub fungsi ini diarahkan pada upaya peningkatan proses komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat secara optimal, sehingga terwujud transparansi informasi dan membentuk masyarakat yang responsif terhadap pembangunan.

Program indikatif kegiatan sub fungsi Komunikasi adalah :

- 1) Pengembangan Komunikasi dan Keterbukaan Informasi;
- 2) Pengembangan data dan informasi;
- 3) Pengembangan jaringan komunikasi.

VII.1.4 Memantapkan kinerja pertumbuhan ekonomi kota secara terpadu dan sinergi diantara para pelaku ekonomi yang berbasis pada perdagangan dan jasa, mendorong kemudahan ber-investasi, penguatan dan perluasan jaringan kerjasama ekonomi lokal, regional dan internasional.

FUNGSI EKONOMI

Pembangunan yang dilaksanakan di daerah secara umum ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat ditunjukkan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang berdasarkan harga konstan 1993, tahun 2000 sebesar 4,97 % , tahun 2001 sebesar 5,11 %, tahun 2002 sebesar 4,10 %, pada tahun 2003 naik menjadi 5,06 % dan pada tahun 2004 menjadi 5,72 %. Pertumbuhan ekonomi tersebut walaupun belum dapat menyamai pertumbuhan ekonomi sebelum terjadinya krisis ekonomi yakni sebesar 18,7 %.

Pertumbuhan ekonomi disamping dapat berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita pada akhirnya juga akan berpengaruh pada pendapatan daerah. Semakin mampu menggali potensi ekonomi yang ada, akan semakin besar PDRB dan PAD-nya.

Begitu pula dengan kenaikan pendapatan perkapita penduduk pada tahun 2003 sebesar 3,11 %, tahun 2004 menjadi 3,95 % atau hanya mengalami pertumbuhan 0,84 % pertahun.

Laju inflasi untuk masing-masing kelompok pengeluaran konsumsi sebagai berikut : tahun 2003 adalah pada Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga sebesar 21,63 %, Kelompok perumahan sebesar 11,07 %,

Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau sebesar 5,35 %, kelompok Sandang sebesar 2,38 %, kelompok transport dan komunikasi sebesar 1,58 % dan kelompok kesehatan sebesar 1,56 %. Untuk kelompok bahan makanan mengalami deflasi sebesar - 1,25 %.

a. Sub Fungsi Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan

Pertanian yang terdiri dari tanaman pangan (padi, dan palawija) dan hortikultura. Tanaman perkebunan dan kehutanan terdiri dari empon-empon dan tanaman kayuan (mahoni, jati). Peternakan dengan komoditas daging, telur, susu.

Pada sub sektor tanaman pangan, produksi tanaman pangan selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan 12,34 %. Produksi tanaman buah rambutan mengalami kenaikan 1.088,96 %. Untuk tanaman hias anggrek dan non anggrek mengalami lonjakan 482,22 %.

Pada sub sektor perkebunan dan kehutanan selama 5 tahun terakhir mengalami kenaikan pada produksi empon - empon 47,79 %. Sementara tanaman kayuan (mahoni dan jati) mengalami kenaikan populasi dalam rangka penanganan lahan kritis.

Pada sub sektor peternakan, produksi telur, daging dan susu segar mengalami kenaikan 25,45 %.

Pada sub sektor perikanan, areal tambak selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan 5 % yaitu tahun 2000 seluas 1.245 Ha menjadi 970 Ha tahun 2004.

Kolam budidaya air tawar dan perairan umum mengalami peningkatan 3 % yaitu tahun 2000 seluas 327 Ha menjadi 340 Ha tahun 2004.

Permasalahan pada sub fungsi pertanian adalah

- 1) Rendahnya pendapatan petani dan nelayan;
- 2) Lahan pertanian subur yang semakin menyempit;
- 3) Pendangkalan Areal pantai dan laut yang diakibatkan reklamasi, abrasi dan sedimentasi pantai;
- 4) Penurunan produktivitas hasil pertanian dan tangkapan ikan;
- 5) Terbatasnya akses permodalan bagi petani dan nelayan;
- 6) Belum berkembangnya pengolahan hasil-hasil pertanian menjadi produk olahan;

- 7) Berubahnya kondisi fisik pantai dan laut akibat reklamasi, abrasi dan sedimentasi pantai;
- 8) Kurang terpantaunya peredaran produk pertanian yang tidak memenuhi standar kesehatan dan kaidah agama.

Sasaran yang akan dicapai pada sub fungsi ini adalah :

- 1) Meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan, peternakan dan perkebunan dan kehutanan rata-rata 3 % setiap tahun;
- 2) Meningkatkan produksi perikanan darat rata-rata 3 % setiap tahun dan perikanan laut rata-rata 2 % tiap tahun;
- 3) Mewujudkan sentra-sentra home industri pengolahan ikan 3 unit;
- 4) Meningkatkan keragaman produksi & konsumsi pangan masyarakat 5%;
- 5) Meningkatkan penanganan rehabilitasi dan konservasi lahan kritis 10 %;
- 6) Meningkatkan penanganan rehabilitasi dan konservasi kawasan pantai rata-rata 2 % tiap tahun;
- 7) Meningkatkan areal perikanan air tawar rata-rata 3 % tiap tahun;
- 8) Meningkatkan jumlah kelompok agribisnis 5 %;
- 9) Meningkatkan pendapatan petani tambak 10 %, petani air tawar 20 %, Nelayan 3 %;
- 10) Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran produk-produk pertanian yang sesuai dengan standar kesehatan dan kaidah agama.

Arah Kebijakan sub fungsi pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan adalah peningkatan pemanfaatan sumberdaya pertanian secara optimal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan melalui peningkatan kualitas SDM Pertanian, pengelolaan potensi kelautan secara optimal dan pengembangan perikanan.

Program indikatif pada sub fungsi pertanian kehutanan, perikanan dan kelautan adalah:

- 1) Peningkatan Ketahanan Pangan;
- 2) Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri;
- 3) Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan;
- 4) Pengembangan Sumberdaya Perikanan;
- 5) Peningkatan Sarana dan Prasarana.

b. Sub Fungsi Perdagangan dan Jasa

Sebagai sektor basis yang diharapkan dapat menjadi tulang punggung bergerakaknya perekonomian kota, peningkatan fungsi perdagangan dan jasa merupakan prioritas yang perlu dioptimalkan. Perkembangan nilai ekspor dari tahun 2000 sampai tahun 2001 mengalami penurunan, namun pada tahun 2002 sudah mulai ada peningkatan. Pada tahun 2001 sebesar US\$ 358.584.964, tahun 2003 naik menjadi sebesar US\$ 401.636.950,55. Untuk komoditas impor, selama lima tahun terakhir menunjukkan penurunan, pada tahun 2000 sebesar US\$ 30.771.790,49 menjadi US\$ 2.219.357,23 pada tahun 2004. distribusi barang tidak mengalami hambatan yang berarti, hal ini dapat dilihat pada lima tahun terakhir belum pernah terjadi kelangkaan bahan pokok kebutuhan masyarakat. Kelancaran distribusi bahan pokok tersebut didukung oleh kelancaran arus lalu lintas dan sarana perdagangan yang semakin baik. Pada tahun 2000 jumlah pasar sebanyak 44 buah, sampai dengan tahun 2004, jumlah pasar sebanyak 46 buah dan jumlah ruko sebanyak 72 lokasi.

Permasalahan sub fungsi perdagangan dan jasa adalah

- 1) Lemahnya daya saing produk-produk lokal, akses pasar baik regional maupun internasional;
- 2) Terbatasnya jaringan pasar;
- 3) Ketergantungan terhadap bahan baku impor;
- 4) Lemahnya akses permodalan dan sistem distribusi yang terlalu panjang;
- 5) Menurunnya kualitas sarana dan prasarana pendukung sistem distribusi barang;
- 6) Kurangnya informasi tentang sumberdaya dan ekonomi yang bisa didapatkan oleh calon investor;
- 7) Terbatasnya kemampuan kesiapan pengusaha kecil dan menengah dalam mengantisipasi era globalisasi.

Sasaran pembangunan perdagangan dan jasa adalah :

- 1) Meningkatkan arus distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dengan peningkatan surplus kebutuhan bahan pokok rata-rata 10 % setiap tahun;

- 2) Meningkatkan ekspor komoditi non migas rata-rata sebesar 7 % tiap tahun;
- 3) Memperkuat permodalan dengan peningkatan permodalan Industri Kecil dan Menengah dan jasa perdagangan sebesar 5 % per tahun;
- 4) Memperpendek jalur distribusi barang kebutuhan pokok dari produsen langsung kepada pengecer dan atau konsumen;
- 5) Meningkatkan skala pelayanan perpasaran 8 %;
- 6) Meningkatkan Penataan kawasan perdagangan dan jasa rata-rata 10 %.

Arah Kebijakan sub fungsi perdagangan dan jasa adalah tersedianya barang kebutuhan pokok dan jasa yang terjangkau daya beli masyarakat, pengembangan perdagangan dan jasa sebagai lapangan usaha masyarakat melalui pengembangan potensi sumberdaya perdagangan dan jasa, peningkatan ekspor dan pengembangan regulasi usaha.

Program indikatif sub fungsi perdagangan dan jasa adalah

- 1) Pengembangan produk unggulan;
- 2) Pengembangan potensi sumber daya perdagangan dan jasa;
- 3) Perlindungan konsumen;
- 4) Peningkatan ekspor;
- 5) Pengembangan regulasi usaha;
- 6) Peningkatan Sarana Prasarana Perdagangan dan Jasa.

c. Sub Fungsi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)

Perkembangan usaha kecil menengah dan koperasi memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Peranan koperasi sebagai sokoguru perekonomian dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah terbukti lebih mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi, ketika banyak perusahaan skala besar banyak yang kolaps bahkan harus menutup perusahaannya, usaha-usaha mikro, kecil dan menengah masih mampu bertahan ditengah badai krisis yang melanda Indonesia tersebut.

Pada tahun 2001 jumlah koperasi yang ada telah mencapai 964 unit yang terdiri dari 865 unit koperasi aktif dan 104 unit koperasi tidak aktif. Tahun 2004 jumlah koperasi menjadi 1.035 unit terdiri dari 666 unit koperasi aktif

dan 369 unit koperasi tidak aktif. Berdasarkan data tahun 2004 jumlah modal koperasi yang berasal dari luar sebesar Rp. 156 milyar sedangkan modal sendiri sebesar Rp. 102 milyar. SHU hanya berkisar Rp. 17 milyar dari Asset Rp. 258 milyar dan Volume usaha sebesar Rp. 409 milyar.

Permasalahan pada sub fungsi ini adalah:

- 1) Rendahnya Produktivitas Pengelolaan Koperasi;
- 2) Rendahnya akses KUMKM pada sumberdaya produktif baik berupa akses permodalan, informasi dan pemasaran.

Sasaran yang ingin dicapai pada sub fungsi ini adalah :

- 1) Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi rata-rata 15 % setiap tahun;
- 2) Meningkatnya nilai asset dan volume usaha koperasi rata-rata 5 % setiap tahun;
- 3) Meningkatnya kualitas SDM pengelola koperasi rata-rata 10 % setiap tahun;
- 4) Meningkatnya nilai asset dan volume usaha UMKM rata-rata 5 % setiap tahun;
- 5) Meningkatnya kualitas SDM pengelola UMKM rata-rata 10 % setiap tahun.

Arah Kebijakan pada sub fungsi Koperasi dan UMKM adalah :

Mendorong dan memfasilitasi masyarakat dalam rangka mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan melalui koperasi, Usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM).

Program indikatif pada sub fungsi ini adalah:

- 1) Pengembangan dan Pemberdayaan KUMKM;
- 2) Peningkatan produktifitas dan pengelolaan KUMKM

d. Sub Fungsi Investasi

Sejak krisis ekonomi tahun 1997 kinerja investasi belum menunjukkan iklim investasi yang menggembirakan, berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan selama 5 tahun terakhir (2000-2004) pertumbuhan rata-rata jumlah industri besar, kecil dan menengah Non PMA/PMDN hanya sebesar

5,09 % per-tahun yaitu dari 1.604 unit usaha pada tahun 2000 menjadi 1.849 unit usaha pada tahun 2004, atau jika dilihat dari nilai investasi yang ditanamkan hanya mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,64 % per-tahun, yaitu dari Rp. 15.716.259.229.000,- pada tahun 2000 menjadi Rp. 18.583.317.206.000,- pada tahun 2004.

Hal ini menunjukkan masih lesunya kegairahan untuk melakukan investasi, baik perluasan usaha yang telah ada maupun untuk investasi baru. Masalah ini akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah yang selama ini lebih didorong oleh pertumbuhan konsumsi ketimbang investasi.

Permasalahan pada sub fungsi investasi adalah :

- 1) Prosedur perijinan investasi yang panjang dan mahal sehingga menimbulkan Ekonomi biaya tinggi;
- 2) Kurangnya informasi penanaman modal;
- 3) Lemahnya efisiensi usaha dalam mendorong peningkatan produksi dan inovasi dalam rangka promosi investasi;
- 4) Rendahnya kualitas SDM dan terbatasnya infrastruktur;
- 5) Lemahnya kinerja BUMD;
- 6) Lemahnya pengelolaan asset daerah.

Sasaran yang akan dicapai dalam sub fungsi investasi adalah:

- 1) Meningkatnya Nilai PMA dan PMDN 10 %;
- 2) Mewujudkan data base penanaman modal;
- 3) Meningkatnya nilai aset daerah dan kinerja BUMD yang profitable guna peningkatan PADS sebesar 5 % setiap tahun

Arah Kebijakan pada sub fungsi Investasi daerah adalah mengembangkan iklim investasi yang kondusif bagi peningkatan investasi/penanaman modal, pemberdayaan BUMD dan optimalisasi manajemen aset daerah.

Program indikatif pada sub fungsi ini adalah :

- 1) Program Regulasi Kebijakan Pelayanan dan Perijinan Penanaman Modal/Investasi;
- 2) Program Pengembangan Kerjasama dan Promosi Investasi;
- 3) Program Investment Capacity Building;

- 4) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Asset Daerah;
- 5) Program Pengembangan dan peningkatan produktivitas dan profitabilitas BUMD.

e. Sub Fungsi Ketenagakerjaan

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka akan semakin bertambah pula beban penyediaan lapangan kerja yang semakin terbatas karena tidak sebanding dengan pertambahan jumlah angkatan kerja.

Berdasarkan data dari BPS jumlah angkatan kerja pada tahun 2003 sebanyak 600.074 orang meningkat menjadi 609.875 orang pada tahun 2004, atau meningkat sebesar 1,63 %. Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yaitu perbandingan antara angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja pada tahun 2004 sebesar 60,74 % atau turun 0,51 % dari 61,25 % pada tahun 2003.

Tingkat kesempatan kerja yaitu perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja pada tahun 2004 sebesar 38,43 %.

Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2004 yaitu perbandingan antara pencari kerja sebesar 15.181 orang dengan angkatan kerja sebesar 130.148 orang atau sebesar 11,6 %.

Permasalahan pada sub fungsi Tenaga Kerja

1) Tingginya angka pencari kerja

Berdasarkan data yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi saat ini tercatat 15.181 orang pencari kerja. Terbatasnya kesempatan kerja tercermin dari penempatan tenaga kerja pada tahun 2004 sebanyak 3.755 orang yaitu penempatan melalui mekanisme Angkatan Kerja Lokal (AKL) sebanyak 2.964 orang, AKAD (Angkatan Kerja Antar Daerah) sebanyak 147 orang dan AKAN (Angkatan Kerja Antar Negara) sebanyak 644 orang

2) Masih rendahnya kualitas Tenaga kerja

Masih rendahnya kualitas tenaga kerja dapat dircerminkan dari tingkat pendidikan pencari tenaga kerja yang ada 15.181 orang, terdiri dari:

- | | | |
|-----------------|---|----------------------|
| a) s/d tamat SD | : | 303 orang (2 %) |
| b) SMP/SLTP | : | 946 orang (6,23%) |
| c) SMU/SLTA | : | 7.095 orang (46,73%) |

d) Diploma : 2.634 orang (17,35%)

e) Perguruan Tinggi : 4.203 orang (27,69%)

- 3) Hubungan industrial yang masih diwarnai dengan gejala ketenagakerjaan.

Hubungan industrial di Kota Semarang dinilai belum cukup aman, walaupun secara umum dapat dikatakan cukup kondusif. Iklim hubungan industrial dimaksud terlihat dari kasus-kasus sebagai berikut:

- a) Unjuk rasa/mogok kerja tahun 2004 sebanyak 11 perusahaan;
- b) Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) dan PHK, tahun 2004 tercatat PHK: 213 perusahaan dan PHI: 19 perusahaan

Gejala ketenagakerjaan diatas dapat terjadi karena beberapa faktor antara lain:

- a) Rendahnya tingkat kesejahteraan pekerja disatu sisi dan peningkatan biaya hidup disisi yang lain;
 - b) Adanya pengusaha yang masih belum melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
 - c) Hubungan dan komunikasi yang belum harmonis atau lancar diantara pengusaha dan pekerja/buruh;
 - d) Belum tumbuh kembangnya sarana-sarana HIP
- 4) Masih rendahnya tingkat kesejahteraan pekerja/buruh

Rendahnya tingkat kesejahteraan pekerja/buruh dapat dilihat dari indikasi besarnya Upah Minimum yang masih mencapai Kebutuhan Minimum (UMK tahun 2005 sebesar Rp.473.600,- atau 94% dari Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) atau Rp.501.918,97 saat ditetapkan).

Pada kenyataannya di lapangan para pengusaha menjadikan UMK sebagai standar/pedoman pengupahan dan belum diberlakukan sebagai jaring pengaman. Disisi lain dimaklumi pula bahwa kondisi dunia usaha saat ini juga belum cukup baik walaupun terdapat tanda-tanda perbaikan. Permasalahan UMK adalah cukup dilematis dan kontroversial dan tetap merupakan potensi kerawanan.

- 5) Masih adanya sebagian tenaga kerja yang belum mendapatkan hak-hak normatif.

Adanya sebagian pengusaha yang masih belum melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya yang menyangkut hak dasar pekerja seperti misalnya upah minimum, upah lembur, cuti tahunan

maupun maupun cuti haid bagi pekerja wanita, kebebasan berserikat bagi para pekerja/buruhnya. Disisi lain masih adanya pekerja anak yang terpaksa bekerja dan diberikan perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku.

- 6) Adanya pengungsi sebagai akibat kerusakan di berbagai Propinsi dan Bencana Alam.

Hingga saat ini masih tercatat pengungsi/eksodan transmigrasi sebanyak 65 KK/269 jiwa serta pendaftar sebanyak 88 KK/347 jiwa dimana pada tahun 2004 belum ada pemberangkatan transmigran. Hal ini merupakan masalah dan perlu adanya penanganan secara serius.

Sasaran pada sub fungsi tenaga kerja adalah :

- 1) Meningkatnya jumlah penempatan tenaga kerja 10 % setiap tahun;
- 2) Menurunnya jumlah kecelakaan kerja 10 % setiap tahun;
- 3) Menurunnya kasus perselisihan buruh 10 % setiaptahun;
- 4) Meningkatnya upah minimum regional 21 % setiap tahun

Arah Kebijakan pada sub fungsi tenaga kerja adalah

Penanggulangan pengangguran dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja dan transmigrasi sehingga lebih kompeten, produktif, mandiri dan berdaya saing tinggi, berkesejahteraan dan terlindungi hak-haknya, serta terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, manusiawi dan berkeadilan.

Program indikatif pada sub fungsi ini adalah :

- 1) Peningkatan Ketrampilan Tenaga kerja;
- 2) Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan transmigrasi;
- 3) Peningkatan Pembinaan Hubungan Industrial;
- 4) Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja;
- 5) Peningkatan Sarana Pelayanan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

f. Sub Fungsi Industri

Perkembangan **Industri Non PMA/PMDN** mengalami peningkatan, apabila pada tahun 2000 industri besar berjumlah 132 unit usaha dan industri Kecil dan Menengah berjumlah 1.472 unit usaha, sampai dengan

pertengahan tahun 2004 Industri Besar menjadi 149 unit usaha dan Industri Kecil dan Menengah berjumlah 1.700 unit usaha.

Perkembangan Sentra Industri Kecil, selama lima tahun terakhir jumlah sentra industri kecil tidak mengalami kenaikan, namun unit usahanya mengalami kenaikan, apabila pada tahun 2000 berjumlah 1.160 unit usaha, sampai dengan pertengahan tahun 2004 menjadi 1.175 unit usaha atau meningkat 1,29 persen.

Jumlah perusahaan yang terdaftar pada tahun 2000 sebanyak 1.604 perusahaan, sampai dengan pada tahun 2004 meningkat menjadi 1.849 perusahaan.

Permasalahan sub fungsi industri adalah :

- 1) Lemahnya peranan IKM terhadap sumberdaya produktif;
- 2) Rendahnya kualitas pengelolaan IKM;
- 3) Terbatasnya akses pasar;
- 4) Terbatasnya akses permodalan;

Sasaran sub fungsi Industri adalah :

- b. Peningkatan produktifitas IKM 10 % setiap tahun;
- c. Peningkatan sentra-sentra home industri rata-rata 5 % setiap tahun;
- d. Peningkatan Akses Pasar & permodalan rata-rata 10 % setiap tahun

Arah Kebijakan sub fungsi ini adalah mengembangkan industri terutama industri kecil/home industri, pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar dengan pengembangan ekspor dan penguatan institusi pasar.

Program indikatif sub fungsi industri adalah :

- 1) Pengembangan industri;
- 2) Peningkatan dan Pengembangan IKM;
- 3) Peningkatan Sumberdaya dan sarana prasarana industri.

FUNGSI KEPARIWISATAAN DAN BUDAYA

- Sub Fungsi Pariwisata

Usaha-usaha untuk mengembangkan pariwisata telah dilakukan, namun belum menunjukkan hasil yang positif, hal dapat terlihat dari menurunnya

jumlah kunjungan wisatawan baik wisata budaya, religius maupun alam pada tahun 2000 sejumlah 882.511 wisatawan, tahun 2001 sejumlah 1.185.159 wisatawan, tahun 2002 sejumlah 785.254 wisatawan, tahun 2003 664.322 wisatawan dan tahun 2004 705.518 wisatawan atau rata-rata turun 2,16 % per tahun.

Permasalahan yang dihadapi pada sub fungsi pariwisata adalah :

- 1) Rendahnya pengelolaan pariwisata;
- 2) Terbatasnya sarana prasarana pariwisata;
- 3) Kurangnya event-event wisata;
- 4) Terbatasnya pemasaran pariwisata.

Sasaran sub fungsi pariwisata adalah :

- 1) Peningkatan kualitas pengelolaan obyek wisata.
- 2) Peningkatan jumlah kunjungan wisata 7 % setiap tahunnya.
- 3) Peningkatan kualitas sarana prasarana obyek wisata.

Arah kebijakan sub fungsi Pariwisata adalah pengembangan dan pemanfaatan potensi-potensi wisata secara maksimal baik wisata dagang maupun wisata religius, peningkatan manajemen pengelolaan pariwisata serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang kepariwisataan.

Program indikatif sub fungsi pariwisata adalah :

- 1) Pengembangan dan pengelolaan pariwisata;
- 2) Peningkatan obyek dan event-event pariwisata;
- 3) Peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata.

VII.1.5 Mewujudkan perlindungan sosial melalui penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, anak jalanan, gelandangan dan pengemis, yatim piatu, korban bencana, perlindungan anak dan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan peningkatan peran pemuda.

FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL

a. Sub fungsi Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan hal-hal yang berkaitan dengan keterlantaran baik anak maupun orang usia lanjut, penderita cacat, korban bencana alam dan korban bencana sosial. Berbagai upaya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) telah dilakukan terus menerus tetapi sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang signifikan. Keadaan ini dipacu dengan semakin sulitnya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Fenomena ini ditandai dengan masih adanya keluarga miskin pada tahun 2004 sebanyak 59.550 KK dan penyandang masalah sosial sebanyak 2.294 orang.

Permasalahan yang dihadapi dalam sub fungsi Kesejahteraan sosial adalah :

- 1) Meningkatnya jumlah penduduk miskin;
- 2) Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- 3) Belum efektifnya penanganan pasca bencana.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan sub fungsi kesejahteraan sosial adalah :

- 1) Meningkatnya cakupan penanganan penduduk miskin 80 %;
- 2) Meningkatnya cakupan penanganan PMKS 60 %;
- 3) Meningkatnya pemberdayaan potensi sosial masyarakat yang meliputi relawan sosial, organisasi sosial, LSM, Lembaga perlindungan sosial masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mencegah dan menanggulangi masalah sosial 30 % dari keseluruhan masalah sosial;
- 4) Mengembangkan hubungan kerjasama antar lembaga sosial, masyarakat dan pemerintah;

- 5) Mempercepat upaya penanggulangan dampak bencana (meminimalisasi resiko akibat bencana).

Arah Kebijakan sub fungsi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial serta meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat; mengembangkan dan menyerasikan kebijakan untuk penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial dalam mendayagunakan sumber-sumber kesejahteraan sosial; meningkatkan pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial; dan meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi, dan Orsos/LSM dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan.

Program Indikatif sub fungsi Kesejahteraan Sosial adalah :

- 1) penanggulangan Kemiskinan
- 2) Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
- 3) Pengembangan dan Partisipasi Sosial Masyarakat;
- 4) Penanganan pasca bencana.

b. Sub fungsi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak .

Jumlah penduduk kota Semarang pada tahun 2004 sebanyak 1.389.421 jiwa yang terdiri penduduk laki-laki sebanyak 691.275 jiwa dan perempuan sebanyak 698.146 jiwa. Dari data tersebut jumlah penduduk perempuan lebih besar dari pada jumlah penduduk laki-laki yaitu sebesar 50,25 %, namun posisi perempuan dalam keluarga, masyarakat dan negara masih diskriminatif. Hal ini jelas terlihat pada keluarga miskin, dimana beban kerja perempuan lebih berat karena mereka harus melakukan pekerjaan ganda, yaitu melakukan pekerjaan reproduktif dan rumah tangga sekaligus masih dibebani berbagai pekerjaan upahan (produktif). Menurut Susenas (Sensus Ekonomi Nasional) rata-rata jam kerja perempuan mencapai 35,69 jam per minggu, tetapi rata-rata upah mereka jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Fenomena yang terjadi banyak kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak yang tidak dilaporkan, dengan anggapan bahwa masalah tersebut adalah masalah domestik keluarga yang tidak perlu diketahui orang lain.

Permasalahan yang dihadapi dalam sub fungsi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah :

- 1) Kurang dipahaminya konsep kesetaraan dan keadilan gender dikalangan masyarakat;
- 2) Rendahnya perlindungan hak-hak perempuan dan anak;
- 3) Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan,
- 4) Terjadinya peningkatan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
- 5) Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, termasuk ketersediaan data dan rendahnya partisipasi masyarakat.

Sasaran pembangunan yang hendak dicapai dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak adalah :

- 1) Meningkatkan pengarusutamaan gender;
- 2) Meningkatnya upaya perlindungan terhadap tindak kekerasan perempuan dan anak (75%);

Arah Kebijakan pembangunan sub fungsi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dititikberatkan untuk meningkatkan perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas SDM perempuan dan kesetaraan gender.

Program indikatif sub fungsi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah

- 1) Pengarusutamaan gender.
- 2) Perlindungan perempuan dan anak.

c. Sub fungsi kependudukan

Kepadatan penduduk tertinggi berada di pusat kota yang merupakan pusat aktivitas ekonomi meliputi Kecamatan Semarang Selatan (14.187 jiwa/km²),

Semarang Tengah (12.510 jiwa/km²), Candisari (11.978 jiwa/km²), Semarang Timur (10.915 jiwa/km²) dan Semarang Utara (10.206 jiwa/km²). Sedangkan wilayah kecamatan Mijen dan kecamatan Tugu mempunyai jumlah penduduk terkecil, dengan kepadatan penduduk dibawah 1000 orang tiap km².

Di sisi lain peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan yang akan melengkapi Keppres Nomor 88 tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan belum optimal. Selanjutnya, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan dan tertib administrasi masih rendah.

Permasalahan yang dihadapi dalam sub fungsi kependudukan adalah :

- 1) Persebaran penduduk di Kota Semarang tidak merata;
- 2) Tingginya laju pertumbuhan penduduk akibat urbanisasi;
- 3) Belum optimalnya penataan administrasi kependudukan.

Sasaran pembangunan sub fungsi kependudukan adalah :

- 1) Meningkatkan keserasian kebijakan pembangunan dalam rangka mobilisasi dan penyebaran penduduk.
- 2) Meningkatkan pengelolaan administrasi kependudukan

Arah Kebijakan pembangunan sub fungsi kependudukan adalah upaya pengelolaan administrasi kependudukan dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian laju pertumbuhan dan persebaran penduduk.

Program indikatif sub fungsi kependudukan adalah :

- 1) Pengembangan administrasi kependudukan;
- 2) Peningkatan pelayanan kependudukan;
- 3) Pengendalian laju urbanisasi dan penyebaran penduduk.

d. Sub fungsi Program KB dan Keluarga Sejahtera

Penyerahan kewenangan Bidang KB kepada Pemerintah Kota sesuai dengan Kepres Nomor 103/2001, yang kemudian diubah menjadi Kepres Nomor. 9/2004, menuntut adanya komitmen yang tinggi dari Pemerintah Kota Semarang tentang arti pentingnya pelaksanaan program KB bagi

keberhasilan pembangunan. Rata-rata kelahiran total selama tahun 2000-2003 dibawah angka 2 (Total Fertility Rate (TFR)>2). Indikator ini menunjukkan suatu ukuran dari keberhasilan dalam upaya pengendalian kelahiran.

Pendataan Keluarga 2002 hanya 76,25 persen pasangan usia subur (PUS) menggunakan kontrasepsi, sedangkan 23,75 persen PUS yang sebenarnya tidak ingin anak atau menunda kehamilannya, tidak memakai kontrasepsi (unmet need). Sebagian besar masyarakat, orang tua, maupun remaja belum memahami hak-hak dan kesehatan reproduksi remaja. Pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kesehatan reproduksi remaja masih rendah dan tidak tepat. Masyarakat dan keluarga masih enggan untuk membicarakan masalah reproduksi secara terbuka dalam keluarga. Para anak dan remaja lebih merasa nyaman mendiskusikannya secara terbuka dengan sesama teman. Pemahaman nilai-nilai adat, budaya, dan agama yang menganggap pembahasan kesehatan reproduksi sebagai hal yang tabu justru lebih populer. Sementara itu, pusat atau lembaga advokasi dan konseling hak-hak dan kesehatan reproduksi bagi remaja yang ada saat ini masih terbatas jangkauannya dan belum memuaskan mutunya. Pendidikan kesehatan reproduksi remaja melalui jalur sekolah belum sepenuhnya berhasil. Semua ini mengakibatkan banyaknya remaja yang kurang memahami atau mempunyai pandangan yang tidak tepat tentang masalah kesehatan reproduksi. Pemahaman yang tidak benar tentang hak-hak dan kesehatan reproduksi ini menyebabkan banyaknya remaja yang berperilaku menyimpang tanpa menyadari akibatnya terhadap kesehatan reproduksi mereka.

Permasalahan Sub fungsi Program KB dan Keluarga Sejahtera adalah:

- 1) Kurangnya pemerataan pelayanan KB dan ketersediaan alat kontrasepsi yang diminati masyarakat;
- 2) Kurangnya pengetahuan dan kesadaran sebagian masyarakat dan remaja tentang hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi;
- 3) Masih tingginya jumlah keluarga pra sejahtera dan lemahnya ketahanan keluarga;
- 4) Masih lemahnya kualitas intitusi masyarakat dan jejaring KB ditingkat basis

Sasaran Sub fungsi Program KB dan Keluarga Sejahtera adalah :

- 1) Mempertahankan TFR (Total Fertility Rate) dibawah 2 (dua), melalui pencapaian peserta KB aktif minimal 75 % dari total PUS (Pasangan Usia Subur);
- 2) Mempertahankan jumlah PUS menurut umur isteri dibawah usia 20 tahun tidak lebih dari 1% dari total PUS melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran, sikap dan perilaku remaja terhadap kesehatan reproduksi;
- 3) Terbinanya BKB (Bina Keluarga Balita) aktif 82%, BKR (Bina Keluarga Remaja) aktif 86% serta kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) aktif 18,75% dalam upaya peningkatan pemberdayaan dan ketahanan keluarga;
- 4) Melembaganya IMP (Institusi Masyarakat Perkotaan) dan jejaring KB sampai tingkat basis, yaitu Pos Pembantu KB Desa (PPKBD) mandiri 89% sub PPKBD mandiri 47% dan kelompok KB mandiri 37,65%;

Arah Kebijakan Sub fungsi Program KB dan Keluarga Sejahtera adalah pada upaya pengendalian Kelahiran melalui kesadaran masyarakat dalam ber-KB, meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja serta pendewasaan usia perkawinan, meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam upaya peningkatan kualitas keluarga dan memperkuat kelembagaan dan Jejaring KB dalam upaya pembudayaan keluarga kecil berkualitas.

Program indikatif sub fungsi Program KB dan Keluarga Sejahtera adalah

- 1) Keluarga Berencana;
- 2) Kesehatan reproduksi remaja;
- 3) Ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- 4) Penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring Keluarga berencana.

e. Sub fungsi Pengembangan Kelembagaan Masyarakat

Pembangunan pada dasarnya ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat pada saat ini dipercaya sebagai suatu pendekatan pembangunan yang tepat untuk

mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan institusi/kelembagaan lokal dimasyarakat merupakan investasi untuk memperkuat ikatan sosial dan menjalin hubungan di antara masyarakat. Pada tahun 2000 jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada di tingkat Kelurahan sebanyak 6 buah sedangkan pada tahun 2004 hanya bertambah 2 buah.

Kondisi kepemudaan saat ini harus diakui bahwa semangat kepeloporan pemuda dalam proses pembangunan daerah masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dicermati dari kurang mandirinya organisasi kepemudaan yang ada dan kurangnya koordinasi antar organisasi kepemudaan, banyaknya perkelahiran antar pelajar, penyalahgunaan narkoba oleh generasi muda, perilaku seksual menyimpang dan tindak kriminal lainnya.

Kondisi keolahragaan yang ada saat ini menunjukkan bahwa budaya masyarakat untuk berolahraga belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat, hal ini terlihat dari rendahnya aktifitas olah raga yang dilakukan oleh masyarakat. Disisi lain sarana dan prasarana olah raga belum mendukung terwujudnya budaya berolahraga, dan belum dapat menunjukkan prestasi dibidang olah raga secara optimal baik ditingkat nasional maupun ditingkat internasional. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya jumlah lapangan olah raga sebanyak 4 buah dari 74 buah tahun 2000 menjadi 70 pada tahun 2004.

Permasalahan yang dihadapi sub fungsi Pengembangan Kelembagaan Masyarakat adalah :

- 1) Lemahnya kemampuan lembaga masyarakat dalam mengelola informasi dan komunikasi;
- 2) Kurangnya peran serta pemuda dalam pembangunan fisik dan non fisik;
- 3) Rendahnya budaya olahraga karena kurang tersedianya sarana dan prasarana olahraga.

Sasaran pembangunan sub Fungsi Pengembangan Kelembagaan Masyarakat adalah :

- 1) Meningkatkan fungsi dan kemampuan lembaga masyarakat;
- 2) Meningkatkan sikap dari perilaku pemuda yang beriman, bertaqwa, mandiri, inovatif dan kreatif;
- 3) Meningkatkan budaya olah raga dilingkungan masyarakat dengan harapan terwujudnya hidup sehat jasmani dan rohani.

Arah Kebijakan Sub fungsi Pengembangan Kelembagaan Masyarakat adalah upaya mewujudkan penguatan kelembagaan masyarakat sehingga mampu mengembangkan potensi dan berperan aktif dalam setiap tahapan pembangunan.

Program Indikatif sub fungsi Pengembangan Kelembagaan Masyarakat adalah :

- 1) Penguatan organisasi sosial;
- 2) Pembinaan pemuda;
- 3) Pembinaan Olahraga.

f. Sub fungsi Agama

Fenomena yang terjadi pada sebagian masyarakat sekarang ini dalam kehidupan beragama baru pada tataran simbol-simbol keagamaan belum sepenuhnya bersifat substansial. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan gejala negatif seperti perilaku asusila, tindak kejahatan, praktek KKN, pornografi, perjudian, perceraian dan ketidakharmonisan keluarga menunjukkan masih lemahnya peran agama dalam keluarga sebagai basis pembinaan masyarakat dan bangsa.

Derasnya arus globalisasi terutama melalui media cetak dan elektronik yang semakin kuat mempengaruhi perilaku anak didik yang cenderung ke arah negatif, yang seharusnya dapat dicegah atau dikurangi dengan pemahaman dan penghayatan agama.

Permasalahan yang dihadapi sub fungsi agama adalah :

- 1) Kurangnya Pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama di masyarakat;
- 2) Belum memadainya pelayanan kehidupan beragama;
- 3) Belum memadainya sarana dan prasarana peribadatan.

Sasaran pembangunan sub fungsi agama adalah :

- 1) Meningkatkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral spiritual dan etika dalam kehidupan keluarga dan masyarakat serta meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup beragama;

- 2) Menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat kemajemukan;
- 3) Meningkatkan pelayanan dan kemudahan umat dalam melaksanakan ibadah.

Kebijakan Sub fungsi keagamaan adalah pada upaya peningkatan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan umat beragama serta peningkatan keimanan dan ketaqwaan.

Program Indikatif sub fungsi keagamaan adalah

- 1) Peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai keagamaan ,
- 2) Peningkatan pelayanan kehidupan beragama;
- 3) Pengembangan dan peningkatan lembaga-lembaga sosial keagamaan;
- 4) Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana peribadatan.

g. Sub fungsi kebudayaan dan kesenian

Pada era globalisasi yang ditandai perkembangan teknologi dan informasi yang cepat, karakteristik budaya ketimuran yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama, mengalami ancaman yang sangat berat, karena dihadapkan pada kondisi dimana kadar nilai moral melemah, krisis jati diri dan kepribadian pada sebagian masyarakat. Keadaan ini menjadikan kebudayaan (nilai-nilai budaya) memiliki peran yang strategis dalam membangun dan menggarap sisi nilai-nilai rohani, kemanusiaan serta interaksi sosial dalam kehidupan dan pelestarian seni dan budaya daerah.

Permasalahan pembangunan sub fungsi kebudayaan dan kesenian adalah :

- 1) Kurang optimalnya fasilitasi apresiasi dan pengembangan budaya dan kesenian daerah;
- 2) Kurang optimalnya upaya penyelamatan dan pemanfaatan benda cagar budaya sebagai asset peninggalan sejarah;
- 3) Terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya sebagai akibat adanya akulturasi dan globalisasi;
- 4) Kurangnya upaya pelestarian kebudayaan khas Kota Semarang;

5) Kurangnya sarana prasarana pengembangan budaya dan kesenian

Sasaran pembangunan sub fungsi kebudayaan dan kesenian adalah :

- 1) Melaksanakan penyelamatan dan pemanfaatan benda cagar budaya;
- 2) Melestarikan aset peninggalan sejarah;
- 3) Meningkatkan apresiasi budaya dan kesenian daerah;
- 4) Meningkatkan pendayagunaan dan pengembangan bahasa, sastra dan keputakaan;
- 5) Meningkatkan media informasi kebudayaan dan kesenian sebagai sumber ilmu pengetahuan;
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana kebudayaan dan kesenian yang memadai;

Kebijakan sub fungsi kebudayaan adalah untuk memperkuat, mengembangkan dan melestarikan potensi budaya lokal dalam rangka membentuk karakteristik masyarakat kota, mencegah masuknya budaya lain yang negatif atau yang tidak sesuai dengan budaya lokal dan memberi ruang gerak untuk berkreasi dan berinovasi dalam pengembangan kesenian lokal.

Program Indikatif sub fungsi kebudayaan dan kesenian adalah

- 1) Pengembangan, pelestarian dan pembinaan kesenian dan nilai-nilai budaya;
- 2) Pengembangan dan pengendalian bahasa, kesusastraan dan keputakaan;

VII.1.6 Mewujudkan terselenggaranya kegiatan penataan ruang yang konsisten bagi terwujudnya struktur dan pola tata ruang yang serasi, lestari dan optimal didukung pengembangan infrastruktur yang efektif dan efisien serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

FUNGSI PENATAAN RUANG

Pemahaman masyarakat terhadap rencana tata ruang perlu ditingkatkan, terutama dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian tata ruang melalui penyebaran informasi, penyebaran leaflet mekanisme perijinan, dan pemberian penjelasan kepada masyarakat.

Dokumen rencana tata ruang yang lebih detail dalam bentuk RTRK/RTBL belum mencakup seluruh kawasan, masih terbatas pada Kawasan Kota Lama, sehingga beberapa kawasan strategis lainnya perlu disusun RTRK/RTBL.

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan penataan ruang telah dikembangkan sistem informasi tata ruang (UDMIS) yang masih membutuhkan usaha-usaha peningkatan kualitas.

Rencana RTRW dan RDTR tiap-tiap Bagian Wilayah Kota Semarang dengan periode Tahun 2000 sampai Tahun 2010, sehingga pada Tahun 2005 – 2010 perlu dilaksanakan kegiatan review terhadap RTRW dan RDTR dalam rangka mempersiapkan dokumen RTRW dan RDTR untuk periode Tahun 2010 – 2020.

Permasalahan yang dihadapi dalam fungsi tata ruang adalah :

- 1) Masih terjadinya perbedaan pemahaman, penafsiran dan sikap antar berbagai pemangku kepentingan pembangunan terhadap permasalahan penataan dan pengembangan ruang wilayah kota;
- 2) Rendahnya kualitas basis data serta kurang efisiennya pengembangan sistem informasi penataan ruang wilayah
- 3) Kurang konsistennya rumusan rencana dengan kegiatan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
- 4) Perencanaan tata ruang yang ada belum dapat mengakomodasi perkembangan kota yang begitu cepat.
- 5) Rencana tata ruang belum mengatur pemanfaatan secara teknis ;
- 6) Perkembangan kawasan tidak sesuai dengan potensi dan nilai strategis kawasan;
- 7) Terjadinya penurunan kualitas lingkungan pada beberapa kawasan
- 8) Kurang tertibnya administrasi pertanahan.
- 9) Kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan pembangunan dalam penataan ruang

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan sub fungsi tata ruang adalah :

- 1) Meningkatnya kualitas rencana tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang secara konsisten;
- 2) Tersedianya jaringan basis data dalam rangka perencanaan tata ruang dan sistem informasi tata ruang secara mutakhir dan mudah diakses;

- 3) Tercapainya kesepakatan dan penafsiran antar pemangku kepentingan pembangunan terhadap kegiatan penataan ruang;
- 4) Optimalisasi dan revitalisasi kawasan sesuai dengan potensi dan nilai strategis kawasan;
- 5) Terwujudnya koordinasi yang harmonis antar pemangku kepentingan pembangunan.

Arah Kebijakan pembangunan sub fungsi ini diarahkan bagi terselenggaranya kegiatan penataan ruang yang berkualitas, konsisten serta partisipatif dalam mengarahkan dan mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan kota.

Program indikatif sub fungsi penataan ruang adalah:

- 1) Penyusunan rencana tata ruang;
- 2) Pengelolaan dan pengendalian tata ruang;
- 3) Pengembangan sistem informasi penataan ruang;
- 4) Penataan, optimalisasi dan revitalisasi kawasan.

FUNGSI INFRASTRUKTUR / SARANA PRASARANA

Pembangunan infrastruktur adalah bagian integral dari pembangunan kota merupakan salah satu fasilitas penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Kondisi infrastruktur seperti jaringan jalan, jaringan transportasi, jaringan drainase, persampahan, sumberdaya air dan pelayanan air bersih, serta sarana prasarana lainnya masih belum mengimbangi perkembangan dinamika masyarakat terutama di wilayah pengembangan. Berkurangnya kualitas infrastruktur dan tertundanya pembangunan infrastruktur akan memperlambat perkonomian daerah.

a. Sub Fungsi Jaringan Jalan.

Panjang jalan di Kota Semarang sampai tahun 2004 adalah 2.762,37 km, sesuai dengan kewenangannya diklasifikasikan : Jalan Negara sepanjang 59,76 km, Jalan Propinsi sepanjang 28,89 km dan jalan kota/lokal sepanjang 2.673,72 km.

Kondisi jalan kota pada tahun 2004 sebagai berikut 1.167,37 km kondisi baik, 880,28 Km kondisi sedang dan kondisi rusak sepanjang 626,31 Km

Permasalahan yang dihadapi dalam sub fungsi jaringan jalan adalah:

- 1) Rendahnya umur konstruksi jalan dan jembatan di wilayah Semarang bawah
- 2) Masih adanya jalan yang tidak memenuhi kualitas sesuai dengan kapasitas dan klas jalan
- 3) Kurangnya jaringan jalan dan prasarana jalan dalam pemenuhan kebutuhan pengembangan wilayah
- 4) Tidak seimbang nya penambahan ruas jalan dengan pengguna jalan

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan sub fungsi jaringan Jalan adalah

- 1) Meningkatnya kualitas jalan serta terpenuhi spesifikasi jalan sesuai dengan fungsi dan kelas jalan Kota Semarang;
- 2) Terbangunnya jaringan jalan dan prasarana sesuai rencana pengembangan wilayah;
- 3) Terbangunnya jalan Tol Semarang – Solo; Semarang – Kendal ; Semarang – Demak.

Arah kebijakan pembangunan sub fungsi jaringan jalan diarahkan bagi perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan pelayanan wilayah, pembentukan struktur jaringan jalan sesuai dengan hirarki dan pelayanan jalan, interkoneksi antar bagian wilayah pengembangan dan antar pusat pelayanan transportasi dan pusat pelayanan perkotaan serta peningkatan kapasitas jalan.

Program indikatif sub fungsi jaringan jalan adalah

- 1) Pemeliharaan jalan dan jembatan
- 2) Peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan.

b. Sub Fungsi Jaringan Transportasi dan Lalulintas

Pelayanan Jaringan Transportasi/lalulintas khususnya pelayanan angkutan umum terdiri dari 71 trayek dibagi menjadi pelayanan trayek Utama 33 trayek dengan jumlah angkutan 687 buah dan trayek cabang 11 trayek dengan jumlah angkutan 1.527 buah dan trayek ranting dengan 27 trayek dengan jumlah angkutan 713 buah.

Keberadaan terminal dan sub terminal di Kota Semarang yaitu Terminal Terboyo, Sub Terminal Penggaron dan Sub Terminal Mangkang belum mampu memenuhi kebutuhan fungsi pelayanan sarana transportasi.

Hal ini terlihat dari berkembangnya terminal-terminal bayangan yang menyita badan jalan.

Permasalahan yang dihadapi dalam sub fungsi jaringan transportasi dan lalu lintas adalah:

- 1) Belum terbentuknya struktur pelayanan transportasi yang efisien sesuai hirarki pelayanan dan moda transportasi.
- 2) Masih kurangnya prasarana dan fasilitas pelayanan transportasi .
- 3) Kurang tertibnya pengguna jalan dalam mentaati peraturan lalu lintas.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan sub fungsi jaringan transportasi dan lalu lintas adalah:

- 1) Terbentuknya struktur sarana dan pelayanan transportasi yang efektif dan efisien.
- 2) Tersedianya prasarana dan fasilitas pelayanan transportasi.
- 3) Terwujudnya budaya tertib berlalu lintas.

Arah Kebijakan pembangunan sub fungsi jaringan transportasi diarahkan bagi terwujudnya tertib dan disiplin berlalulintas, pemenuhan pelayanan transportasi antar bagian wilayah dan antar lingkungan yang serasi antara hirarki pelayanan dan moda transportasi yang representatif.

Program indikatif sub fungsi jaringan transportasi dan lalu lintas adalah:

- 1) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas transportasi,
- 2) Pembangunan prasarana dan fasilitas transportasi,
- 3) Peningkatan aksesibilitas pelayanan transportasi
- 4) Peningkatan disiplin lalulintas dan angkutan.

c. Sub Fungsi Sumber Daya Air dan Pelayanan Air Bersih

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat dan fungsi perkotaan. Permasalahan klasik yang dihadapi berkaitan dengan air bersih adalah masih rendahnya kinerja pelayanan air bersih, yaitu belum

meratanya sistem jaringan air bersih dan masih minimnya kapasitas air bersih. Serta tingkat kebocoran mencapai 41%.

Permasalahan yang dihadapi dalam sub fungsi Sumber Daya Air dan Pelayanan Air Bersih adalah:

- 1) Belum optimalnya Tingkat cakupan pelayanan air bersih
- 2) Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber air baku untuk pelayanan air bersih
- 3) Tingginya tingkat eksploitasi sumber daya air bawah tanah
- 4) Tingginya tingkat pencemaran sumber air bersih
- 5) Berkurangnya tingkat pengisian (*recharge*) air tanah.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan sub fungsi Sumber Daya Air dan Pelayanan Air Bersih adalah

- 1) Terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat dengan cakupan pelayanan 60%;
- 2) Terpenuhinya kebutuhan air baku dengan pembangunan waduk Jatibarang;
- 3) Terkendalinya eksploitasi air bawah tanah;
- 4) Meningkatnya tingkat pengisian air bawah tanah.

Arah Kebijakan pembangunan sub fungsi Sumber Daya Air dan Pelayanan Air Bersih diarahkan bagi pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat serta menjaga kualitas dan kuantitas sumber daya air.

Program indikatif kegiatan sub Sumber Daya Air dan Pelayanan Air Bersih adalah:

- 1) Peningkatan suplai air baku,
- 2) Peningkatan Cakupan Pelayanan Air Bersih,;
- 3) Monitoring dan Pengendalian eksploitasi air bawah tanah,
- 4) Rehabilitasi lahan dan hutan.

d. Sub Fungsi Jaringan Drainase

Daerah Genangan Banjir di Kota Semarang seluas 9.207 ha dan luas kawasan Rob 13,46 ha terjadi di wilayah terutama kawasan bawah/pantai, yaitu di

Kelurahan Pendrikan Lor, Kranggan, Kauman, Pekunden, Miroto, Sekayu, dan Gabahan Kecamatan Semarang Tengah; Kelurahan Mlatiharjo, Maltibaru, dan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur, Kelurahan Tanjung Emas Kecamatan Semarang Utara; Kelurahan Sambungharjo, Bangetayu Kulon, Genuksari, Kudu, Trimulyo, Karangroto dan Muktiharjo Lor Kecamatan Genuk; Kelurahan Tambakharjo, Siwalan, Pandean Lamper, Sambirejo, Gayamsari, Sawah Besar, Kaligawe, Kecamatan Gayamsari; Kelurahan Krapyak dan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat, Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik.

Permasalahan yang dihadapi dalam sub fungsi Drainase adalah:

- 1) Terjadinya banjir danROB ;
- 2) Belum optimalnya sistem pengendalian banjir danROB;
- 3) Kapasitas saluran kurang mampu menampung debit air akibat hujan di daerah hulu;
- 4) Menurunnya kapasitas saluran yang diakibatkan oleh sedimantasi dan sampah;
- 5) Maraknya penyalahgunaan Daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga kurang mendukung fungsi bantaran sungai dan *catchment area*.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan sub fungsi Drainase adalah :

- 1) Mengurangi area dan lamanya genangan Banjir dan ROB;
- 2) Meningkatnya kapasitas saluran drainase;
- 3) Teraturnya debit limpasan sesuai dengan kapasitas saluran, pengelolaan dan konservasi cacthment area dan badan sungai.

Arah Kebijakan pembangunan sub fungsi Drainase diarahkan bagi pengendalian banjir dan penanggulangan ROB dengan pembangunan sistem drainase wilayah dan kawasan.

Program indikatif sub fungsi drainase adalah:

- 1) Pembangunan peningkatan saluran dan sungai,
- 2) Pengaturan Debit Limpasan Air Hujan,
- 3) Penanggulangan ROB.

e. Sub Fungsi Jaringan Irigasi

Fungsi utama irigasi merupakan suplai kebutuhan lahan pertanian, walaupun jumlah luas lahan pertanian di Kota Semarang cenderung mengalami penurunan, namun fungsi irigasi sangat diperlukan untuk menunjang penyediaan bahan pangan.

Luas lahan pertanian dengan irigasi teknis 226 ha; irigasi setengah teknis 56,94 Ha, Irigasi sederhana 976 ha, irigasi non PU 61 ha.

Permasalahan yang dihadapi dalam sub fungsi Jaringan Irigasi adalah:

- 1) Menurunnya fungsi bendung dan saluran irigasi,
- 2) Kurang optimalnya kelembagaan pengelola sistem jaringan irigasi.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan sub fungsi Jaringan Irigasi adalah :

- 1) Meningkatnya fungsi bendung dan saluran irigasi;
- 2) Meningkatnya fungsi pengelolaan sistem irigasi.

Arah Kebijakan pembangunan sub fungsi Jaringan Irigasi diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan air bagi kegiatan pertanian dengan optimalisasi pengelolaan jaringan irigasi.

Program indikatif sub fungsi Jaringan irigasi adalah

- 1) Pembangunan peningkatan bendung dan saluran,
- 2) Peningkatan pengelolaan sistem jaringan irigasi.

f. Sub Fungsi Jaringan Persampahan

Sampah merupakan masalah perkotaan yang jika dikelola dengan benar akan menjadi asset dan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, namun apabila tidak dikelola secara benar akan menjadi beban dan berdampak negatif bagi masyarakat.

Volume sampah yang dihasilkan setiap hari dari rumah tangga maupun industri saat ini mencapai 3.500 m³ atau setara dengan 875 ton. Dari jumlah sampah tersebut baru dapat dilayani sebesar 71 %, sisanya belum dikelola secara benar.

Permasalahan yang dihadapi dalam sub fungsi Jaringan Persampahan adalah:

- 1) Meningkatnya volume sampah 1 % tiap tahun
- 2) Menurunnya kapasitas pengangkutan sampah
- 3) Menurunnya kapasitas serta kualitas pengelolaan TPA Jatibarang.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan sub fungsi jaringan persampahan adalah:

- 1) Terangkutnya volume sampah yang dihasilkan dari 71% menjadi 80 %;
- 2) Terwujudnya TPA baru.
- 3) Peningkatan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan

Arah Kebijakan pembangunan sub fungsi Jaringan Persampahan diarahkan bagi optimalisasi pelayanan pengelolaan sampah.

Program indikatif sub fungsi jaringan persampahan adalah:

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana persampahan;
- 2) Optimalisasi kapasitas dan pengelolaan TPA dan IPLT.
- 3) Optimalisasi Peningkatan Obyek Retribusi
- 4) Bimbingan dan penyuluhan Kebersihan.

g. Sub Fungsi Pertamanan, Ruang Hijau dan Dekorasi Kota

Fungsi pertamanan, ruang hijau dan dekorasi kota disamping merupakan fungsi keindahan juga berfungsi sebagai ruang interaksi masyarakat, sarana olah raga, kenyamanan dan sebagai paru-paru kota.

Kualitas maupun kuantitas ruang hijau saat ini dinilai masih sangat kurang, tidak sebanding dengan aktivitas masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi dalam sub fungsi pertamanan, ruang hijau dan dekorasi kota adalah:

- 1) Kurangnya fasilitas ruang publik yang dapat digunakan sebagai sarana interaksi dan rekreasi masyarakat;
- 2) Menurunnya keindahan dan kenyamanan kota akibat kurang mencukupinya fasilitas dekorasi dan taman kota;

- 3) Meningkatnya polusi udara yang diakibatkan kurang mencukupinya fasilitas ruang hijau.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan sub fungsi pertamanan, ruang hijau dan dekorasi kota adalah:

- 1) Terpenuhinya kebutuhan taman dan ruang terbuka hijau kota;
- 2) Terciptanya keindahan dan kenyamanan kota;
- 3) Tercapainya baku mutu lingkungan (berkurangnya dampak polusi udara akibat kegiatan aktivitas perkotaan).

Arah Kebijakan pembangunan sub fungsi pertamanan, ruang hijau dan dekorasi kota diarahkan bagi terciptanya keindahan, kenyamanan dan kesehatan lingkungan perkotaan.

Program indikatif sub fungsi pertamanan, ruang hijau dan dekorasi kota adalah:

- 1) Pertamanan dan penghijauan kota,
- 2) Dekorasi kota,

g. Sub Fungsi Perumahan dan Permukiman

Pertambahan jumlah penduduk membawa konsekuensi akan peningkatan kebutuhan perumahan bagi masyarakat. Pemenuhan kebutuhan perumahan untuk masyarakat menengah kebawah telah dilakukan oleh Perum Perumnas sebanyak 36 kawasan, sedangkan pemenuhan kebutuhan perumahan untuk masyarakat menengah keatas dilakukan oleh pengembang swasta (REI) sebanyak 45 kawasan.

Permasalahan yang dihadapi dalam sub fungsi Perumahan dan Permukiman adalah:

- 1) Terbatasnya kemampuan penyediaan prasarana dan sarana perumahan;
- 2) Masih terdapatnya kawasan kumuh dan menurunnya kualitas lingkungan permukiman;
- 3) Keterbatasan kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah;

- 4) Meningkatnya jumlah kepala keluarga yang belum memiliki rumah dan banyaknya pemukiman liar.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan sub fungsi Perumahan dan Permukiman adalah:

- 1) Terpenuhinya kebutuhan perumahan masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah;
- 2) Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman.

Arah Kebijakan pembangunan sub adalah terpenuhinya kebutuhan rumah yang layak huni dan terjangkau.

Program indikatif sub fungsi perumahan dan permukiman adalah :

- 1) Pemenuhan dan Pengembangan Perumahan;
- 2) Pemberdayaan Komunitas Perumahan;
- 3) Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana permukiman.

FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Paradigma pembangunan diarahkan pada pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Pembangunan yang tidak memperhatikan daya lingkungan dapat mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem. Dampak kerusakan lingkungan yang terjadi di Kota Semarang akibat pembangunan yang tidak terkendali adalah terjadinya banjir dan rob di Kota Semarang bagian bawah serta tanah longsor. Dampak kerusakan lingkungan yang lain juga merupakan masalah di kota besar adalah tingginya pencemaran udara, air dan tanah.

Permasalahan yang dihadapi dalam fungsi lingkungan hidup adalah :

- 1) Rusaknya lingkungan akibat penggalian, pengeprasan lahan dan penambangan Galian C;
- 2) Meningkatnya polusi udara dan polusi air akibat limbah industri, limbah rumah tangga, limbah kegiatan transportasi;
- 3) Kurang lestarinya lingkungan pantai;
- 4) Masih terjadinya dampak negatif akibat pembangunan;
- 5) Lemahnya penegakkan hukum terhadap kerusakan lingkungan

6) Lemahnya data base sistem informasi lingkungan

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan fungsi lingkungan hidup adalah :

- 1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota;
- 2) Terselenggaranya kegiatan pembangunan yang memperhatikan daya dukung lahan yang serasi dan dan keberlanjutan.

Kebijakan pembangunan fungsi Lingkungan Hidup diarahkan bagi tercapainya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, melalui penegakan hukum secara konsisten.

Program indikatif sub fungsi Lingkungan Hidup adalah

- 1) Perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- 2) Pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- 3) Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- 4) Pengendalian, pencemaran dan perusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

VII.2 Rencana Kerja

Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2005-2010 dalam pencapaian visi Kota ” SEMARANG KOTA METROPOLITAN YANG RELIGIUS BERBASIS PERDAGANGAN DAN JASA” tertuang dalam matrik Program Lima Tahunan yang meliputi kebijakan, program, indikator keluaran, indikasi kegiatan baik dalam kerangka anggaran maupun kerangka regulasi, dan pagu indikatof lima tahunan adalah sebagai berikut :

BAB VIII

PENUTUP

VIII.1 Program Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan Kota Semarang Tahun 2010 (Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010) yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2010 serta dengan mengingat waktu yang sangat sempit bagi Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil Pilkada langsung Tahun 2010 untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2010, maka Pemerintah Kota Semarang menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010 sesuai dengan jadwal dengan agenda menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam Tahun 2010. Selanjutnya Walikota dan wakil Walikota terpilih dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 yang sudah disusun untuk pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih baik.

VIII.2 Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pembangunan, diterapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntable dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2005-2010. Pelaksanaan kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka anggaran harus memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan yang melekat pada masing-masing unit kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2005-2010 merupakan pedoman atau acuan bagi unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Semarang maupun masyarakat termasuk dunia usaha dalam pelaksanaan program pembangunan sehingga tercapai sinergi antar pelaku pembangunan dalam rangka pencapaian visi Kota Semarang.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan, sebagai berikut :

- a. Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Semarang serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2005-2010 dengan sebaik-baiknya.
- b. Sebagai implemmentasi pelaksanaan RPJMD, maka Pemerintah Kota Semarang wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen operasional pelaksanaan pembangunan tahunan sebagai acuan dalam penyusunan APBD Kota Semarang.
- c. Bagi Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Kota Semarang. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tiap program maka dalam kerangka koordinasi perencanaan masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, wajib membuat Rencana Strategi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RENSTRA SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahunan. Selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD) yang merupakan implementasi tahunan dari Renja SKPD sebagai dasar dalam penyusunan APBD Kota Semarang.
- d. Masyarakat termasuk dunia usaha dapat berperanserta dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya akan dituangkan dalam produk Peraturan Daerah. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan masyarakat termasuk dunia usaha dapat berperanserta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan berdasarkan rencana peranserta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.
- e. Pada akhir tahun Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Semarang wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terjadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur APBD dan peraturan lainnya.

- f. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Semarang wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan serta tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil kepada Walikota Semarang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SUKAWI SUTARIP

